

BUKU DIKTAT

SOSIOLOGI

**PEDESAAN
DAN**

PERKOTAAN

AHMED FERNANDA DESKY, M.SI.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt tuhan pencipta alam semesta. Tak lupa pula penulis hanturkan shalawat beriring salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, petunjuk, dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku diktat yang berjudul **“Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan”**. Buku ini dibuat sebagai sarana maupun panduan materi matakuliah sosiologi pedesaan dan sosiologi perkotaan. Selain itu, buku ini juga sangat berguna bagi mahasiswa dalam mempelajari kajian sosiologi yang dilihat di ranah sosial yang terkhusus di wilayah pedesaan dan perkotaan di Indonesia. Meskipun kedua ranah kajian memiliki distingsinya masing-masing, namun fokus buku materi perkuliahan ini dilihat dari karakteristik masyarakat pedesaan dan perkotaan, tipologi masyarakat pedesaan dan perkotaan, hubungan masyarakat pedesaan dan perkotaan, sistem pemerintahan pedesaan dan perkotaan, problematika masyarakat pedesaan dan perkotaan, perilaku sosial, interaksi sosial, perubahan sosial, dan struktur sosialnya.

Buku ini mencerminkan keinginan penulis untuk menunjukkan sebuah panduan pembelajaran di bidang sosiologi dalam konteks melihat situasi dan kondisi masyarakat pedesaan dan perkotaan khususnya di Indonesia. Gagasan maupun pemikiran penulis dalam menulis buku ini adalah sebagai bahan bacaan bagi para mahasiswa yang mengikuti kuliah sosiologi pedesaan dan perkotaan dapat dengan mudah memahami kajian ilmu sosial di ranah desa dan kota. Namun, sebelum membaca buku ini secara detail, sebaiknya mahasiswa memiliki pengetahuan dasar mengenai konsep-konsep dasar sosiologi dan prinsip-prinsip sosiologi dalam konteks masyarakat desa dan kota.

Untuk menyempurnakan buku ini, penulis berharap dengan kehadiran buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca terutama kalangan mahasiswa. Buku ini tentu saja memiliki kekurangan dari segala lini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk menambah kualitas pemikiran baru nantinya. Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan manfaat dalam perkembangan teori sosiologi pedesaan dan perkotaan. Wallahu a’lam bi shawab.

Medan, Maret 2022

Ahmed Fernanda Desky, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I KONSEP DASAR SOSIOLOGI PEDESAAN DAN PERKOTAAN	1
1. Pengenalan Konsep dan Ruang Lingkup Masyarakat Desa dan Kota	1
2. Defenisi Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan	3
A. Pengertian Sosiologi Pedesaan	3
B. Pengertian Sosiologi Perkotaan	5
3. Sejarah Perkembangan Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan	7
A. Sejarah Sosiologi Pedesaan	7
B. Sejarah Sosiologi Perkotaan	10
BAB II PERKEMBANGAN MASYARAKAT DESA DAN KOTA	14
1. Perkembangan Masyarakat	14
A. Masyarakat Sederhana, Madya dan Pra Modern/Modern	14
B. Masyarakat Primitif, Masyarakat Sederhana, dan Masyarakat Maju	16
C. Masyarakat Solidaritas Mekanik dan Solidaritas Organik	18
D. Masyarakat Kuno, Feodal, Borjuis, dan Komunis	18
E. Masyarakat Desa dan Masyarakat Kota	20
2. Perkembangan Masyarakat Desa Berdasarkan Tipologinya	21
3. Perkembangan Kota dari Klasik hingga Modern	23
4. Perkembangan Kota di Indonesia	25
BAB III KLASIFIKASI DESA DAN KOTA	27
1. Pemahaman Tentang Klasifikasi Desa dan Kota	27
2. Klasifikasi Desa Berdasarkan Karakteristiknya	28
3. Klasifikasi Kota Berdasarkan Karakteristiknya	30
BAB IV POLA EKOLOGI PEDESAAN DAN PERKOTAAN	36
1. Ekologi Manusia dan Sosial	36
2. Pola Pemukiman Pedesaan	37
3. Pemanfaatan Lahan Pedesaan Untuk Kegiatan Ekonomi	39
4. Pola Ekologi Perkotaan	40
5. Struktur Ekonomi Masyarakat Perkotaan	43
BAB V STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA DAN KOTA	45
1. Pengertian Pemerintahan Desa dan Kota	45
2. Pemerintahan Daerah	47
3. Otonomi Desa dan Otonomi Daerah	49
A. Otonomi Desa	49
B. Otonomi Daerah	51
a) Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia	51
b) Pengertian Otonomi Daerah	52
c) Tujuan Otonomi Daerah	53

4. Good Governance dalam Suatu Negara	56
BAB VI HUBUNGAN MASYARAKAT PEDESAAN DAN PERKOTAAN	58
1. Perbedaan Desa dan Kota	59
2. Persamaan Desa dan Kota: Sektor Formal dan Informal	60
3. Persamaan Desa dan Kota: Pusat dan Pinggiran	63
BAB VII KAJIAN TEORI SOSIOLOGI DALAM ASPEK STRUKTUR SOSIAL PEDESAAN DAN PERKOTAAN	65
1. Proses Interaksi Sosial	66
A. Pengertian Interaksi Sosial	66
B. Faktor-Faktor Penyebab Interaksi Sosial	67
C. Syarat Terjadinya Interaksi Sosial	67
D. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial	68
2. Stratifikasi Sosial	69
A. Pengertian Stratifikasi Sosial	69
B. Karakteristik dan Bentuk Stratifikasi Sosial	70
C. Fungsi Stratifikasi Sosial	72
3. Keluarga dan Sistem Keekerabatan	72
A. Pengertian Sistem Keekerabatan	72
4. Perubahan Sosial	74
A. Pengertian Perubahan Sosial	74
B. Teori Perubahan Sosial	75
5. Institusi Sosial	78
A. Pengertian Institusi Sosial	78
B. Fungsi Lembaga Kemasyarakatan	78
C. Ciri-ciri Institusi Sosial	79
D. Klasifikasi Tipe Lembaga Kemasyarakatan	80
BAB VIII PROBLEMATIKA MASYARAKAT PEDESAAN DAN PERKOTAAN	82
1. Kemiskinan	82
2. Pengangguran	84
3. Kriminalitas	85
4. Urbanisasi	87
5. Kenakalan Remaja	88
6. Industrialisasi	91
7. Transportasi	92
BAB IX BIAS PEMBANGUNAN MASYARAKAT PEDESAAN DAN PERKOTAAN	95
1. Interaksi Desa dan Kota	95
2. Fenomena Bias Pedesaan dan Perkotaan	98
3. Bentuk Bias Pedesaan dan Perkotaan	100
4. Dampak Bias Pedesaan dan Perkotaan	104
DAFTAR PUSTAKA	106

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Karakteristik Desa dan Kota menurut S. Roucek dan L. Warren	32
Tabel 3.2 Perbandingan Karakteristik Desa dan Kota menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hun	32
Tabel 3.3 Perbandingan Karakteristik Desa dan Kota menurut Sorokin dan Zimmerman	33
Tabel 7.1 Bentuk Perubahan Sosial Masyarakat Desa (Agraris) menjadi Masyarakat Kota (Industri)	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1 Korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat	59
Gambar 6.2 Hubungan variabel bebas (ciri rural) dengan variabel terikat (ciri urban)	60
Gambar 6.3 Pola Sosio-Ekonomi Kota Unggul	62
Gambar 6.1 Korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat	60
Gambar 7.1 Stratifikasi sosial tertutup	71
Gambar 7.2 Stratifikasi sosial terbuka	71
Gambar 7.3 Stratifikasi sosial campuran	72

BAB I

KONSEP DASAR SOSIOLOGI PEDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Materi pada BAB I membahas tentang konsep dasar dalam kajian sosiologi pedesaan dan perkotaan. Di dalam sub Bab terdiri dari: (1) pengenalan konsep dan ruang lingkup masyarakat desa dan kota; (2) definisi sosiologi pedesaan dan perkotaan; (3) sejarah dan perkembangan sosiologi pedesaan dan perkotaan.

2. Manfaat Perkuliahan

Materi yang termuat dalam Bab ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk memahami tentang konsep-konsep dasar dan fokus kajian dalam studi sosiologi pedesaan dan perkotaan termasuk tentang sejarah dan perkembangan terbentuknya desa dan kota.

3. Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar pada studi sosiologi pedesaan dan perkotaan.

B. Materi

1. Pengenalan Konsep dan Ruang Lingkup Masyarakat Desa dan Kota

Pada materi awal ini terlebih dahulu mahasiswa memahami konsep dasar teori sosiologi pedesaan dan perkotaan sehingga dapat memudahkan kita untuk memetakan disiplin keilmuan sesuai pada distingsinya masing-masing. Sosiologi memiliki berbagai konsep dalam membahas tentang masyarakat yang di dalamnya memiliki klasternya masing-masing. Karena sosiologi merupakan suatu disiplin keilmuan yang interdisipliner sehingga dapat dipetakan dalam berbagai permasalahan sosial maupun kebudayaan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam konteks desa dan kota. Dalam konsep sosiologi pedesaan dan perkotaan, ternyata memiliki ciri khas yang terletak pada arena sosialnya. Tujuannya agar dapat memfokuskan materi ini dalam melihat kondisi maupun situasi sosial dan kebudayaan masyarakat dalam memainkan perannya di arena sosial yang secara alamiah terbentuk dari masyarakat itu sendiri. Sehingga yang perlu untuk dipahami terlebih dahulu adalah objek yang dikaji. Misalnya mengetahui definisi dari manusia atau individu dalam kajian ilmu sosial dan kelompok sosial baik secara mikro maupun makro.

Manusia adalah makhluk yang unik sekaligus menarik untuk dibahas khususnya dalam mengkaji ilmu di bidang sosial. Ada beberapa istilah yang diberikan untuk manusia. Misalnya makhluk, individu dan sosial; makhluk berbudaya; makhluk berpikir; *zoon politicon* (makhluk sosial yang menyukai hidup bergolongan), *social animal* atau *gregariousness* (manusia mempunyai naluri hidup untuk berkawan); *man is a social and political being* (makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat). Istilah yang berkembang saat ini yaitu manusia seutuhnya, sebagai sosok manusia yang mencakup istilah-istilah di atas, yaitu manusia sebagai pribadi yang terbentuk dari berbagai ciri, karakter hakiki, maupun sifat kodrati

manusia yang seimbang dari berbagai aspek, misalnya aspek individu, sosial, jasmani dan rohani, maupun dunia dan akhirat. Keselarasan pada model ini menggambarkan keselarasan relasi antara manusia dan dirinya, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam sekitar (lingkungan), dan manusia dengan penciptanya.

Gambaran istilah di atas menunjukkan bahwa manusia dilahirkan dan hidup tidak terpisahkan satu sama lain, melainkan berkelompok (bermasyarakat). Hidup berkelompok ini merupakan kodrat manusia dalam memenuhi kebutuhannya, serta untuk mempertahankan hidupnya, baik terhadap bahaya dari dalam maupun yang datang dari luar. Ini menunjukkan bahwa dalam diri manusia terdapat dua keinginan yang selalu melekat pada dirinya, yaitu keinginan untuk menyatu dengan alam lingkungannya dan keinginan untuk menyatu dengan manusia lain dalam rangka memudahkan proses hidupnya. Untuk mewujudkan keinginan tersebut dibangunnya interaksi sosial, di antara mereka.

Menurut Soekanto (2004, p. 61), istilah interaksi sosial dapat dijelaskan secara teoritis oleh seorang sosiolog asal Indonesia. Interaksi sosial adalah menjadi faktor utama sekaligus menjadi syarat utama terbentuknya kehidupan sosial. Tidak akan ada koeksistensi manusia tanpa adanya interaksi sosial. Interaksi adalah suatu hubungan sosial atau proses hubungan sosial ketika orang-orang melakukan kontak satu sama lain. Penyesuaian (koordinasi) sikap, tindakan dan pikiran hingga mewarnai akhir dan pengaruhnya satu sama lain. Produk dari interaksi sosial tersebut menimbulkan suatu sistem kehidupan, suatu sistem hubungan yang bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia sedemikian rupa sehingga ada ketertiban dan keamanan untuk kelangsungan hidup. Produk berupa nilai dan norma (aturan) yang disepakati bersama dan aturan hidup lainnya. Disamping itu, sosial atau masyarakat adalah kumpulan orang-orang sebagai pengisi yang saling berhubungan (interaktif), dan kebudayaan adalah suatu sistem norma dan nilai yang diorganisasikan dan menjadi pedoman masyarakat (Horton, Paul B., 1984, p. 59). Dengan kata lain, dalam aktifitas manusia setiap harinya tidak akan lepas dari unsur-unsur kebudayaan. Karena manusia merupakan suatu makhluk pencipta dan pelaku budaya itu sendiri di ranah sosialnya.

Dalam kajian sosiologi pedesaan dan perkotaan pada Bab ini maka dapat kita ketahui bahwa kajian sosiologi merupakan bagian dari studi empiris tentang struktur sosial (masyarakat). Struktur sosial tidak hanya terdiri dari individu dan kelompok saja. Struktur sosial meliputi kelompok, pola sosial, organisasi, kelas sosial, masyarakat secara keseluruhan, dan tentu saja kawasan pedesaan dan perkotaan. Disting dari materi ini yaitu sosiologi merupakan studi atau analisis aspek kehidupan manusia di ranah pedesaan dan perkotaan.

Karakteristik desa dan kota dalam melihat masyarakatnya dapat diidentifikasi dengan tipe yang berbeda, yaitu:

- (a) Esensinya bersifat homogen untuk masyarakat pedesaan dan heterogen untuk masyarakat perkotaan yang dilihat dalam konteks mata pencaharian, nilai-nilai budaya, sikap dan perilaku.
- (b) Kehidupan desa cenderung menekankan pada pelibatan keluarga dalam kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Sedangkan kehidupan kota cenderung melibatkan keluarga, lingkungan, pendidikan, dan jaringan sosial.

- (c) Faktor geografis memiliki dampak besar pada kehidupan sosial. Misalnya, koneksi ke negara, desa maupun kota sebagai tempat anda dilahirkan, keberadaan anggota komunitas, dan sebagainya.
- (d) Desa memiliki hubungan keluarga dalam masyarakat lebih akrab dan jumlah anak dalam keluarga inti lebih banyak sedangkan kota memiliki hubungan yang abstrak dan introvert serta memiliki jumlah anak yang sedikit yang dikarenakan oleh faktor kebutuhan ekonomi di perkotaan yang cukup besar.

Namun, perlu diketahui bahwa hal yang paling menonjol dalam melihat masyarakat perkotaan juga dapat dilihat dari karakteristik kota dan masyarakatnya yang dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- (a) Kota memiliki ciri-ciri khusus.
- (b) Kehidupan masyarakat bukanlah pertanian.
- (c) Pekerjaan warganya khusus
- (d) Kepadatan penduduk
- (e) Jumlah Populasi
- (f) Mobilitas warga (relatif) berubah-ubah
- (g) Tempat tinggal permanen
- (h) Ciri-ciri sosial yang bersifat heterogen, kompleks, impersonal, dan eksternal.

Sosiologi pedesaan dan perkotaan adalah bagian dari kajian sosiologi yang berfokus pada aktivitas kehidupan individu maupun masyarakat yang tinggal di lingkungan pedesaan dan perkotaan. Berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat dapat berkaitan dengan lingkungan pedesaan (rural) dan perkotaan (urban). Orang yang tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal, sehingga untuk memahaminya perlu mengkaji masyarakat pedesaan dan perkotaan. Sosiologi pedesaan dan perkotaan juga mencakup berbagai isu yang berkaitan dengan struktur sosial masyarakat pedesaan dan perkotaan, pembangunan pedesaan dan perkotaan, pola ekologi masyarakat pedesaan dan perkotaan, sistem pemerintahan pedesaan dan perkotaan, dan isu-isu sosial di pedesaan dan perkotaan baik dalam skala lokal hingga global.

2. Defenisi Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan

A. Pengertian Sosiologi Pedesaan

Sosiologi Pedesaan dapat dipahami sebagai penerapan teori sosiologi dalam mempelajari masyarakat. Menurut Smith dan Zophf (dalam Jamaludin, 2015a) yang mengemukakan bahwa sosiologi pedesaan adalah sosiologi dari kehidupan pedesaan (*sociologi of rural life*). Studi ini adalah suatu pengetahuan yang sistematis sebagai hasil, penerapan metode ilmiah dalam upaya mempelajari masyarakat pedesaan, struktur dan organisasi sosialnya, sistem dasar masyarakat, dan proses perubahan sosial yang terjadi. Sosiologi pedesaan juga merupakan suatu ilmu yang mencoba mengkaji hubungan anggota masyarakat secara internal maupun kelompok sosialnya di lingkungan pedesaan. Menurut Rogers (dalam Jamaludin, 2015a), mengatakan bahwa sosiologi pedesaan merupakan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku spasial (fenomena) masyarakat dalam mengatur pedesaan yang saling berkorelasi dengan kelompoknya. Sosiologi pedesaan juga lebih sering dipakai dalam pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat pedesaan.

Galeski (1972) mengatakan bahwa sosiologi pedesaan disebut sebagai studi yang cenderung deskriptif, karena pedesaan merupakan daerah pertanian, terdapat pola-pola pertanian dan bertani, kehidupan keluarga di desa, tingkat kehidupan dan perkembangan penduduknya, struktur sosial yang berhubungan dengan pekerjaan, lembaga-lembaga pedesaan, adat dan kebiasaan penduduk dan sebagainya. Bahkan dewasa ini sosiologi pedesaan ada yang menganggap sama dengan sosiologi pertanian (*sociology of agriculture*). Namun keduanya memiliki perbedaan, yaitu sosiologi pertanian cenderung memfokuskan upaya sosiologi bagi masyarakat desa yang menggeluti pertanian saja. Sedang sosiologi pedesaan menekankan studinya pada masyarakat pedesaan tanpa mempersoalkan hubungan mereka dengan usaha tani. Karena banyaknya masyarakat desa yang tidak lagi secara langsung terlibat pada sektor primer, tetapi sudah berkembang ke sektor sekunder (Susilawati, 2012, pp. 2-3).

Pembahasan mengenai konsep desa dapat dilihat secara etimologinya tentang kata “desa” yang berasal dari bahasa sansekerta yaitu “*deshi*” yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Oleh sebab itu, kata “desa” sering dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka. Ciri utama yang melekat pada desa tersebut adalah fungsinya sebagai tempat tinggal, tanah asal dari suatu kelompok sosial yang cenderung kecil. Desa juga ditandai oleh hubungan yang erat dengan warganya terhadap suatu wilayah tertentu. Hubungan yang selain untuk tempat tinggal, ternyata juga tempat untuk menggantungkan hidup mereka. Dalam perspektif geografis, desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah dan berada di wilayah kabupaten (Jamaludin, 2015a, p. 4). Untuk mengetahui defenisi desa secara rinci dapat dijelaskan menurut beberapa para ahli yaitu sebagai berikut:

1. Soetardjo Kartohadikoesoema mendefenisikan desa sebagai suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Ada empat unsur desa yaitu wilayah atau daerah, penduduk, tata kehidupan dan otonomi. Unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, sehingga apabila hilangnya salah satu unsur tersebut, maka akan menjadikan desa mengalami disfungsi dalam arti akan kehilangan makna sebagai suatu sistem di wilayahnya.
2. Paul Landis mendefenisikan desa sebagai cara membuat tiga bagian berdasarkan pada tujuan analisa. Bagian pertama yaitu tujuan analisa statistik maka desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang jumlah penduduknya kurang dari 2500 orang, kedua yaitu untuk tujuan analisa sosial psikologi. Desa diartikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang guyub (*gemeinschaft*) dan serba informal diantara sesama warganya. Ketiga, untuk tujuan analisa ekonomi. Desa diartikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung pada pertanian.
3. Bintarto mengemukakan desa dalam konteks geografis yaitu suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu dapat dilihat pada unsur-unsur fisiografi, sosial dan ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Ketika kita membahas tentang desa, maka desa dapat disimpulkan sebagai suatu wilayah yang berada di luar kota yang memiliki keanekaragaman aktivitas sosial dan

kebudayaannya dalam menekankan nilai dan norma masyarakatnya sendiri. Gejala-gejala yang memperlihatkan diri sebagai ciri desa adalah hubungan yang lebih erat dan mendalam antar mereka dibanding dengan warga desa lain. Selain itu, desa juga memiliki potensi yang multi dimensi yang dilihat berdasarkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi lainnya dalam bentuk kearifan lokalnya. Jika dilihat dalam kajian histori, semua masyarakat lokal di Indonesia mempunyai kearifan lokal yang cukup kuat, keseimbangan dan keberlanjutan, terutama dalam mengelola sumberdaya alam dan penduduk. Diantara kearifan lokal tersebut ada beberapa aturan hukum adat yang mengatur berbagai permasalahan-permasalahan, misalnya sistem pemerintahan, pengelolaan sumber daya, relasi sosial, dan lain-lain. Sehingga pada prinsipnya, norma yang berlaku pada masyarakat lokal bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan dalam menjaga relasi antar manusia, relasi antara manusia dengan alam dan tuhan.

Berdasarkan dari berbagai potensi yang dimiliki desa maka dalam pembahasan tentang konsep desa dapat dijelaskan melalui dua pengertian. Pertama pengertian secara teoritis dan yang kedua pengertian secara legalistik. Pengertian desa secara teoritis dapat dilihat dari penjelasan atau pendapat sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli. Pengertian desa dalam konteks legalistic dapat dilihat dari penjelasan desa tentang kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan tentang desa. Jika dilihat dari pengertian desa secara teoritis, maka tidak satu pun ditemukan adanya definisi desa yang sama dari para ahli. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang mereka dalam mendefinisikan desa. Pengertian desa secara legalistik banyak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melatarbelakangi lahir dan berlakunya peraturan perundang-undangan tentang desa. Oleh sebab itu, berdasarkan beberapa penjelasan secara teoritis, maka dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri yang dimana penduduknya bertempat tinggal dalam suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, memiliki hubungan saling kenal mengenal atas hubungan kekerabatan serta kehidupannya lebih banyak dipengaruhi alam, dan memiliki hubungan timbal balik dengan wilayah lainnya.

B. Pengertian Sosiologi Perkotaan

Sosiologi perkotaan adalah studi sosiologi tentang kehidupan sosial dan interaksi manusia di ranah kota. Studi ini merupakan bagaian dari disiplin sosiologi yang mempelajari tentang struktur sosial, proses sosial, perubahan sosial dan masalah sosial di wilayah urban serta menciptakan sebuah solusi sebagai bagian dari masukan menjawab permasalahan perencanaan dan pembuatan kebijakan di perkotaan dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial. Sosiologi perkotaan juga menggunakan analisis statistik, pengamatan, teori sosial, wawancara, dan metode lain untuk mempelajari berbagai topik termasuk migrasi dan tren demografi, ekonomi, kemiskinan, penyakit sosial, relasi antar ras dan etnis, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa pandangan para ahli tentang konsep kota:

1. Max Weber berpendapat bahwa suatu tempat adalah "kota" apabila penghuni setempatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Barang-barang itu harus dihasilkan oleh penduduk dari pedalaman dan dijualbelikan di pasar itu. Jadi menurut Max Weber, ciri "kota" adalah adanya pasar, dan sebagai benteng, serta mempunyai sistem hukum dan lain-lain tersendiri, dan bersifat kosmopolitan.

2. Karl Marx dan F.Engels memandang "kota" sebagai "persekutuan yang dibentuk guna melindungi hak milik dan guna memperbanyak alat-alat produksi dan alat – alat yang diperlukan agar anggota masing-masing dapat mempertahankan diri". Perbedaan antara "kota" dan pedesaan menurut mereka adalah pemisahan yang besar antara kegiatan rohani dan materi.
3. Cristaller dengan "central place theory"-nya menyatakan "kota" berfungsi menyelenggarakan penyediaan jasa-jasa bagi daerah lingkungannya. Jadi menurut teori ini, kota diartikan sebagai pusat pelayanan. Sebagai pusat tergantung kepada seberapa jauh daerah-daerah sekitar "kota" memanfaatkan penyediaan jasa-jasa "kota" itu. Dari pandangan ini kemudian "kota"- "kota" tersusun dalam suatu hirarki berbagai jenis.
4. Sjoberg berpendapat bahwa, sebagai titik awal gejala "kota" adalah timbulnya golongan literati (golongan intelegensia kuno seperti pujangga, sastrawan dan ahli-ahli keagamaan), atau berbagai kelompok spesialis yang berpendidikan dan nonagraris, sehingga muncul pembagian kerja tertentu. Pembagian kerja ini merupakan ciri "kota".
5. Wirth, mendefinisikan "kota" sebagai "pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya. Akibatnya hubungan sosialnya menjadi longgar acuh dan tidak pribadi (impersonal relation)
6. Harris dan Ullman berpendapat bahwa "kota" merupakan pusat pemukiman dan pemanfaatan bumi oleh manusia. "Kota" sekaligus merupakan paradoks. Pertumbuhannya yang cepat dan luasnya kota-kota menunjukkan keunggulan dalam mengeksploitasi bumi, tetapi dipihak lain juga berakibat munculnya lingkungan yang miskin bagi manusia. Yang perlu diperhatikan, menurut Harris dan Ullman adalah bagaimana membangun "kota" di masa depan agar keuntungan dari konsentrasi pemukiman tidak mendatangkan kerugian atau paling tidak kerugian dapat diperkecil.

Kota mempunyai 3 kata yang menunjukkan defenisi kota itu sendiri dalam Bahasa Inggris, yaitu *town*, *city*, dan *urban*. *Town* dan *city* menunjukkan batasan teritorial yang bercirikan kota, sedangkan *urban* adalah kualitas kehidupan yang bercirikan kota. *Town* dan *city* dibedakan atas dasar besarnya, dalam hal ini *city* (kota besar) lebih besar dari *town* (kota kecil). Sedangkan *urban* menunjuk pada ciri dan cara hidup yang khas memiliki suasana kehidupan dan penghidupan modern dapat disebut daerah perkotaan. Oleh karena itulah, dalam literatur bahasa Inggris, Sosiologi Perkotaan diberi nama *Urban Sociology* dan bukan *City Sociology*. Bahkan dalam beberapa literatur disebutkan bahwa tidak semua *city* maupun *town* mempunyai kehidupan *urban* atau tidak semua wilayah *city* bersifat *urban*. Umumnya, ciri-ciri *urban* terdapat di pusat-pusat *city* (D. T. Kartono, 2010, p. 3).

Di Swedia, Polandia, dan Rumania menyebut *urban* sebagai kota-kota dan kabupaten-kabupaten yang termasuk dalam wilayah administrasi *urban*. Di Hongaria, suatu permukiman dapat disebut *urban* apabila permukiman tersebut memenuhi persyaratan "urban" dan tidak memandang besar kecilnya daerah permukiman tersebut. Di Kanada semua kota, kabupaten, dan desa-desa yang digabungkan disebutkan "urban". Di Australia menyebutkan *urban* adalah ibukota dari provinsi atau ibukota karesidenan yaitu kota-kota yang memiliki ciri-ciri khusus lain juga disebut "urban". Batas wilayah perkotaan mempunyai luas dan bentuk yang berbedabeda tergantung pada tingkat budaya dan teknologi penduduk setempat (Bintarto, 1984). Selain itu juga kota Jakarta

yang dianggap sebagai kota metropolitan masih sering disebut juga sebagai “*the big village*” karena lalu lintas yang tidak teratur dan dibalik bangunan megah masih tampak permukiman kumuh yang menyerupai suatu perkampungan yang besar. Akan tetapi, suatu kota kecil yang lalu lintasnya teratur dengan beberapa pusat industrinya dapat disebut sebagai “*the small city*”. Penyebutan *the big village* dan *the small city* tampak menurut pada masalah lingkungan (sosial, alam, dan fisik) suatu kota sehingga semakin sulitlah memberikan definisi kota secara tepat (Hariyono, 2007, p. 15).

Secara sederhana, kota dapat dilihat sebagai batas fisik atau territorial atau dapat disebut sebagai “*city*”, dan sebagai kualitas kehidupan di dalamnya (disebut urban). Berdasarkan perbedaan di atas maka jelas bahwa sosiologi perkotaan lebih mengarah pada sosiologi tentang urban ketimbang tentang city. Oleh karena itu, maka sosiologi perkotaan biasa memakai istilah bahasa Inggris *urban sociology* ketimbang *city sociology*. Menurut Bardo (dalam D. T. Kartono, 2010, p. 4), ada 3 ciri kehidupan kota (urbanisme) yang menjadi pusat perhatian sosiologi perkotaan dalam melihat kota, yaitu 1) struktur kota; 2) gaya hidup perkotaan (urban); dan 3) organisasi sosial. Ketiga inti kajian sosiologi tersebut kemudian ditambah dengan penelusuran terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi (seperti perencanaan kota) dan akibat dari perkembangan pola tertentu (seperti kerusakan kota, abnormalitas kehidupan, dan sebagainya).

3. Sejarah Perkembangan Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan

A. Sejarah Sosiologi Pedesaan

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa penjajahan kolonial Inggris, pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintah, ia menyebutkan adanya desa-desa di daerah pesisir utara Pulau Jawa. Kemudian ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa. Terbentuknya suatu desa tidak terlepas dari pikiran bathiniah manusia yang secara naluri ingin hidup bersama dengan keluarga baik suami atau istri dan anak-anak mereka, serta sanak family yang lebih cenderung memilih tempat kediaman bersama. Tempat kediaman dapat berupa wilayah nomaden, terutama pada kawasan tertentu seperti hutan atau areal lahan yang masih memungkinkan keluarga tersebut berpindah-pindah. Hal tersebut juga masih dapat ditemukan pada beberapa suku asli di Sumatra seperti masyarakat kubu, suku anak dalam, beberapa warga Melayu asli, serta terpata juga di beberapa pulau lainnya seperti di Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Papua (Jamaludin, 2015a, p. 9).

Untuk melihat terbentuknya masyarakat desa, terdapat tiga alasan pokok bagi manusia sebagai makhluk sosial membentuk sebuah masyarakat di arena sosial pedesaan. Pertama, hidup yaitu mencari sandang, pangan, dan juga papan. Kedua, untuk mempertahankan hidupnya terhadap berbagai ancaman dari luar. Ketiga sebagai wadah untuk mencapai tujuan untuk kemajuan dalam hidupnya. Awal mula desa pertama kali dibentuk adalah desa pertanian, setelah membuka hutan dan mengolah lahan untuk ditanami tumbuhan yang menghasilkan makanan dan bahan kebutuhan lainnya. Selanjutnya, di tepi laut dan sungai-sungai besar terbentuk desa-desa perikanan dan pelayaran (masyarakat pesisir) yang mendapat pencahariannya dalam menangkap ikan, membuat tambak, dan jasa pelayaran ke jalur laut maupun sungai.

Selain itu, desa terbentuk dari sebuah pasar transaksi yang tumbuh di sekitar tempat orang-orang bertemu satu sama lain untuk bertransaksi (di era modern disebut jual beli) di arena tersebut, sehingga terjadilah sebuah pasar yang terbentuk oleh masyarakat sekelilingnya. Di sekitar pasar tersebut berkembanglah desa perdagangan. Desa tradisional juga sering terbentuk berkaitan dengan keberadaan sumber air atau sumber pencarian lainnya, seperti pertambangan, pertambakan, dan sebagainya. Alasan terbentuknya desa pada umumnya tercantum dalam nama desa, dari nama desa dapat diketahui alasan terbentuknya suatu masyarakat desa tertentu. Semua desa merupakan fenomena yang bersifat universal karena memiliki sejumlah ciri-ciri yang sama. Akan tetapi, juga memiliki ciri-ciri khusus yang bersifat lokal, regional ataupun nasional. Khususnya desa di Indonesia yang selain memiliki ciri yang berbeda dengan desa-desa di negara lain, juga memiliki ciri khasnya sendiri di setiap desa. Hal tersebut dapat diterima karena Indonesia merupakan negara multikultural, sehingga sangat sulit untuk mengeneralisasikan karakteristik desa di Indonesia.

Perlu diketahui bahwa sebagian desa di Indonesia sudah ada sebelum negara Republik Indonesia terbentuk, dan kemandiriannya sebagai desa juga telah diakui oleh pemerintah. Pengakuan pemerintah ini dapat dilihat pada Inpres Nomor 5 tahun 1976, yang menyebutkan bahwa desa adalah desa dan masyarakat hukum yang setingkat dengan nama asli lainnya dalam pengertian teritorial-administratif langsung dibawah kecamatan. Pengertian seperti ini juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979. Keberagaman desa di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai aspek, baik fisik maupun nonfisik. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum (yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri) sudah ada sejak lama di Indonesia, bahkan sampai saat ini (Jamaludin, 2015a, pp. 10–11).

Berdirinya suatu desa didasarkan oleh hukum yang mengatur tentang desa tersebut (Jamaludin, 2015a, pp. 13–15). Untuk melihat beberapa dasar hukum berdirinya desa tersebut dapat dilihat pada beberapa hal berikut ini:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 menyebutkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa “menyebutkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan perubahan serta pembentukan status desa, desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memerhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi syarat:

1. Jumlah penduduk
2. Luas wilayah
3. Bagian wilayah kerja
4. Perangkat desa dan
5. Sarana dan prasarana pemerintahan

Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit lima tahun penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung. Perubahan status desa menjadi kelurahan harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Luas wilayah
2. Jumlah penduduk
3. Prasarana dan sarana pemerintahan
4. Potensi ekonomi dan
5. Kondisi sosial budaya masyarakat

Desa yang berubah menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil. Adapun tujuan pembentukan desa adalah meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa, yaitu sebagai berikut:

1. Penduduk, minimal 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga
2. Luas wilayah yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat
3. Letaknya memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun
4. Tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa
5. Adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat
6. Tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat

Dari penjelasan mengenai sejarah desa yang ada di Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa desa di Indonesia sangatlah unik dan berbeda dengan negara lainnya. Desa di Indonesia terlahir dari karakteristik masyarakat lokal yang memiliki latar belakang secara tradisional sudah melekat pada diri mereka sejak lama bahkan sebelum lahirnya negara ini. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa desa dapat tumbuh dan berkembang sampai saat ini dilihat dari melekatnya nilai dan norma sosial budaya masyarakat yang sebagian masih menjalankan sistem sosial berbasis kearifan lokal dan

kebudayaan nenek moyang yang tidak bisa dipisahkan. Desa menjadi ujung tombak perubahan khususnya sebagai basis tumbuh dan kembangnya suatu peradaban di kalangan masyarakat lokal apakah perubahan tersebut dapat diterima atau tidak, tergantung pada karakteristik masyarakat yang ada di desa tersebut, sehingga perlu adanya pendekatan-pendekatan secara historis, sosial dan budaya yang dapat diterapkan demi meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia yang maju tanpa menghilangkan atau mengaburkan nilai dan norma sosial maupun kebudayaan asli dari desa itu sendiri.

B. Sejarah Sosiologi Perkotaan

Semua kota di dunia pasti memiliki sejarah pertumbuhan dan perkembangan menjadikannya sebagai sebuah kota besar. Proses pembentukan kota tidak terlepas dari semua aktivitas manusia di dalamnya. Banyak kota di dunia terbentuk dimulai dari desa. Desa adalah suatu tempat yang penduduknya terikat oleh kehidupannya dan bergantung pada lingkungan sekitar. Karena medan dan lokasi desa telah berkembang menjadi kota dari waktu ke waktu (perluasan kota). Sejarah terbentuknya sebuah kota yang berada di suatu negara biasanya cukup bervariasi, tetapi memiliki inti yang sama. Terbentuknya kota juga bisa dikatakan sebagai awal sebuah tempat pertemuan antara penduduk desa dengan penduduk di sekitar desa. Biasanya pertemuan tersebut bertujuan untuk melakukan transaksi keperluan hidup, tempat pengumpulan barang, atau sebagai tempat untuk tukar menukar barang. Seiring berjalannya waktu, penduduk yang bermukim di sekitar tempat tersebut berkembang menjadi semakin besar yang dikarenakan penduduk dari daerah sekitar serta daerah lainnya bertemu sehingga terbentuk sebuah kota.

Gideon Sjoberg (dalam Meno, S., Alwi, Mustamin, 1992, p. 18) menjelaskan bahwa terdapat tiga tingkatan pergerakan masyarakat manusia atau individu menjadi masyarakat kota, yaitu:

1. *Preurban feudal society*, yaitu masyarakat feodal sebelum adanya atau menjadi kota-kota
2. *Preindustrial feudal society*, yaitu masyarakat feodal sebelum adanya industri
3. *Moderen industrial feurial society*, yaitu masyarakat feodal dengan industri maju

Lain lagi halnya menurut JH. De Goode (dalam Meno, S., Alwi, Mustamin, 1992, p. 18) yang menjelaskan sebuah masyarakat berkembang menjadi kota memiliki beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk keseluruhan;
2. Penguasaan atas alam lingkungan
3. Kemajuan teknologi
4. Kemajuan dalam organisasi sosial

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa kota bisa tumbuh dan berkembang apabila jumlah penduduknya cukup besar untuk mendukung segala aktivitas kota itu sendiri. Selain itu juga, kato harus mampu menguasai sumber daya alam di sekelilingnya sehingga mampu memanfaatkannya untuk kesejahteraan dan kemakmuran penduduk di dalamnya. Salah satu faktor penunjangnya adalah teknologi dan ilmu pengetahuan, terciptanya inovasi baru dan invensi dalam rangka kemajuan suatu kota ke arah yang lebih baik dan maju. Jika diilihat dari aspek pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan, perkembangan kota memiliki tiga tahap perkembangan, yaitu:

1. *Fase teknik*, yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya tenaga air dan angin oleh manusia (kincir-kincir yang digerakkan oleh tenaga air dan angin);
2. *Fase palaeo teknik*, yaitu tahap pengembangan uap sebagai sumber tenaga, dengan batu bara sebagai bahan bakarnya; dan
3. *Fase neoteknik*, dimana sumber tenaganya adalah listrik dan bahan bakarnya adalah bensin. Saat ini dikembangkan tenaga matatrari dan nuklir.

Berdasarkan fase perkembangan kota di atas maka sangat jelas bahwa kemajuan kota dapat dilihat dari penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga dapat menguasai sumber daya alam yang bermanfaat bagi manusia. Hampir setiap kota selalu mencirikan tingginya tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi. Kawasan kota sudah bukan lagi bermata pencaharian yang berkaitan langsung dengan alam, melainkan bermata pencaharian di sektor pemerintahan, industri, dan juga jasa. Selain itu, kota di Indonesia ternyata memiliki sejarah dan perkembangannya tersendiri. Menurut Koentjaraningrat (dalam Meno, S., Alwi, Mustamin, 1992, p. 21) menjelaskan bahwa kota-kota di Indonesia bermula dari adanya kota-kota istana, kota pusat keagamaan, kota pelabuhan dan kota administrasi. Untuk melihat penjelasannya dapat dilihat pada poin-poin di bawah ini:

1. *Kota istana*. Dicitrakan oleh susunan spatialnya yang mencerminkan konsepsi rakyat tentang alam semesta. Raja dan istananya dipandang sebagai pusat alam semesta dan penjaga keseimbangan. Contoh kota-kota istana ini adalah Gianyar dan Klungkung di Bali, Yogya dan Solo di Jawa Tengah).
2. *Kota pusat keagamaan*. Susunan spatialnya berkisar di makam raja-raja, sebuah bangunan suci berupa candi, stupa, dan lain-lain. Bangunan itu dikelilingi oleh perumahan para pandita, biksu, atau mereka yang bertugas memelihara bangunan-bangunan suci dan pusat-pusat keagamaan. Contohnya kota Gede dekat Yogyakarta.
3. *Kota pelabuhan*. Susunan spatialnya terdiri atas bagian-bagian tempat tinggal para penguasa pelabuhan, yang dekat dengan pelabuhan, dan beberapa perkampungan tempat bermukimnya para pedagang asing, yang terpisah-pisah, dan disebut kampung menurut nama negeri asal mereka. Seperti kampung Arab, kampung Cina kampung Parsi, kampung Keling, kampung Melayu, kampung Maluku, dan lainnya. Contoh kota pelabuhan adalah Banten, Demak, Gresik, dan Ujung Pandang (Makassar).
4. *Kota administrasi*. Masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, khususnya ketika Belanda mulai menjajah negeri ini, maka muncullah kota-kota bentuk baru, yaitu berupa kota-kota administrasi. Kota-kota ini mengambil lokasi di kota-kota sebagaimana penjelasan di atas. Susunan spatial kota administrasi ini berkisar disekeliling sebuah lapangan atau alun-alun. Pada lingkaran depan atau pertama sekeliling alun-alun itu terdapat rumah kediaman kepala pemerintahan daerah itu (gubernur, residen, kontrolir, bupati, dan sebagainya). Juga terdapat gedung-gedung penting seperti gedung pemerintahan, gedung gereja, mesjid, bank, dan penjara. Pada lingkaran berikutnya terdapat rumah-rumah para pamong praja atau pejabat-pejabat eselon dalam pemerintahan.

Lewis Mumford (dalam Daldjoeni, 1997, pp. 141–142) menjelaskan ada enam tahap perkembangan sejarah kota, yaitu sebagai berikut.

1. *Eopolis*. Kota ini menempati suatu pusat dari daerah pertanian dengan adat-istiadat yang bercorak kedesaan dan serba sederhana.
2. *Polis*. Sebutan ini berasal dari zaman Yunani dan Romawi. Kota merupakan pusat hidup keagamaan dan pemerintahan. Bentuknya saja semacam benteng yang kuat; di dalamnya terdapat tempat khusus untuk peribadatan, pasar yang ramai yang bertalian erat dengan kegiatan macam industri kecil. Penduduknya terdiri atas beragam tukang dengan macam keahliannya. Ada pula berbagai lembaga pendidikan, tempat-tempat hiburan dan stadion besar untuk olahraga.
3. *Metropolis*. Dalam kota besar ini bertemulah orang dari berbagai bangsa untuk berdagang dan tukar-menukar harta budaya rohani. Juga terdapat percampuran perkawinan antarbangsa dan ras dengan akibat munculnya filsafat dan kepercayaan baru. Selain keagungan kota secara fisik kota menyajikan kontras yang menonjol antaragolongan kaum kaya dan kaum miskin. Contoh kota metropolis adalah Amsterdam, Paris, dan Tokyo.
4. *Megalopolis*. Sebenarnya ini suatu peningkatan dari tahap sebelumnya. Gejala sosiopatologis merajalela; pada satu pihak ada kekayaan dan kekuasaan dengan birokrasi yang amat menonjol, sedangkan pada pihak lain meluas kemiskinan dan berontaklah kaum proletar. Contoh-contoh megalopolis adalah Alexandria (abad ke-3), Roma (abad ke-2), Konstantinopel (abad ke-10), kemudian New York dalam abad sekarang.
5. *Tyranopolis*. Kota besar dilanda oleh kepincangan yang berupa degenerasi dan korupsi. Moral pada penduduknya merosot; ada relasi erat antarapolitik, ekonomi dan kriminalitas, dan di samping itu kaum proletar menjadi kekuatan yang tidak diremehkan.
6. *Necropolis*. Artinya peradaban kota runtuh, kota menjadi bangkai (nekros). Misalnya Babylon, Nineve dan Roma kuno, yang runtuh dan hilang lenyap dari permukaan bumi.

Munculnya kota-kota di Indonesia tidak terlepas dari proses dekolonisasi yang membawa perubahan sosial, ekonomi, budaya dan administrasi. Ada lima aspek yang mempengaruhi perkembangan kota-kota di Indonesia dalam proses dekolonisasi. Pertama-tama, kota adalah tempat dari banyak peristiwa penting. Kedua, perubahan kekuasaan pemerintahan kota yang mempengaruhi seluruh kota. Setelah pendudukan kolonial Belanda, proses perubahan administrasi terlihat, dan visi baru tentang pembentukan kota yang ideal lahir. Ketiga, akibat dekolonisasi, komposisi etnis penduduk perkotaan berubah. Komposisi sosial zaman kolonial Belanda terbagi menjadi tiga kelompok: Eropa, negara asing, bagian timur (China, Arab, India, dll) dan masyarakat adat (*indigenous people*), dan saat ini berkembang di kota-kota besar di Indonesia. Keempat, pertempuran di perbatasan wilayah kota dan desa menyebabkan banyaknya pengungsi yang masuk dan keluar. Kelima, dampak penjajahan Belanda dan Jepang diperparah dengan rusaknya infrastruktur administrasi, termasuk gedung dan “arsip data dan informasi”, terutama yang membutuhkan proses koordinasi untuk urusan administrasi. Kelima hal inilah yang menjadi akar dari asal muasal pembangunan perkotaan Indonesia.

Dalam hal ini, dapat dilihat apa yang ditulis oleh Kuntowijoyo yang menekankan pada lima bidang sejarah perkotaan: ekologi perkotaan, transformasi sosial ekonomi, sistem sosial, isu sosial, dan mobilitas sosial. Secara tepat, Kuntowijoyo menunjukkan aspek sosial dari transformasi perkotaan sebagai aspek sentral dari sejarah perkotaan.

Dengan adanya aspek sosial ini, lebih mudah dipahami bahwa kota bukanlah entitas alam (yang terjadi tanpa campur tangan manusia), melainkan entitas sosial (penuh dengan dinamika kelembagaan dan hubungan sosial) (D. T. Kartono, 2010, pp. 19–20).

Disamping telah dijelaskannya sejarah kota, maka perlu juga kita ketahui suatu kota juga dapat dikatakan sebagai kota yang dilihat berdasarkan kuantitas masyarakat kota itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa kota berdasarkan jumlah penduduknya ternyata tidak boleh kurang dari 2.500 orang di dalamnya. Northam (dalam D. T. Kartono, 2010, pp. 4–5) mengemukakan secara detail mengenai kriteria jumlah penduduk kota yang ideal yaitu sebagai berikut:

1. Kota kecil : 2.500 sampai dengan < (kurang dari) 25.000
2. Kota medium: 25.000 sampai dengan < (kurang dari) 100.000 penduduk.
3. Kota besar: 100.000 sampai dengan < (kurang dari) 800.000 penduduk.
4. Metropolis: 800.000 penduduk lebih.
5. Megapolis: sekurang-kurangnya beberapa juta.
6. Ecumenopolis: sekurang-kurangnya beberapa puluh juta.

Beberapa negara sebenarnya juga tidak memiliki standar baku tentang jumlah penduduk suatu wilayah yang disebut kota. Di Indonesia misalnya, kota-kota yang pada umumnya dibatasi bukan dikarenakan jumlah penduduknya, melainkan lebih cenderung pada batas administratif yang ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan dan sebagainya. Selain itu juga, ternyata kota juga dapat dikatakan sebagai tempat pertemuan yang berorientasi pada dunia luar. Sebelum menjadi tempat pemukiman yang tetap, awalnya kota adalah tempat orang pergi dan pulang untuk berjumpa secara teratur sehingga menimbulkan daya tarik para penghuni yang ada di luar kota untuk mengadakan kontrak, memberikan motivasi untuk kegiatan rohaniah dan perdagangan, serta kegiatan lain yang memiliki dinamika sosial yang berbeda dengan desa. Kota juga sebagai pusat pemerintahan yang pada umumnya banyak dijumpai pada zaman sebelum revolusi industri. Kebanyakan kota di Indonesia merupakan kota lama bekas kerajaan maupun jajahan dari kolonial Belanda yang mampu bertahan sebagai ibukota sampai pada zaman modern. Namun, di zaman modern saat ini, kota sudah menjadi pusat industri, produksi, dan jasa, sehingga pada dasarnya kota itu terbentuk seiring berkembangnya usia dan zaman.

BAB II

PERKEMBANGAN MASYARAKAT DESA DAN KOTA

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Materi pada bab II ini menguraikan tentang perkembangan masyarakat desa dan kota yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: (1) perkembangan masyarakat; (2) perkembangan masyarakat desa berdasarkan tipologinya; (3) perkembangan kota dari klasik hingga modern; (4) perkembangan kota di Indonesia.

2. Manfaat Perkuliahan

Diharapkan setelah membaca bab ini mahasiswa dapat memahami tentang perkembangan masyarakat desa dan kota di Indonesia.

3. Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang perkembangan masyarakat desa dan kota di Indonesia.

B. Materi

1. Perkembangan Masyarakat

Perkembangan masyarakat cenderung dipengaruhi oleh dinamika masyarakat yang selalu berubah-ubah yang disebabkan oleh pengaruh dari luar sehingga memiliki bentuk dan ciri tersendiri dalam menunjukkan aktivitas sosialnya. Perkembangan pada masyarakat cenderung disebabkan karena pemikiran manusia yang dinamis dalam melihat situasi maupun kondisi dilingkungan sekitar mereka, sehingga perkembangan masyarakat baik di ranah desa maupun kota pada akhirnya membentuk suatu pengelompokan sosial. Soerjono Soekanto (1984, pp. 49–51) menjelaskan bahwa tahap perkembangan masyarakat Indonesia terdiri atas tiga tahap, yaitu masyarakat sederhana, madya dan pra modern/modern.

A. Masyarakat Sederhana, Madya dan Pra Modern/Modern

a) Masyarakat Sederhana/Bersahaja

Masyarakat sederhana adalah masyarakat yang mengalami perkembangan lambat dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Biasanya masyarakat sederhana merupakan bagian dari cikal bakal terbentuknya perkembangan masyarakat. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

1. Hubungan dalam keluarga maupun dalam masyarakat sangat erat.
2. Organisasi sosial didasarkan pada adat-istiadat berupa tradisi genetik.
3. Percaya adanya kekuatan supernatural yang mempengaruhi kehidupan mereka, tetapi mereka tidak dapat melawannya.
4. Tidak ada lembaga khusus yang mengatur bidang pendidikan di daerah, tetapi keterampilan yang mereka miliki diperoleh melalui pendidikan ekstrakurikuler dari dan daerah sendiri secara perlahan diturunkan dari generasi ke generasi melalui praktik langsung (sebagian besar teori). Pengetahuan mereka yang

didapatkan bukan hasil pemikiran secara empiris maupun hasil eksperimen, melainkan hasil pengalaman yang kebenaran secara umum diperoleh secara kebetulan.

5. Tingkat buta huruf tinggi karena tidak ada pendidikan sekolah yang masuk dalam kehidupan mereka.
6. Hukum yang berlaku di masyarakat dapat dipahami dan dimengerti oleh anggotanya yang sudah dewasa.
7. Kegiatan perekonomian masyarakat sebagian besar dalam bidang produksi yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau sedikit dipasarkan. Harga barang-barang kebutuhan yang dihasilkan masyarakat mempunyai nilai terbatas. Kegiatan perekonomian dan sosial memerlukan kerja sama yang dilakukan oleh orang banyak dan secara tradisional dengan sistem gotong royong. Hubungan kerja sama dengan sistem ini tanpa adanya hubungan buruh dengan majikan.

b) Masyarakat Madya

Masyarakat ini telah mengalami perkembangan dibandingkan dengan masyarakat sederhana, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Hubungan dengan keluarga tetap kuat, tetapi hubungan antar anggota masyarakat mulai mengendur dan mulai didasarkan pada kepentingan untuk memenuhi untung-rugi atas dasar kepentingan ekonomi.
2. Adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat masih dihormati, dan masyarakat mulai terbuka dengan adanya pengaruh dari luar.
3. Munculnya pemikiran-pemikiran rasional yang memancing kepercayaan terhadap kekuatan supernatural sudah mulai menurun, namun akan muncul kembali seiring dengan kehabisan ide untuk menghadapi permasalahan yang ada di sekitarnya.
4. Lembaga pendidikan mulai bermunculan dengan adanya pendidikan dasar dan menengah, tetapi tidak terlihat adanya pendidikan di luar sekolah.
5. Angka buta huruf menurun sejak mendaftar di lembaga pendidikan berbasis sekolah.
6. Hukum tertulis dan tidak tertulis hidup berdampingan secara harmonis.
7. Perekonomian yang berorientasi pasar sudah mulai mengintensifkan persaingan di bidang produksi. Nilai uang memegang peranan penting karena mempengaruhi berbagai struktur sosial masyarakat.
8. Gotong royong tetap berlaku, tetapi pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, antar keluarga besar atau tetangga terdekatnya, sudah berdasarkan upah. Disini nilai komersial sangat diperhitungkan.

c) Masyarakat Pramodern atau Modern

Komunitas ini telah berkembang atau berevolusi karena telah memperkuat hubungan dengan komunitas lain, menerima banyak informasi dari dunia luar melalui media elektronik, dan bahkan orang-orang yang terkena dampak sering bekerja di luar wilayah mereka. Dengan demikian, mereka mengalami perkembangan sejalan dengan perubahan dalam hidupnya. Masyarakat pra klasik (modern) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Hubungan antarmasyarakat didasarkan pada kepentingan pribadi dan kebutuhankebutuhan individu.
2. Hubungan antarmasyarakat dilakukan secara terbuka dalam suasana saling mempengaruhi, kecuali dalam menjaga rahasia hasil penemuan baru.

3. Masyarakat sangat percaya terhadap manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, karena sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.
4. Masyarakat terdiri dari berbagai profesi dan keterampilan yang dapat ditingkatkan atau dipelajari melalui pendidikan ekstrakurikuler dan pelatihan kejuruan.
5. Tingkat pendidikan sekolah relatif tinggi dan merata.
6. Hukum yang mengatur masyarakat adalah hukum tertulis yang sangat kompleks. Perekonomian hampir secara eksklusif berorientasi pasar dan didasarkan pada penggunaan uang dan metode pembayaran lainnya (kartu kredit, cek, giro, dll).

B. Masyarakat Primitif, Masyarakat Sederhana, dan Masyarakat Maju

Menurut Asmuni Syukir (1983, p. 78), dari perspektif peradaban, masyarakat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan: masyarakat primitif (suku terasing), masyarakat sederhana (masyarakat pedesaan), dan masyarakat maju (masyarakat perkotaan).

a) Masyarakat Primitif (Suku Terasing)

Masyarakat primitif adalah sekelompok manusia yang masih primitif dalam peradaban dan budayanya. Artinya, budaya mereka tidak tercampur atau dipengaruhi oleh dunia luar. Masyarakat primitif banyak dijumpai di daerah pedesaan (pegunungan dan desa) (Syukir, 1983, pp. 80–82). Masyarakat primitif sangat tertutup dengan dunia luar. Mereka hidup selaras dengan alam, tetapi tentu saja mereka tidak terpapar dengan dunia luar. Ciri-ciri masyarakat primitif dapat dilihat sebagai berikut:

1. Isalamet, terasing dari dunia luar. Cara hidup mereka statis dan tanpa kemajuan, karena hanya ada sedikit pengaruh eksternal. Hidup bergantung pada alam. Mereka menerimanya apa adanya, bermanfaat, berbahaya, dan mereka tidak berusaha untuk mengatasi atau memeliharanya (perkembangan yang benar).
2. Konservatif. Karena ketergantungan pada alam dan Islam, budaya dan peradaban berkembang sangat lambat. Dengan kata lain, mereka selalu menjaga budaya mereka tidak berkembang (statis).
3. Kurang deferensiasi (pembagian atau pemisahan). Dalam masyarakat primitif, sulit untuk membedakan satu masalah dari yang lain, jadi kami mengacaukannya satu sama lain, Misalnya masalah agama, ekonomi, kesehatan, pemerintahan dan lainnya.

Adapun ciri-ciri masyarakat primitif adalah sebagai berikut:

1. Rasa solidaritas yang tinggi. Masyarakat primitif umumnya memiliki aturan tidak tertulis, namun selalu mengikuti aturan yang ada, bahkan adat dan budaya. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat primitif memiliki loyalitas (solidaritas) teman yang kuat.
2. Rasa persatuan umat sangat tinggi. Sebuah tradisi yang sangat sulit untuk diubah. Kelompok masyarakat memiliki banyak kesamaan di antara anggotanya, baik secara materil maupun ideologis. Artinya, masyarakat primitif selalu memiliki ide yang sama dan materi atau tujuan yang sama.
3. Kepemilikan individu tidak ditampilkan. Tradisi bahu membahu masyarakat primitif sangat kental. Orang yang cukup tidak memiliki perbedaan antara anggota satu dengan anggota lainnya.

b) Masyarakat Sederhana (Masyarakat Pedesaan)

Masyarakat desa adalah masyarakat community (masyarakat setempat) artinya suatu kelompok teritorial yang menyelenggarakan kegiatan hidup di suatu wilayah sesuai dengan tingkat peradabannya. Karakteristik masyarakat desa adalah sebagai berikut:

1. Kebiasaan hidup dari kehidupan desa terkait erat dengan alam. Hidupnya tergantung pada alam, dan kehidupan adalah kerjasama yang sederhana dan harmonis.
2. Masyarakat religius/animisme/dinamisme. Masyarakat pedesaan masih sangat tradisional dengan agama dan kepercayaan. Sebagian besar masyarakat di pedesaan masih terhubung dengan adat istiadat, aturan lama, ilmu gaib dan unsur magis sehingga mereka tidak pernah meninggalkan ritual tersebut karena takut akan sanksi maupun hukuman yang akan diterima nantinya. Hal ini diturunkan dari generasi ke generasi sehingga sampai batas waktu yang tidak tentu dan akan terus mengakar sampai anak cucunya.
3. Mata pencaharian sebagian besar hidup dengan mata pencaharian agraris. Orang yang berani pindah ke kota besar untuk mencari nafkah. Di balik itu ada keinginan untuk mengubah nasib mereka menjadi lebih baik dan meningkatkan posisi mereka di masyarakat secara ekonomi.

c) Masyarakat Maju (Masyarakat Kota)

Komunitas perkotaan sebagai komunitas juga merupakan masyarakat. Dalam masyarakat perkotaan, para anggotanya terpisah-pisah, tidak saling mengenal, lebih erat lagi kekerabatannya, hubungan-hubungannya tidak rumit, dan terlepas dari hubungan-hubungan personal dan sentimental dan tradisional tanpa kepemimpinan yang mapan (Syukir, 1983, p. 90). Ciri-ciri masyarakat perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Heterogenitas sosial. Dampak kepadatan penduduk kota, maka timbul beberapa persaingan dalam kehidupannya baik perumahan, ekonomi, politik, status sosial, dan lain-lain.
2. Hubungan sekunder. Banyak sosiolog mengatakan bahwa masyarakat perkotaan memiliki hubungan sekunder karena hubungan sosial terbatas pada bidang kehidupan tertentu.
3. Toleransi sosial. Letak geografis kota mengakibatkan masyarakat kota tidak memedulikan tingkah laku pribadi sesamanya asal tidak merugikan bagi kepentingan umum.
4. Kontrol (pemantauan sekunder). Orang-orang kota secara fisik dekat, tetapi secara sosial jauh, dan mungkin dekat jika ada acara khusus seperti festival. Dan pesta ulang tahun.
5. Mobilitas sosial. Orang-orang kota sangat ambisius, meningkatkan status sosial mereka dan meningkatkan status sosial mereka. Semuanya profesional karena mereka dapat meningkatkan posisi mereka melalui profesinya.
6. Ikatan sukarela. Orang-orang di perkotaan secara sukarela bergabung dengan organisasi (organisasi) favorit mereka, tetapi ada juga organisasi yang mempromosikan organisasi tersebut untuk mencari anggota, tetapi yang terpenting adalah masyarakat perkotaan berada dalam hubungan yang terorganisir.
7. Karakteristik (ciri khas). Ciri masyarakat yang paling mencolok adalah sifatnya yang individualistis. Hal ini dapat disebabkan oleh lingkungan yang kompetitif dan tingkat heterogenitas yang tinggi dalam berbagai aspek.
8. Segresi atau keruangan (spatial segregation). Persaingan yang memiliki beberapa wilayah pendatang ini menciptakan pola pemisahan spasial baik berdasarkan

suku maupun mata pencaharian. Selain itu, masyarakat perkotaan sangat dipengaruhi oleh pola pikir rasional dan kecenderungan sekularisasi.

C. Masyarakat Solidaritas Mekanik Dan Solidaritas Organik

Graham C. Kinloch (dalam Jamaludin, 2015b, pp. 26–27) menjelaskan bahwa tipologi Emile Durkheim dalam mengklasifikasikan masyarakat terbagi atas dua bagian, yaitu dengan membandingkan sifat-sifat pokok dari masyarakat yang didasarkan pada solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Untuk lebih memahami mengenai kedua konsep tersebut, maka dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

a) Masyarakat dengan tipe solidaritas mekanik

1. Pembagian kerja rendah;
2. Kesadaran kolektif tinggi;
3. Hukum resesif dominan (menekan);
4. Kepribadian rendah;
5. Konsensus terhadap pola-pola normatif penting;
6. Komitmen Komunitas untuk penyimpangan hukum pidana;
7. Saling ketergantungan yang relatif rendah;
8. Bersifat primitif dan pedesaan.

b) Masyarakat dengan tipe solidaritas organik

1. Pembagian kerja tinggi;
2. Kesadaran kolektif rendah;
3. Hukum restetatif dominan (memulihkan);
4. Kepribadian yang tinggi;
5. Sebuah konsensus tentang nilai-nilai abstrak dan umum adalah penting;
6. Kontrol sosial untuk menghukum lawan;
7. Saling kebergantungan yang tinggi;
8. Bersifat industrial-perkotaan.

Dari penjelasan poin-poin di atas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat dengan tipe solidaritas mekanik dapat kita sebut juga sebagai dengan model masyarakat pedesaan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan karakteristik solidaritas mekanik sama dengan karakteristik yang dimiliki masyarakat pedesaan pada umumnya. Begitu juga dengan tipe solidaritas organik yang dimana masyarakat tipe solidaritas organik tersebut sangat identik dengan karakteristik masyarakat perkotaan pada umumnya juga. Sehingga perbedaan kedua tipe tersebut bisa dijadikan sebagai acuan dalam melihat ciri maupun karakteristik manusia dan masyarakatnya ketika berada di kedua ranah tersebut yaitu ranah pedesaan maupun ranah perkotaan.

D. Masyarakat Kuno, Feodal, Borjuis, dan Komunis

Pada perkembangan masyarakat di tahap ini, terlihat sekali tentang hubungan masyarakat yang diklasifikasikan berdasarkan kelas sosialnya. Menurut pandangan Karl Marx dalam melihat masyarakat sebagai (struktur sosial) dibagi menjadi dua bagian, yaitu kelompok masyarakat borjuis (kaum kaya) dan kelompok masyarakat proletariat (kaum miskin). Dalam perkembangan dua bagian struktur sosial ini, Marx (dalam Jamaludin, 2015b, pp. 27–30) melihat tahapan sejarah perkembangan masyarakat terbagi atas empat jenis, yaitu:

1. Masyarakat kuno, umumnya didominasi oleh perbudakan;
2. Masyarakat feodal, umumnya didominasi oleh tuan-tanah;
3. Masyarakat borjuis, umumnya didominasi oleh buruh upahan;

4. Masyarakat komunis, dengan inddikasinya manusia menjadi pribadi-pribadi bebas yang melaksanakan fungsinya dengan alat produksi milik bersama.

Pernyataan lain menyatakan bahwa sejarah perkembangan sosial adalah masyarakat primitive, transisi menjadi masyarakat perbudakan, lalu menjadi masyarakat feodal, kemudian berkembang lagi ke masyarakat kapitalis dan pada akhirnya menjadi masyarakat komunis. Ciri-ciri masyarakat yang dilihat oleh Karl Marx pada perkembangan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut.

1. *Masyarakat Kuno atau Primitif*

Masyarakat kuno atau primitif juga dikenal sebagai komunisme primitif. Ini karena itu termasuk kepemilikan bersama. Kegiatan ekonomi utama adalah berburu pertanian, perikanan dan peternakan. Unit sosial berbasis keluarga, karena pekerjaannya tidak profesional dan tidak terlalu kecil. Suku ini terdiri dari beberapa keluarga, dengan kepala patriarki. Oleh karena itu, tidak ada kelas karena tidak ada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Itulah sebabnya tidak perlu ada negara karena hubungan sosial adalah hubungan keluarga dan merupakan pembagian kerja sukarela dalam kelompok keluarga.

2. *Masyarakat Perbudakan*

Pertumbuhan penduduk, produksi pertanian, bahkan proses jual beli, masyarakat mulai mengembangkan sistem perbudakan. Sistem perbudakan adalah alat untuk mengatur sistem produksi profesional. Dengan cara ini, nilai tukar pertumbuhan area diperoleh dengan integrasi suku-suku. Oleh karena itu, hal ini berlaku sebagai asal mula kelas sosial, sebagai bagian dari awal sistem produksi sebagai bagian dari konflik kelas budak. Sistem budak tidak hanya dianggap sebagai bagian penjajahan, melainkan merupakan konsekuensi dari perkembangan di dalam cara-cara produksi.

3. *Masyarakat Feodal*

Proses produksi pertanian yang dilakukan oleh para budak dimulai di daerah pedesaan. Pada fase ini, kegiatan produksi dapat berupa usaha perseorangan atau usaha keluarga. Dia mengumpulkan bahan mentah dan memprosesnya sendiri sampai selesai. Pembagian kerja dalam keluarga meluas ke tingkat keahlian tertentu. Hasil produksinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya, dan sisanya dijual kepada pengusaha feodal sehingga tuan-tuan feodal akan menguasai para petani di daerah itu. Bahkan, pekerja tertutup mengendalikan area dalam berbagai pekerja dan mengelola produksi mereka dan menjangkau mereka. Maka muncullah produksinya dan menjulanya ke penguasa tersebut. Timbullah istilah majikan-pengrajin.

4. *Masyarakat Kapital*

Perubahan dari feodal ke kapital diawali dengan produksi yang melebihi konsumsi yang lama-lama menyebabkan individu memproduksi untuk maksud-maksud pertukaran dan menjual dengan keuntungan tidak lagi untuk sekadar mencukupi kebutuhan. Muncullah kelas para saudagar. Untuk mendapatkan keuntungan lebih cepat dan besar dari produksinya, dimulailah pengumpulan sejumlah tenaga kerja untuk bekerja menjalankan alat-alat produksi yang besar. Karena alat-alat produksi harus disediakan, borjuasi muncul dan menyediakan bahan mentah, peralatan dan ide-ide yang diperlukan, yang membayar upah mereka. Akibatnya, kelas baru datang langsung dari alat baru, dan seluruh proses perubahan didorong oleh perluasan pasar dan penemuan bahan baku baru. Di sini Anda dapat melihat contoh kontradiksi dan konflik sosial antara bangsawan

feodal dan kapitalis borjuis. Hasilnya ditentukan oleh realitas ekonomi dari situasi tersebut. Sistem buruh pabrik, di satu sisi, membawa kemakmuran dan memberi kekuatan politik borjuasi, dan tampaknya borjuasi mampu memerintah bangsa.

Dalam sistem kapitalis, alat-alat produksi bersifat sosial (karena dijalankan oleh banyak orang), sehingga dalam situasi seperti itu orang-orang hanya diperlakukan menurut kegunaannya oleh orang-orang yang memiliki alat-alat produksi itu. Hanya ada komitmen moneter (gaji) di sini, tidak ada komitmen lebih lanjut. Sistem ekonomi seperti itu menghancurkan hubungan antara produsen individu dan produk individualnya. Kemudian menjadikan manusia teralienasi atas karya sesungguhnya.

5. Masyarakat Komunis

Manusia sangat dihargai karena kemanusiaannya. Singkatnya, produktivitas manusia dikembangkan secara seimbang dan memuaskan. Ketika dia menjadi produser, dia memutuskan tindakannya sendiri dan memilih untuk melakukan apa yang dia suka sesuai keinginannya. Oleh karena itu, tidak ada kerja wajib, tidak manusiawi dan tidak berarti yang menjauhkannya. Ketika datang untuk bekerja, orang bisa bebas, manusiawi, memuaskan dan kreatif, dan itulah yang dia inginkan dalam kerangka masyarakat komunisnya. Oleh karena itu, menurutnya, hak milik pribadi atas alat-alat produksi dan seluruh borjuasi dihapuskan. Tidak ada proletariat karena setiap orang adalah pemilik yang sama dan karena itu bebas dari eksploitasi dan kontrol eksternal. Jika tidak ada kelas, tidak ada konflik kelas. Visi Marx tentang masyarakat komunis adalah salah satu kemakmuran materi karena ia percaya bahwa produksi ilmiah modern tidak hanya menyediakan sarana yang cocok untuk bertahan hidup, tetapi lebih dari cukup. Nilai terpenting yang diinginkan adalah nilai kebebasan, yang berarti kemampuannya untuk menguasai lingkungan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia.

E. Masyarakat Desa dan Masyarakat Kota

Perdebatan dalam masyarakat modern sering kali terbagi antara penduduk pedesaan (*rural community*) & masyarakat perkotaan (*urban community*). Perbedaan tadi sebenarnya tidak memiliki interaksi menggunakan pengertian masyarakat sederhana, lantaran pada warga modern, betapa pun kecilnya suatu desa, niscaya terdapat dampak dari kota. Di sisi lain, bagi warga yang rendah hati, dampaknya relatif kecil, menurut kota. Perbedaan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan bersifat bertahap. Karena interaksi berkonsentrasi pada penduduk dengan tanda-tanda sosial yang disebut urbanisasi, sehingga sangat sulit untuk menetapkan batas-batas perkotaan.

Seseorang boleh saja beropini bahwa seluruh kota menggunakan kepadatan penduduk yg tinggi, adalah masyarakat perkotaan. Akan tetapi, pendapat tadi juga bisa diposisikan kepada wilayah pedesaan yang merupakan wilayah yang berpenduduk padat, sehingga tidak bisa hanya digolongkan kepada masyarakat perkotaan saja. Masyarakat pedesaan memiliki interaksi yang lebih erat & lebih mendalam daripada interaksi mereka menggunakan masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kehidupan umumnya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan.

Perbedaan antara masyarakat desa dan kota biasanya terlihat jelas terdapat disparitas sosial & kebudayaan yang cukup besar. Bagi orang desa, kota dipercaya

berbahaya, wajib waspada, sumber kejahatan. Dilihat dari segi akhlak juga, kota merupakan sentra kekuasaan, kekayaan, dan sekaligus pengetahuan. Sebaliknya, masyarakat desa dari pemikiran orang kota, juga bermacam-macam. Masyarakat desa dikatakan sebagai orang bodoh, kurang pengetahuan, & membiarkan dirinya dimanfaatkan oleh orang lain. Akan tetapi, desa juga mempunyai kelebihan, yaitu memiliki nilai kebudayaan adat istiadat yang orisinal dan menghayati kehidupan yang baik dan sederhana. Lantaran terdapat disparitas sosial dan kultural, diharapkan tokoh mediator buat menjembatannya. Misalnya tokoh pada bidang politik merupakan ketua desa; pada bidang ekonomi merupakan para pedagang, tengkulak, lintah darat, dan tuan tanah; pada bidang budaya dan kepercayaan merupakan ulama, kiai, pendeta, pakar seni, dan sastra.

2. Perkembangan Masyarakat Desa Berdasarkan Tipologinya

Tipologi tentang masyarakat desa dapat ditinjau dari beberapa aspek (Leibo SU, 1995), yaitu:

- a) *Dari aspek kegiatan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari*
 1. Desa pertanian, dimana semua anggota masyarakatnya terlibat di bidang pertanian
 2. Desa industry, dimana pandangan masyarakat lebih banyak berhubungan dengan industry kecil atau kerajinan yang ada di desa tersebut
 3. Desa nelayan atau desa pantai, yaitu pusat kegiatan dari seluruh anggota masyarakat yang berusaha dibidang perikanan (pantai, laut dan darat)
- b) *Dari aspek pola pemukiman*
 1. Farm village type, yaitu suatu desa yang didiami secara bersama dengan sawah ladang disekitar tempat tersebut. Tipe ini kebanyakan terdapat di Asia Tenggara termasuk Indonesia khususnya Jawa. Tradisi sangat dipegang kuat, hubungan sesame individu dalam proses produksi usaha tani telah bersifat komersial karena masuknya teknologi modern.
 2. Nebulous farm village type, yaitu suatu desa dimana sejumlah orang yang berdiam di suatu tempat dan sebagian lainnya menyebar diluar tempat bersama sawah lading mereka. Tipe ini kebanyakan terdapat di Asia Tenggara dan Indonesia, khususnya di Sulawesi, Maluku, Irian Jaya dan sebagian di Jawa. Di Kalimantan bisa juga dijumpai karena masih terdapat pola bertani atau berladang berpindah. Tradisi dan gotong royong serta kolektifitas sangat kuat di kalangan anggota masyarakat.
 3. Arranged isolated farm village type, yaitu suatu desa dimana orang berdiam disekitar jalan-jalan yang berhubungan dengan pusat perdagangan dan selebihnya adalah sawah dan ladang mereka. Tipe ini kebanyakan dijumpai di Negara-negara Barat. Tradisi disini kurang kuat, individualistis lebih menonjol, lebih berorientasi pada bidang perdagangan.
 4. Pure isolated farm village type, yaitu desa dimana orang-orang berdiam tersebar bersama sawah lading mereka masing-masing. Tipe ini kebanyakan di negara-negara Barat. Tradisi kurang kuat, individualistis menonjol dan juga berorientasi perdagangan.
- c) *Perkembangan desa dalam aspek perkembangan masyarakatnya (dalam Susilawati, 2012, pp. 14-15)*
 1. *Desa tradisional (pradesa)*

Tipe ini kebanyakan dijumpai pada masyarakat suku-suku terasing. Seluruh kehidupannya termasuk teknologi bercocok tanam, cara-cara pemeliharaan kesehatan, cara-cara memasak makanan dan sebagainya masih sangat tergantung pada alam sekitarnya. Pembagian kerja dibagi berdasarkan jenis kelamin, yaitu ada pekerjaan tertentu yang hanya boleh dikerjakan oleh wanita saja sedang laki-laki tidak, demikian pula sebaliknya.

2. *Desa swadaya*

Desa yang memiliki kondisi yang relative statis tradisional. Masyarakatnya sangat tergantung pada keterampilan dan kemampuan pemimpinnya. Kehidupan masyarakat sangat tergantung dengan alam yang belum diolah dan dimanfaatkan secara baik. Susunan kelas dalam masyarakat masih bersifat vertical dan statis serta kedudukan seseorang dinilai menurut keturunan dan luasnya pemilikan tanah.

3. *Desa swakarya (desa peralihan)*

Keadaan desa sudah dimulai disentuh oleh pembaharuan. Masyarakat sudah tidak tergantung lagi dengan pimpinan. Kaya, jasa dan keterampilan serta luasnya pemilikan tanah sudah menjadi ukuran kedudukan seseorang. Mobilitas social baik secara vertical maupun horizontal sudah mulai ada.

4. *Desa swasembada*

Masyarakat telah maju karena sudah mengenal mekanisasi pertanian dan teknologi ilmiah. Unsur partisipasi masyarakat sudah efektif dan norma social selalu dihubungkan dengan kemampuan dan keterampilan seseorang. Selain itu, sudah ada pengusaha yang berani mengambil resiko dalam menanam modal.

Sementara itu, menurut Marzali (dalam Susilawati, 2012, pp. 16–18) juga mengemukakan tipologi komunitas desa di Indonesia, sebagai berikut:

a) *Konsep "Daerah Hukum Adat"*

Van Vollehaven membagi dua kriteria pokok, yaitu 1) "kultur" (aturan-aturan adat) merupakan aturan-aturan pribumi menyangkut kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan desa mengenai tanah, kehidupan ekonomi rakyat dan hubungan kekeluargaan, 2) lingkungan geografis. Konsep daerah hukum adat sama dengan culture area oleh Frans Boas yang mengandung subjektifitas yang kuat, sehingga klasifikasinya bervariasi sesuai dengan penekanan unsur-unsur budaya. Bagi yang menekankan unsur budaya yang utama adalah ekonomi, culture areanya akan berbeda dengan yang menekankan pada aspek sikap psikologis, folklore atau organisasi

b) *Konsep "tipe sosiokultural"*

Koentjaraningrat berbagi tipe ini menjadi empat, pertama, orang yang tinggal di kematian dan bangunan sosial yang jauh sangat sederhana dan dikombinasikan dengan taman ubi jalar. Saya tidak mempengaruhi perunggu, Hindu, Islam, tetapi saya terpengaruh oleh agama Kristen, seperti Naas, Mentawai dan Irian Jaya. Kedua, masyarakat hidup dalam hal kota-kota kecil yang dibangun oleh kolonial dan struktur sosial lebih kompleks dan bidang pertanian lapangan. Misalnya, dipengaruhi oleh agama Kristen seperti Batak, Deikock, Mina Hasasa, Flores dan Anvon. Ketiga, komunitas desa yang tinggal di masyarakat pertanian dan struktur sosial adalah hubungan kecil dengan bagian tengah pemerintah kolonial Belanda dan memiliki dampak kuat pada Islam, Minangkaub, Makassar. Keempat, budidaya padi di sawah, struktur sosialnya sangat kompleks dan berkaitan

dengan bekas pusat kerajaan adat dan pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini dipengaruhi oleh Hindu, Islam dan kolonialisme Belanda. Pengecualian adalah Bali yang tidak terpengaruh oleh Islam, seperti Jawa, Sunda, dan Bali. Kelima, masyarakat perkotaan yang menjadi pusat kegiatan pemerintahan, industri dan komersial masih lemah. Keenam, masyarakat dan budaya kota-kota besar tempat berkembangnya industri dan perdagangan.

c) *Konsep “jenis mata pencaharian hidup”*

Ave meletakkan aspek produksi atau cara memproduksi dalam mengklasifikasikan masyarakat Indonesia. Ia mengutamakan aspek ini pada “mata pencaharian hidup” kemudian ditambah dengan mata pencaharian pelengkap dan peralatan teknologi. Mulai dari mengumpulkan makanan, mencari ikan, memelihara ternak, pertanian sampai pada industri. Namun klasifikasi Ave sulit dipahami karena bisa saja satu suku bangsa mempunyai beberapa jenis cara memproduksi.

3. Perkembangan Kota dari Klasik hingga Modern

Dalam dinamika ini, kota dilihat sebagai sesuatu yang bergerak muncul, tumbuh dan berkembang. Dalam pengamatan terhadap proses perkembangan tersebut, para ahli sampai pada analisis mengenai pengaruh perubahan atau perkembangan kota terhadap daerah dan masyarakat sekitarnya. Hoselitz (dalam D. T. Kartono, 2010, p. 17) menyatakan bahwa dampak perkembangan kota dapat bersifat (1) generatif atau memberikan dorongan perkembangan ekonomi dan kebudayaan masyarakat sekitarnya atau negara; dan (2) parasit atau memberikan pengaruh yang merugikan bagi daerah sekelilingnya atau negara.

Menurut Mehta (D. T. Kartono, 2010) justru melihat sifat generatif dari kota-kota unggul. Sifat generatif ini muncul dalam 4 bentuk, yaitu:

- a) Kota unggul menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan sehingga mendorong perkembangan kota-kota di pedalaman;
- b) Kota-kota mampu mengembangkan budaya sendiri;
- c) Kota-kota yang letaknya strategis dari segi transportasi telah memungkinkan berkembangnya investasi ekonomi; sehingga
- d) Kota dapat menjadi pusat perkembangan ekonomi di luar pertanian. Kota adalah pusat pembaharuan dan merupakan daerah di mana orang datang bermigrasi, di situlah tempat modal dapat berkumpul.

Selanjutnya, menurut Paulus Hariyono (2007, pp. 42–82) menyebutkan bahwa tipe kota telah terbentuk jauh 3000 tahun sebelum abad masehi. Untuk mengetahui lebih jauh kota yang sederhana sampai kompleks seperti sekarang dan yang akan datang maka dibedakan tipe-tipe kota dari mulai kota kuno sampai kota cosmopolitan, yaitu sebagai berikut:

a) *Kota Kuno*

Kota kuno ini memiliki gua, lembah, atau tempat perlindungan, dan beberapa jalur tepi sungai yang terletak strategis yang memelopori pembentukan kota. Ciri utama kota ini adalah mata pencaharian penduduknya bukan bertani, dan penduduknya memiliki kebutuhan yang relatif berbeda dengan pekerjaannya. Kawasan perkotaan kuno ini juga memiliki prasarana dan sarana umum, serta beberapa pusat pemerintahan dengan nilai-nilai tertentu. Di kota kuno ini, kota mulai terbentuk dalam tahap idilis/pemukiman. Tahapan perkembangan manusia

dimulai dengan berburu dan menangkap ikan, peternakan, pertanian, kerajinan dan industry.

b) Kota Praindustri

Kota ini lebih berkembang daripada kota kuno, yang sudah memiliki ciri-ciri seperti tahap pertanian yang baik, dan penduduknya mulai belajar teknik pertanian yang baik. Migrasi penduduk juga dapat diamati, kedatangan kelompok masyarakat perkotaan membuat kebutuhan kota semakin beragam, permukiman kota semakin menonjol, perkembangan fisik kota dan infrastruktur kota menjadi lebih teratur, dan semakin populer. Pola perkotaan kota pra-industri adalah empat pusat kegiatan: pusat pemerintahan, ruang publik (tempat masyarakat berinteraksi), tempat peribadatan, dan pasar tradisional (tempat distribusi barang dari desa ke kota dan sebaliknya), dan tempat kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat, masyarakat pedesaan dan perkotaan. Keempat pusat kegiatan ini relatif dekat dan merupakan kegiatan utama kota pra-industri. Pada saat itu, status seseorang didasarkan pada status yang ditugaskan kepadanya. Dengan kata lain, mereka yang lahir dalam kelompok bangsawan memiliki status bangsawan. Karena sangat kuatnya status dan strata yang dipertahankan oleh masing-masing kelompok strata, maka pola permukiman masyarakat perkotaan pra-industri ini cenderung bersifat group-by-group (pengelompokan berdasarkan status, suku/suku, dan keragaman pekerjaan).

c) Kota Industri

Kota ini lebih berkembang dibandingkan kota pra Revolusi Industri. Lahirnya industri di kota ini membutuhkan tenaga kerja yang besar, baik tenaga terampil tingkat tinggi, menengah, maupun tingkat rendah. Teknologi mulai berkembang dan pusat-pusat industri tersebar di seluruh kota. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kelebihan modal dan memiliki kesempatan untuk mengumpulkan uang untuk memulai industri. Kota industri lahir karena adanya surplus tertentu pada masyarakat perkotaan. Surplus ini bukan hanya surplus kapital, tetapi juga surplus teknologi, sumber daya manusia, dan manusia. Penataan kota berjalan lambat karena pola permukiman kota industri ini tidak teratur. Aktivitas industri sangat menonjol di kota ini, dan sistem sosial agraris berubah menjadi sistem industri. Sistem ekonomi alam berubah menjadi modal, menyebabkan gejolak fisik dan bisnis di kota-kota selama periode perubahan dramatis ini.

d) Kota Modern

Kota ini muncul setelah industrialisasi abad ke-17. Efek ini menyebabkan munculnya semangat Revolusi Industri, menggulingkan kekuasaan mutlak raja. Kemenangan rakyat atau massa atas raja ini telah menarik perhatian teknologi dan ilmu pengetahuan untuk kepentingan rakyat. Sistem pemerintahan saat itu sedang mengalami perubahan dari sistem kekuasaan absolut ke bentuk baru yang lebih intim, seperti sistem demokrasi, sistem pemerintahan republik, dan pemerintahan federal. Di kota ini, kelemahan kota industri diatasi dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan etika.

e) Kota Post-Modern

Orang biasanya lebih menghargai nilai-nilai pluralitas, ide-ide baru lahir, teknologi dan ilmu pengetahuan menjadi lebih canggih dan beragam, dan digunakan untuk kegiatan yang dulunya di luar kesadaran masyarakat umum. Kota-kota postmodern memiliki tingkat globalisasi yang tinggi dan dapat memiliki interaksi dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan kota-kota lain. Kota

postmodern ini penuh dengan informasi, layanan, dan layanan. Kebutuhan hidup secara teknis dan terampil terkomputerisasi dan canggih.

f) *Kota Global*

Kota global dapat didefinisikan sebagai kota yang penduduknya memiliki kebiasaan menjalin hubungan dengan kota-kota lain antar negara. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia akan menyebabkan pesatnya perkembangan teknologi dan penemuan-penemuan di berbagai bidang dan skala yang diperkenalkan ke dunia. Kota-kota di seluruh dunia memiliki kekuatan politik dan menduduki status nasional dan internasional, perdagangan dunia, dan organisasi perusahaan kelas dunia. Aktivitas tertentu menjadi ciri kota dalam bidang sosial dan ekonomi, menunjukkan statusnya sebagai pusa aktivitas profesional dan potensi kota, dan mempengaruhi kota lain di antara dua negara atau lebih. Ciri khas kota kosmopolitan adalah mereka tidak selalu melihat ke kotanya untuk memenuhi kebutuhannya. Komunitas ini juga perlu mau menerima kedatangan orang asing dengan segala potensi kotanya. Dengan kata lain, mencapai status kota global membutuhkan interaksi dua arah.

g) *Kota Kosmopolitan*

Kota Kosmopolitan adalah kota yang masyarakatnya memiliki pemahaman yang komprehensif tentang alam. Kota kosmopolitan diciptakan dalam kondisi tertentu agar penduduknya dapat memahami dan menghargai keanekaragaman alam dan isinya. Masyarakat kosmopolitan menjaga keseimbangan antara kepentingan mereka sendiri dan kepentingan komunitas mereka. Masyarakat kosmopolitan cenderung menjadi kelompok aristokrat baru yang menetapkan tujuan hidup dan memelihara citra. Gejala kosmopolitan dimanifestasikan dalam kontrol individu penghuni kota dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan kepemilikan industri yang besar. Teknologi era ini berkembang, dan kota memenuhi kebutuhan desain neo-universal (modernisme menyentuh seni kontemporer). Budaya dan seni lokal, kemudian agama pertanian, ditinggalkan kecuali dibarengi dengan inovasi atau mempertahankan kredibilitasnya. Kosmopolitan merupakan adaptasi dari peradaban postmodern yang tumbuh secara linier, ganas, dan tidak terkendali. Kota ini adalah kota masa depan dengan mimpi, yaitu kota yang bertujuan untuk kesempurnaan. Namun pada awalnya, kota masih dirundung masalah kesenjangan sosial ekonomi antar kota.

4. Perkembangan Kota di Indonesia

Membicarakan kemunculan kota-kota di Indonesia tidak terlepas dari proses dekolonisasi yang telah membawa perubahan sosial, ekonomi, budaya dan administrasi. Ada lima aspek yang mempengaruhi perkembangan kota-kota di Indonesia dalam proses dekolonisasi. Pertama-tama, kota adalah tempat dari banyak peristiwa penting. Kedua, perubahan tata kota setelah penjajahan Belanda, proses perubahan administrasi cukup terlihat, dan ide-ide baru untuk pembentukan kota yang ideal telah lahir. Administrasi terlihat pasca penjajahan kolonial Belanda dengan menghasilkan suatu gagasan baru tentang terbentuknya kota secara ideal. Ketiga, akibat dekolonisasi, komposisi etnis penduduk perkotaan berubah. Komposisi sosial zaman kolonial Belanda terbagi menjadi tiga kelompok: Eropa, negara asing, bagian timur (China, Arab, India, dll) dan masyarakat adat (*indigenous people*), dan saat ini berkembang di kota-kota besar di Indonesia. Keempat, pertempuran di perbatasan wilayah kota dan desa menyebabkan banyaknya pengungsi yang masuk dan keluar. Kelima, dampak penjajahan Belanda dan Jepang

diperparah dengan rusaknya infrastruktur administrasi, termasuk gedung dan “arsip data dan informasi”, terutama yang membutuhkan proses koordinasi untuk urusan administrasi kantor. Kelima hal tersebut merupakan akar dari asal muasal pembangunan perkotaan Indonesia.

Dalam hal ini, kita dapat melihat apa yang pernah ditulis oleh Kuntowijoyo Kuntowijoyo (dalam Pradadimara, 2005, pp. 252–253) yang menekankan lima bidang garapan sejarah kota, yaitu ekologi kota, transformasi sosial ekonomi, sistem sosial, problema sosial dan mobilitas sosial. Secara tepat, Kuntowijoyo menunjuk pada aspek sosial dari transformasi kota sebagai aspek sentral dalam penulisan sejarah kota. Dengan melihat aspek sosial ini, kita dapat lebih mudah memahami bahwa kota bukanlah sebuah entitas alamiah (yang terjadi tanpa intervensi manusiawi) melainkan entitas sosial (yang sarat dengan dinamika lembaga maupun relasi sosial).

Dari penjelasan perkembangan kota di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan kota di Indonesia terbentuk karena adanya proses yang cukup panjang yang disebabkan oleh masuknya pengaruh asing yang menetap di wilayah nusantara, sehingga dengan berjalannya waktu masyarakat membentuk suatu wilayah tertentu dan meluaskan wilayah tersebut menjadi kota. Kota tersebut semakin lama menjadi semakin berkembang dan maju berdasarkan peradabannya. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa aspek, yaitu perkembangan dari sistem perekonomian, politik, sosial budaya, teknologi, infrastruktur, serta perluasan lahan yang semakin berkembang. Dan pada akhirnya dinamika masyarakat dan perkembangan kota itu sendiri terbentuk dari proses yang memiliki tahapan-tahapan pembangunan yang cukup signifikan dalam menunjukkan status kota tersebut.

BAB III

KLASIFIKASI DESA DAN KOTA

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Dalam Bab III menguraikan tentang klasifikasi desa dan kota. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: (1) pemahaman tentang klasifikasi desa dan kota; (2) Klasifikasi Desa Berdasarkan Karakteristiknya; (3) Klasifikasi Kota Berdasarkan Karakteristiknya.

2. Manfaat Perkuliahan

Materi yang termuat dalam Bab ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk memahami tentang klasifikasi desa dan kota serta mampu membedakan karakteristik masyarakat desa dan kota.

3. Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan klasifikasi desa dan kota.

B. Materi

1. Pemahaman Tentang Klasifikasi Desa dan Kota

Klasifikasi yang dimaksud pada materi ini adalah usaha untuk mengelompokkan desa-desa dan kota-kota tertentu atas dasar karakteristiknya. Karakteristik desa dan kota sendiri mempunyai realisasi yang bermacam-macam. Hal ini tergantung dari sudut pandang seseorang melihatnya. Desa dan kota sebagai pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial dan kultural, dengan sendirinya juga mempunyai warna tertentu atas kegiatan-kegiatan tersebut. Hanya saja, suatu penonjolan kegiatan atau warna tertentu seringkali terlihat jelas.

Hal ini banyak berkaitan dengan latar belakang sejarah terjadinya desa dan kota tersebut, latar belakang sosial, ekonomi, politik, kultural dan fisik keruangnya. Suatu daerah tertentu yang terkenal dengan obyek budayanya dan nilai historikal yang tinggi, akan mampu berkembang menjadi suatu wilayah desa dan kota. Hal ini banyak berkaitan dengan jumlah pengunjung, kebutuhan-kebutuhan tertentu, timbulnya fasilitas-fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan tersebut serta latar belakang fisik keruangan yang ada di sekitar daerah bersangkutan. Apabila di kemudian hari, kegiatan budaya atau yang berkaitan dengan hal tersebut ternyata mendominasi kegiatan kehidupan kotanya, maka fungsi pusat kebudayaanlah yang akan mewarnai kehidupan suatu desa dan kota tersebut. Berkaitan dengan fungsi desa dan kota ini, maka hal yang perlu diperhatikan adalah adanya suatu kenyataan bahwa semakin berkembangnya suatu desa maupun kota, maka akan semakin kaburlah karakteristik utama yang ada ditinjau dari segi fungsinya.

2. Klasifikasi Desa Berdasarkan Karakteristiknya

Secara umum kehidupan masyarakat di pedesaan dapat dilihat dari beberapa karakteristik, seperti yang dijelaskan oleh Roucek dan Warren (dalam Leibo SU, 1995), yaitu:

- a. Mereka homogen dalam hal mata pencaharian, nilai budaya, sikap dan perilaku.
- b. Kehidupan desa menekankan pada pelibatan keluarga dalam kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan finansial rumah tangga. Keluarga juga berperan sebagai pengambil keputusan akhir dalam memecahkan masalah
- c. Faktor geografis sangat berpengaruh di hadapan kehidupan regional, seperti lampiran, negara atau kelahiran.
- d. Anggota keluarga komunitas gomorlasi adalah keintiman dan lebih banyak anak-anak keluarga inti.

Berdasarkan yang dikemukakan di atas, tidak berarti berlaku di setiap desa karena bisa saja salah satu atau beberapa ciri yang sudah ada tidak kelihatan lagi akibat terjadinya perkembangan dalam masyarakat desa itu sendiri. Selanjutnya menurut Rogers dkk (dalam Susilawati, 2012, pp. 9-12) mengatakan banyak hal yang sama tentang masyarakat pedesaan, tetapi lebih banyak menjelaskan tentang petani, yaitu:

- a. Adanya rasa ketidakpercayaan timbal balik antara petani dengan yang lain.
Hal ini dapat terjadi karena anggota masyarakat yang lain saling bersaing untuk mendapatkan sumber keuangan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Misalnya, sementara populasi tumbuh, tanah merupakan sumber produksi pertanian yang terbatas dan melibatkan pekerjaan di bidang pertanian. Hal ini tidak menjamin bahwa petani akan bekerja di luar sektor pertanian.
- b. Pandangan yang sempit dikalangan petani
Bidang pandang yang sempit berarti peluang untuk maju selalu terbatas. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Misalnya, orang Jawa mengatakan "lakune wong urip gumantung nasibe dewe-dewe" (artinya orang hidup menurut takdirnya).
- c. Ketergantungan dan curiga terhadap pemerintah
Jika pemerintah memiliki gaya kepemimpinan otoriter, hubungan antara petani dan pemerintah cenderung tidak harmonis. Oleh karena itu, kurangnya keterbukaan dan kebebasan memilih menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
- d. Familisme
Ada rasa kekerabatan dan keakraban diantara mereka yang berada dalam kekerabatan.
- e. Rasa enggan untuk menerima atau menciptakan ide-ide baru
Kondisi ini terjadi pada masyarakat pedesaan yang relatif tertinggal karena sumber daya alam yang cukup untuk mendukung mereka. Orang hanya menerima ide-ide baru ketika sumber daya alam tidak dapat lagi mendukung mereka atau mulai menurun.
- f. Fatalisme
Sikap ini tercermin dalam cara pandang mereka yang menganggap bahwa kesuksesan bukanlah hasil dari usaha, tetapi di luar diri mereka (supranatural).
- g. Keinginan yang sangat rendah untuk menggapai masa depan

Di masyarakat pedesaan, terutama di daerah yang rawan kemiskinan, keinginan untuk mengenyam pendidikan dan jenis pekerjaan lain (terutama anak-anak dan perempuan) cenderung sangat rendah.

- h. Kurang atau tidak adanya fitrah untuk menahan diri dari mengorbankan kesenangan sekarang untuk keuntungan yang lebih besar di masadepan. Situasi ini disebabkan oleh bahaya besar yang berulang dari petani karena ketergantungan mereka pada alam. Misalnya, ketika nelayan mendapatkan hasil yang berlebihan, mereka cenderung membeli barang-barang rumah tangga seperti elektronik untuk kesenangan "musiman". Jika Anda tidak terlalu beruntung musim depan, pembelian Anda akan dijual kembali dengan harga lebih rendah.
- i. Pandangan yang terbatas dengan dunia luar
Hal ini dikenal dengan kemampuan masyarakat dalam menyerap sesuatu dari luar. Misalnya, apakah pesan pembangunan yang disampaikan diterima, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat.
- j. Memiliki derajat empati yang rendah
Rendahnya empati disebabkan oleh jarak sosial-psikologis dan keterbatasan pengetahuan dari masyarakat lain yang lebih tinggi.

Beberapa kecenderungan pada ciri-ciri di atas merupakan hal yang umum, namun tidak semua kecenderungan tersebut terdapat pada semua masyarakat desa, karena tergantung pada seberapa besar tingkat perubahan (kemajuan) yang telah dicapai oleh masyarakat desa tersebut. Konsep desa yang digambarkan tidak cukup untuk memberikan gambaran tentang desa-desa di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia masih memiliki desa yang dekat dengan desa pra-kapitalis (pre-modernization village). Menurut J.H. Boeke, (dalam Murdiyanto, 2008) ia menggambarkan ciri-ciri utama desa pra-kapitalis sebagai berikut:

1. Subordinasi kegiatan ekonomi ke kegiatan sosial. Dengan kata lain, kegiatan sosial lebih penting daripada kegiatan ekonomi, bahkan kegiatan ekonomi dianggap sebagai "kejahatan".
2. Karena keluarga merupakan unit yang mandiri secara ekonomi, masyarakat desa pada dasarnya adalah unit sosial daripada unit ekonomi, dan keluarga adalah unit terkecil dan terpenting. Dengan kata lain, integrasi masyarakat pedesaan bukanlah integrasi ekonomi melainkan integrasi sosial.
3. Tradisi dapat dipertahankan melalui kemandirian finansial. Oleh karena itu, masyarakat desa merupakan kelompok kecil, sehingga warga desa saling mengenal dan mengenal dengan baik. Karena hubungan personal ini, tradisi yang ada dapat dipertahankan.
4. Desa cenderung terbelakang daripada positif, yang dapat meningkatkan pelestarian tradisi lokal.
5. Setiap orang merasa menjadi bagian dari keseluruhan dan menerima tradisi dan moral kelompok sebagai pedoman. Ini mengarah pada tingkat kolektivitas yang sangat tinggi dan individualisme otomatis tidak dapat diterima.

Dalam kasus Indonesia, apa yang disebut wilayah desa harus dipertimbangkan pada tahapan yang berbeda. Pemukim awal juga membedakan diri satu sama lain, antara Jawa dan Jawa Luar, antara desa dekat kota dan desa jauh dari kota, antara dataran tinggi dan dataran rendah, serta antara pantai dan barat. Di Indonesia, sepertinya belum ada penelitian mendalam tentang masalah ini. Desa merupakan bentukan dan perkembangan menurut konsep asli masyarakat Indonesia, meskipun ada kemiripan dengan desa India

dengan pengaruh Hindu. Kehidupan masyarakat desa dikaitkan dengan nilai-nilai budaya asli yang diturunkan dari generasi ke generasi dan mengalami proses adaptasi yang sangat panjang dari interaksi yang luas dengan perubahan lingkungan biofisik masyarakat. Kearifan lokal merupakan ciri khas suatu masyarakat, yang terbentuk melalui proses adaptasi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami sebagai landasan pembangunan, pembangunan pertanian dan pedesaan.

Kondisi masyarakat pedesaan di Indonesia saat ini sangat beragam, mulai dari perladangan berpindah, menetap, desa industri, desa dengan gaya hidup sektor jasa yang dominan hingga desa dengan fasilitas modern (semi urban dan urban). Desa mengandung beberapa kearifan lokal yang jika dicermati, nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan tersebut menjadi daya untuk beradaptasi dengan lingkungan dimana suatu masyarakat bertempat tinggal di suatu wilayah desa. Kearifan ini dapat dilihat dari aturan, standar, tata krama, bahasa, lembaga, nama dan gelar, teknologi yang digunakan (konstruksi rumah, tata letak rumah, teknik hidrolik), manfaat, teknik pengolahan tanah dan peralatan, teknik konstruksi jalan dan jembatan, pembuatan kapal, dll.).

Dari uraian di atas, ada beberapa kesimpulan tentang masyarakat desa dengan sejumlah karakteristik desa, yaitu sebagai berikut.

1. Umumnya hidup dalam situasi kemiskinan dengan mata pencaharian sangat bergantung pada kondisi geografis wilayahnya, seperti usaha tani, nelayan, ternak, kerajinan tangan, dan pedagang kecil. Ciri lain yang masih nyata terlihat, produksi pertanian yang ditekuni masyarakat terutama untuk memenuhi keperluan sendiri (subsistence).
2. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka masih memegang teguh tradisi, nilai-nilai dan adat istiadat secara turun temurun untuk menjaga kelangsungan hidup dan lingkungan. Namun, harus diakui bahwa sejumlah tradisi dan adat istiadat yang diagungkan telah menghambat upaya sendiri untuk berkembang.
3. Secara psikologis, masyarakat desa cenderung memiliki sifat konservatif dan ortodoks, fatalistik, dan suka curiga terhadap orang luar. Meski begitu, masyarakat pedesaan bisa menjadi hemat, bijaksana, dan menghargai orang lain, yang terkadang sulit ditemukan di perkotaan.

3. Klasifikasi Kota Berdasarkan Karakteristiknya

Ada dua hal yang berkaitan dengan ciri atau karakteristik dari masyarakat kota atau modern. Ada ciri yang berskala kelompok atau masyarakat dan ada ciri berskala individu. Ciri yang berskala masyarakat, yaitu sebuah masyarakat disebut telah modern (maju) antara lain:

1. Hubungan antara sesama nyaris hanya didasarkan pada pertimbangan untuk kepentingan pribadi.
2. Hubungan dengan masyarakat lain bersifat terbuka dan saling mempengaruhi.
3. Mereka percaya bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup.
4. Masyarakat perkotaan berbeda karena perbedaan profesi dan keterampilan sebagai fungsi pendidikan dan pelatihan.
5. Tingkat pendidikan masyarakat perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan masyarakat pedesaan.

6. Aturan atau hukum yang berlaku di masyarakat perkotaan cenderung didasarkan pada aturan atau undang-undang formal yang kompleks.
7. Sistem ekonomi yang mengatur masyarakat perkotaan pada umumnya adalah ekonomi pasar berdasarkan nilai moneter, persaingan, dan nilai-nilai inovatif lainnya.

Adapun karakteristik yang berskala individu sebagai manusia modern (maju) adalah sebagai berikut.

1. Selalu bersikap menerima perubahan setelah memahami adanya kelemahan-kelemahan dari situasi yang rutin.
2. Memiliki kepekaan pada masalah yang ada di sekitarnya dan menyadari bahwa masalah tersebut tidak terlepas dari keberadaan dirinya.
3. Terbuka bagi pengalaman baru (inovasi) dengan disertai sikap yang tidak apriori atau prasangka.
4. Untuk setiap pendiriannya selalu dilengkapi informasi akurat.
5. Lebih berorientasi pada masa mendatang yang didukung oleh kesadaran bahwa masa lampau sebagai pengalaman dan masa sekarang sebagai suatu fakta, sedangkan masa mendatang sebagai harapan yang mesti diperjuangkan. Artinya, ketiga pengalaman waktu itu merupakan suatu sekuen.
6. Sangat memahami akan potensi dirinya, dan potensi tersebut ia yakin dapat diicernbangkan.
7. Selalu terlibat dalam rencana dan peka.
8. Selalu hindari situasi yang fatalistik dan jangan mudah menyerah pada situasi atau nasib.
9. Keyakinan akan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.
10. Memahami, mematuhi, dan menghormati hak, kewajiban, dan kehormatan pihak lain.

Secara umum, lingkungan perkotaan mengandung lima unsur (dalam Jamaludin, 2015b, pp. 75–76), yaitu sebagai berikut:

1. Wisma. Elemen ini merupakan bagian dari ruang kota untuk perlindungan dari lingkungan alam dan untuk kegiatan sosial dalam keluarga. Elemen wisma ini memiliki fitur-fitur berikut:
 - a. Mengembangkan kawasan pemukiman bagi penduduk untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat di masa depan;
 - b. Memperbaiki kondisi lingkungan hidup yang ada untuk mencapai taraf hidup yang wajar dan menciptakan nilai lingkungan yang aman dan nyaman.
2. Karya. Unsur ini merupakan syarat utama bagi keberadaan sebuah kota, karena unsur ini merupakan penjamin kehidupan bermasyarakat.
3. Marga. Elemen ini adalah ruang kota yang membantu mengatur hubungan antara tempat dan tema di dalam kota, dan antara kota itu dengan kota atau wilayah lain.
4. Suka. Elemen ini merupakan bagian dari ruang kota untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan hiburan, rekreasi, taman, fasilitas budaya dan seni.
5. Penyempurna. Elemen ini merupakan bagian penting dari kota, tetapi tidak terintegrasi dengan baik ke dalam empat elemen, termasuk fasilitas pendidikan dan kesehatan, fasilitas keagamaan, kuburan kota, dan jaringan utilitas kota.

Karakteristik kota berulang kali dikontraskan dengan pemahaman masyarakat desa. Dengan kata lain, citra desa adalah masyarakatnya yang masih bersahaja, sederhana, dan utuh (alami dan damai). Pemahaman ini merupakan perbandingan dengan masyarakat perkotaan yang berkembang dan kompleks. Bahkan, model perbandingan pedesaan dan perkotaan juga telah dijelaskan oleh banyak sosiolog, seperti Ferdinand Tenney dalam masyarakat masyarakat. Merupakan citra dengan ciri khas desa atau kota. Begitu pula dengan Charles Cooley di komunitas kelompok primer dan sekunder dan Emile Durkheim di Asosiasi Solidaritas Mekanik dan Organik. Perbandingan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan bertujuan untuk memperjelas kedua komunitas tersebut dari segi karakteristiknya. Hal ini dijelaskan oleh beberapa sosiolog sebagai berikut (Jamaludin, 2015a, pp. 18–22):

Tabel 3.1
Perbandingan Karakteristik Desa dan Kota
menurut S. Roucek dan L. Warren

Karakteristik Desa	Karakteristik Kota
<ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya peranan kelompok primer. 2. Faktor geografik yang menentukan sebagai dasar pembentukan kelompok/asosiasi. 3. Hubungan lebih bersifat intim dan awet. 4. Homogen. 5. Mobilitas sosial rendah. 6. Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi. 7. Populasi anak dalam proporsi yang lebih besar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya peranan kelompok sekunder. 2. Anonimitas merupakan cirikehidupan masyarakatnya. 3. Heterogen. 4. Mobilitas sosial tinggi. 5. Bergantung pada spesialisasi. 6. Hubungan antara orang satu dengan yang lebih didasarkan atas kepentingan dari pada kedaerahan. 7. Lebih banyak tersedia lembaga atau fasilitas untuk mendapatkan barang dan pelayanan. 8. Lebih banyak mengubah lingkungan.

Tabel 3.2
Perbandingan Karakteristik Desa dan Kota
menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt

Karakteristik Desa	Karakteristik Kota
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penduduknya cenderung terisolasi dengan pola pemukimannya cenderung berpencar (meskipun mulai berubah seiring revolusi desa). 2. Hubungan dan cara pandang terhadap orang lain sebagai pribadi utuh bukan sekadar seseorang yang mempunyai fungsi tertentu. 3. Adat dan kebiasaan muncul karena kebutuhan sosial 4. Homogenitas dalam etnis, budaya, dan pekerjaan. 5. Ekonomi keluarga bersifat subsistem (meskipun sudah mulai komersial, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi rasional, yang berkembang seiring dengan pertumbuhan kota-kota kecil yang terbuka terhadap daerah lain. 2. Institusi pemerintah formal yang berdasarkan pada batas wilayah bukannya pada sistem kekeluargaan. 3. Organisasi sosial yang berdasarkan bidang pekerjaan dan kelas sosial, bukan pada sistem kekerabatan. 4. Adanya pembagian kerja ke dalam beberapa bidang pekerjaan khusus. 5. Sistem perdagangan dan dunia usaha.

yang ditandai dengan munculnya agribisnis atau	
--	--

Tabel 3.3
Perbandingan Karakteristik Desa dan Kota
menurut Sorokin dan Zimmerman

Aspek	Karakteristik Desa	Karakteristik Kota
Mata Pencaharian	Pertanian dan usaha kolektif sebagai ciri ekonomi.	Usaha jasa dan manufaktur sebagai ciri ekonomi.
Ukuran Komunitas	Kecil, karena lahan lebih banyak digunakan untuk pertanian.	Besar, karena jasa dan manufaktur tidak memerlukan lahan yang luas.
Tingkat Kepadatan Penduduk	Rendah, berkaitan dengan ukuran komunitas dan luas lahan.	Tinggi, berkaitan dengan ukuran komunitas dan luas lahan.
Lingkungan	1. Fisik (anorganik); berhadapan langsung dan dipengaruhi. 2. Biologi (organik); tanah, kekotoran. Identik dengan hidup mereka. 3. Sosio-kultural: a. Physiososial; bangunan fisik homogeny. b. Biososial; komposisi ras homogeny. c. Psychososial; sederhana.	1. Fisik (anorganik); tidak berhadapan langsung. 2. Biologi (organik); tanah identik dengan "bakteri". 3. Sosio-kultural: a. Physiososial; bangunan fisik yang bervariasi. b. Biososial; komposisi ras beragam. c. Psychososial; lebih kompleks.
Diferensiasi Sosial	Dalam hal jumlah, variasi dan kompleksitasnya rendah, karena penduduknya homogen.	Dalam hal jumlah, variasi dan kompleksitasnya tinggi, karena penduduknya heterogen, banyak pendatang.
Stratifikasi Sosial	Sederhana, perbedaan jarak sosial dekat, mengelompok pada lapisan menengah, dasar pembeda cenderung kaku, mobilitas sosial rendah.	Kompleks, perbedaan jarak sosial jauh, tersebar merata pada setiap lapisan, dasar pembeda tidak begitu kaku, mobilitas sosial tinggi.
Interaksi Sosial	Kontak sosial cenderung sedikit.	Kontak sosial cenderung banyak dan bervariasi.
Solidaritas Sosial	Didasarkan pada kesamaan-kesamaan.	Didasarkan pada perbedaan-perbedaan.

Kingsley Davis menggambarkan karakteristik masyarakat perkotaan, tetapi bukan karakteristik masyarakat pedesaan. Ia percaya bahwa oposisi masyarakat perkotaan adalah oposisi masyarakat pedesaan. Masyarakat perkotaan memiliki delapan ciri sebagai berikut:

1. Heterogenitas masyarakat, yaitu heterogenitas masyarakat perkotaan tinggi.
2. Kehidupan masyarakat perkotaan didominasi oleh pergaulan sekunder, yaitu karena merupakan kelompok sekunder masyarakat perkotaan karena jumlah penduduknya yang besar.
3. Toleransi sosial. Masyarakat perkotaan memiliki tingkat toleransi sosial yang tinggi karena kontrol sosial mereka yang relatif longgar.
4. Pengawasan sekunder. Masyarakat kota dengan toleransi sosial yang tinggi sehingga pengawasan yang efektif adalah pengawasan sekunder.
5. Mobilitas sosial pada masyarakat kota relatif tinggi dan lebih mementingkan prestasi (achievement).
6. Klub sukarela, atau komunitas perkotaan, cenderung bergerak menuju klub sukarela, atau klub di mana anggotanya bebas untuk masuk dan keluar, karena mereka memiliki lebih banyak kebebasan untuk membuat keputusan individu.
7. Masyarakat perkotaan yang individualis cenderung terpisah dari kelompok atau individualistis.
8. Pemisahan spasial. Dalam masyarakat kota, berbagai kelompok sosial yang berbeda cenderung memisahkan secara fisik.

Secara fisik, masyarakat di perkotaan kehidupannya ditandai dengan adanya gedunggedung yang menjulang tinggi, hiruk pikuknya kendaraan, pabrik, kemacetan, kesibukan warga masyarakatnya, persaingan yang tinggi, polusinya, dan sebagainya. Adapun secara sosial, kehidupannya cenderung heterogen, individual, persaingan yang tinggi yang sering menimbulkan pertentangan atau konflik. Munculnya asumsi bahwa masyarakat kota itu pintar, tidak mudah tertipu, cekatan dalam berpikir, dan bertindak, dan mudah menerima perubahan, tidak selamanya benar karena secara implisit, di balik semua itu masih ada masyarakatnya yang hidup di bawah standar kehidupan sosial. Untuk lebih memahami secara terperinci mengenai kehidupan masyarakat perkotaan, berikut diuraikan beberapa ruang lingkup kehidupan dari perkotaan (Jamaludin, 2015b, pp. 76–78).

1. Lingkungan umum dan orientasi alami. Kotamadya cenderung mengabaikan kekuatan alam dan keyakinannya terkait dengan pola hidup mereka berdasarkan rasionalnya. Mempertimbangkan hidup, pemerintah daerah tidak bergantung pada kekuatan alam, tetapi itu tergantung pada kemampuan dunia bisnis (kapasitas). Gejala alami dapat dikontrol secara ilmiah dan rasional.
2. Pekerjaan atau mata pencaharian. Sebagian besar masyarakat mengandalkan pola industri (kapitalis), yang merupakan bentuk utama swasembada, seperti pengusaha, pedagang, dan pekerja industri. Namun, ada kelompok masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pemulung, pengemis, dan pengamen.
3. Ukuran komunitas. Umumnya, masyarakat perkotaan berbeda dari daerah pedesaan. Kebanyakan orang berasal dari budaya sosial yang sama, dan masing-masing memiliki berbagai keperluan, termasuk menemukan pekerjaan dan penelitian. Populasi masih relatif besar.
4. Kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan kota lebih tinggi dari desa. Ini adalah awal sumber daya urban dari berbagai daerah.
5. Homogenitas dan heterogenitas. Dalam struktur masyarakat perkotaan yang sering dijumpai adalah karakteristik sosial, psikologis, agama dan ideologi, adat istiadat dan heterogenitas perilaku. Struktur masyarakat perkotaan sering mengalami tumpang tindih sosial, mobilitas sosial, dan dinamika sosial.

6. Diferensiasi sosial. Perbedaan agama, adat istiadat, bahasa dan sosial budaya pendatang dari berbagai daerah begitu besar sehingga diferensiasi sosial relatif tinggi di perkotaan.
7. Stratifikasi sosial. Kelas sosial dicirikan oleh perbedaan status dan peran dalam struktur sosial. Dalam struktur masyarakat modern, prestasi lebih penting daripada keturunan.
8. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial komunitas perkotaan lebih dinamis daripada masyarakat pedesaan. Fakta ini adil karena penjualan lebih banyak uang di daerah perkotaan akan terjadi di daerah perkotaan daripada di pedesaan. .
9. Interaksi sosial. Dalam berinteraksi dengan masyarakat perkotaan, kita mengenal apa yang disebut masyarakat, Patenbayan Group. Dalam hal hubungan pergantian dalam bentuk kontrak tertentu, arahnya adalah untuk keuntungan atau keuntungan. Hanya terjadi ketika suatu hubungan dibutuhkan.
10. Kontrol sosial. Sistem kontrol sosial terhadap perilaku antar anggota masyarakat semakin sulit dikendalikan, tidak hanya bagi mereka yang tidak saling mengenal, tetapi juga bagi ruang budaya perkotaan yang besar dan heterogenitas masyarakatnya.
11. Pola kepemimpinan. Kepemimpinannya didasarkan pada akuntabilitas yang wajar untuk alasan moral dan hukum. Oleh karena itu, hubungan antara pemimpin dan warga negara berorientasi pada hubungan formal.
12. Standar kehidupan. Standar hidup diukur dengan benda-benda yang dianggap berharga. Mereka akrab dengan deposito dan tabungan. Sebab, menurut mereka, menabung dalam bentuk deposito dinilai lebih praktis dan mudah. Selain itu, kepemilikan barang mewah lainnya.
13. Kesetiakawanan sosial. Ikatan solidaritas sosial dan kesetiakawanan lebih renggang. Ikatan antara solidaritas sosial dan solidaritas semakin lemah. Ikatan ini biasa disebut dengan Patenbayan. Dengan kata lain, pola hubungan untung-rugi lebih dominan dari pada solidaritas dan kesetiakawanan.
14. Nilai dan sistem nilai. Nilai dan nilai dalam struktur masyarakat perkotaan lebih bersifat formal, berdasarkan aturan formal seperti peraturan perundang-undangan.

BAB IV

POLA EKOLOGI PEDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Dalam Bab IV ini menguraikan tentang pola ekologi pedesaan dan perkotaan. Bab ini terdiri dari beberapa sub-sub bab, antara lain: (1) ekologi manusia dan sosial (2) pola pemukiman pedesaan; (3) pemanfaatan lahan pedesaan untuk kegiatan ekonomi; (4) pola ekologi perkotaan; (5) struktur ekonomi masyarakat perkotaan.

2. Manfaat Perkuliahan

Materi yang termuat dalam Bab ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk memahami tentang pola ekologi pedesaan dan perkotaan.

3. Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami pola ekologi masyarakat di pedesaan dan perkotaan serta mampu menjelaskan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan dan perkotaan.

B. Materi

Menurut Wibberley dalam (dalam Jayadinata, 1999, p. 61), kawasan pedesaan merupakan beberapa negara yang memiliki tata guna lahan yang luas sebagai ciri khas, baik sekarang maupun di masa lalu. Tanah pedesaan umumnya digunakan untuk kehidupan sosial dan kegiatan ekonomi. Kehidupan sosial meliputi keluarga, sekolah, ibadah, rekreasi dan olahraga. Kegiatan ini biasanya berlangsung di desa. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan ekonomi. Misalnya kegiatan ekonomi seperti pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, industri dan perdagangan biasanya berlangsung di luar desa. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa tanah pedesaan adalah tempat tinggal dalam konteks kehidupan sosial dan pertanian dalam konteks kegiatan ekonomi..

1. Ekologi Manusia dan Sosial

Awalnya, istilah ekologi tumbuhan dan ekologi hewan digunakan karena ekologi unik untuk dunia tumbuhan dan hewan. Dan baru-baru ini, ekologi manusia (*human ecology*) telah muncul, dan tugasnya adalah mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungannya. Menurut Zipf (dalam Daldjoeni, 1997, p. 88), manusia digambarkan sebagai individu di satu sisi dan makhluk sosial di sisi lain. Nerissen Belanda menjelaskan bahwa ekologi yang mempelajari manusia sebagai makhluk hidup disebut ekologi manusia (*men's ecology*), dan ekologi yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial disebut ekologi sosial (*social ecology*).

Ekologi manusia berkaitan dengan biologi, fisiologi dan kedokteran, dan ekologi sosial berkaitan dengan sosiologi, geografi, dan biologi. Dalam literatur Amerika, tidak ada perbedaan antara ekologi manusia dan ekologi sosial. Karena keduanya disebut ekologi manusia. Beberapa definisi ekologi sosial (dalam Daldjoeni, 1997, pp. 89–90) adalah sebagai berikut:

- a. Ekologi sosial merupakan studi tentang relasi subsosial antar manusia. Aspek subsosial masyarakat adalah keseluruhan relasi yang non-personal antarmanusia, yang muncul dari rasa nasib sosial yang sama yang tidak dapat diterangkan dari interaksi manusia yang disadari.
- b. Ekologi sosial merupakan studi tentang daerah-daerah sosial budaya (culture areas).
- c. Ekologi sosial berfungsi menggambarkan sebaran keruangan dari gejala sosial, mirip geografi sosial, sehingga ditelaah para ahlinya dengan banyak kartogram dan diagram, sebagai teknik penggambaran sebaran gejala sosial.

Masyarakat manusia dalam ekologi sosial disebut *community*, yaitu kehidupan bersama yang berdasarkan teritorial, sehingga dapat berupa desa, kota, metropol, benua, bahkan seluruh dunia. Menurut Alihan Alihan (dalam Daldjoeni, 1997, p. 92) *community* lebih bersifat alami dan harus dilihat sebagai tata subsosial yang diatur oleh prinsip kompetisi. Akibat kompetisi tersebut, masyarakat membentuk pola keruangan yang konkret dan bersama dengan itu mengalami berbagai proses. Adapun *society* merupakan tatasubbudaya dalam masyarakat yang diatur oleh komunikasi, konsensus, beragam nilai, norma, konflik, dan tujuan. Komunitas ekologi sosial dapat dianggap sebagai struktur dengan tiga jenis elemen: populasi (jumlah orang), habitat (lingkungan), dan kebutuhan (dikejar melalui aktivitas hidup). Interaksi ketiga elemen ini memfasilitasi berfungsinya struktur dari perspektif pemukiman, kota, desa, wilayah, dan negara.

Populasi tidak hanya dicirikan oleh jumlah orang, tetapi juga oleh aspek lain seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, kepercayaan, pendapatan, kelas sosial, etnis, kelompok teknis atau ras. Habitatnya juga tidak serta merta dibatasi oleh batas-batas administratif. Habitat dapat berupa kompleks alami (pegunungan, rawa, sungai, dll.) atau kompleks yang dirancang (jaringan jalan, rel kereta api, pabrik, dll.). Kebutuhan mencakup semua kekayaan budaya penting yang diciptakan manusia dalam kehidupannya, seperti instalasi listrik, pelayanan air bersih, gedung sekolah, rumah sakit, pertokoan, tempat rekreasi, olah raga, dan tempat lainnya.

2. Pola Pemukiman Pedesaan

Desa-desanya di Indonesia memiliki pola penempatan yang berbeda-beda, tergantung dari karakteristik sosial budaya yang dianutnya. Beberapa desa memiliki pola lokasi yang serupa, namun memiliki karakteristik sosial budaya yang berbeda, misalnya pola lokasi desa di Sumatera dan Kalimantan sama-sama membentang di sepanjang jalan raya. Yang membedakan pola lokasi kedua kawasan itu, yakni sungai dan jalan. Desa-desanya di Kalimantan terbentang di sepanjang sungai, karena di Kalimantan pusat aktivitasnya berada di sepanjang sungai besar. Sedangkan desa-desanya di Sumatera terbentang di sepanjang jalan raya. Pola letak desa di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut.

1. Lokasi desa. Letak suatu desa mempengaruhi pola persebaran desa tersebut.
2. Kondisi cuaca. Faktor iklim berhubungan dengan suhu dan curah hujan.
3. Kesuburan tanah. Tempat-tempat yang kesuburan tanahnya merata akan membentuk model desa yang terkonsentrasi atau mengelompok (kompak). Sebaliknya, tempat-tempat dengan tingkat kesuburan tanah yang rendah akan membentuk pola desa yang tidak merata.
4. Pengelolaan air. Desa dengan pengelolaan air yang baik dengan muka air tanah yang relatif dangkal akan membentuk model desa klaster (kompak). Di sisi lain,

desa dengan pengelolaan air yang buruk akan membentuk model desa yang tercerai-berai.

5. Situasi aktual ekonomi. Keadaan ekonomi suatu desa mempengaruhi bentuk pola desa, misalnya desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan akan membentuk pola desa yang membujur di sepanjang pantai.
6. Situasi budaya penduduk. Budaya masyarakat erat kaitannya dengan budaya masyarakat setempat, misalnya budaya petani dengan penguasaan teknis yang sederhana cenderung membentuk model desa yang tersentralisasi.

Karena kondisi geografis tiap daerah yang berbeda, maka bentuk peta desa juga berbeda. Pola persebaran desa di Indonesia secara umum adalah sebagai berikut:

1. Model Lokasi Desa Melingkar

Model desa melingkar adalah desa yang penduduknya hidup dalam lingkaran dengan pusat kegiatan sosial budaya di tengah, dan sawah atau ladang tersebar di luar lingkaran utama. Pola ini populer di Bali sebelum modernisasi melanda pulau Bali dengan pura desa sebagai pusat tempat tinggal. Rumah komunal merupakan pusat segala kegiatan sosial dan keagamaan, meskipun setiap rumah memiliki rumah komunal. Disebut pola melingkar karena bentuk coran dari situs desa membentuk lingkaran. Model desa melingkar biasanya memiliki penduduk yang tinggal di sekitar fasilitas tertentu, seperti waduk, mata air, bandara, dan lain-lain. Arah pembangunan desa umumnya lebih mudah, bisa ke segala arah, jurusan apa saja. Pembangunan fasilitas industri kecil dapat ditempatkan di mana saja sesuai dengan keinginan masyarakat.

2. Model Lokasi Desa Menyusur Sepanjang Sungai/Pantai

Model desa memanjang sepanjang jalur sungai/jalan, yaitu pola lokasi desa yang pemukiman penduduknya berada di sekitar sungai atau jalan raya dan di belakang pemukiman terdapat sawah dan ladang mereka. Pola lokasi desa seperti ini terdapat di Kalimantan (memanjang sungai) dan Sumatra (memanjang jalan atau tempat yang menjadi pusat kegiatan). Pada masyarakat Padang, surau sebagai pusat kegiatan masyarakat menjadikan pola lokasi tempat tinggal sejajar atau mendekati surau. Sementara di Kalimantan, yang memiliki sungaisungai besar, yang berfungsi sebagai jalan raya (dengan menggunakan perahu), banyak dijumpai pola lokasi desa yang sejajar dengan sungai, baik tempat tinggal maupun kegiatan ekonomi kegiatan masyarakat. Pola ini memungkinkan karena lahan-lahan yang ada di belakang mereka merupakan hutan lebat yang belum memungkinkan untuk digarap sebagai lahan pertanian. Model ini memiliki ciri mata pencaharian utama penduduknya sebagai nelayan dan sebagian lainnya bermata pencaharian sebagai petani.

3. Model Lokasi Desa Terpusat

Model ini disebut juga dengan pola desa konsentris, yaitu pola lokasi desa desa pemukiman penduduk mengumpul di suatu lokasi yang memiliki administratif lebih kecil (misalnya, dusun) dan ada lahan pertanian di antara dusundusun tersebut. Model situs desa konsentris yang sering berada di Jawa dan Sumatera, memungkinkan penduduk desa yang tinggal di setiap desa memiliki hubungan yang dekat dan akrab. Hal ini dimungkinkan karena sebagai warga desa Anda juga berkewajiban untuk berinteraksi dan melakukan aktivitas di tingkat desa. Dengan demikian, tidak mengherankan jika orang yang berjauhan, tetapi orang-orang dari desa yang sama dapat saling mengenal di desa yang sama.

4. Model Lokasi Desa Linier

Bentuk desa ini adalah dataran rendah dan umumnya menyebar searah dengan jalan raya nasional yang melewati desa tersebut. Model pembangunan desa ini mengikuti bentuk jalan raya. Untuk itu perlu dibangun jalan melalui desa (*ring road*). Kawasan industri kecil dapat ditata di desa agar pemukiman desa tetap kompak..

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pola pemukiman penduduk di berbagai daerah tergantung pada kondisi geografis setempat, ketersediaan pusat pelayanan dan jalur transportasi yang ada. Bentuk pola permukiman di pegunungan berbeda dengan dataran, juga berbeda dengan bentuk di sekitar jalan raya. Bentuk permukiman di perdesaan terutama mengikuti pola persebaran desa dan komune, yang dapat dibedakan menjadi populasi mengelompok atau terkonsentrasi, permukiman tersebar, permukiman linier, dan permukiman di sekitar permukiman tertentu.

3. Pemanfaatan Lahan Pedesaan Untuk Kegiatan Ekonomi

Penggunaan lahan pedesaan untuk kegiatan ekonomi umumnya meliputi penggunaan lahan untuk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, perdagangan dan industri. Bentuk penggunaan lahan di pedesaan pada umumnya masih didominasi oleh kegiatan pertanian, baik pertanian tradisional maupun pertanian maju. Lahan pertanian di Indonesia digunakan untuk perladangan berpindah dalam masyarakat sederhana dan pertanian menetap.

1. Pertanian Berpindah (*Shifting Cultivation*)

Pertanian berpindah adalah sistem pertanian yang mencakup pembukaan sebagian hutan untuk pertanian dengan cara pertanian tebas-bakar. Tanah datar ditanam dengan alat sederhana. Hasil pertama biasanya baik, tetapi setelah menempatkan dua kali, hasilnya akan berkurang. Setelah itu, bumi ditinggalkan dan para petani membuka bagian lain di hutan untuk tumbuh dengan cara yang sama. Proses ini telah dilakukan berkali-kali, jadi sekali pada saat yang sama, petani akan kembali ke hutan pertama yang ditinggalkan. Tanah yang pernah ditinggalkan telah menjadi hutan lagi (hutan sekunder) dan petani akan membuka kembali mereka untuk pertanian. Cara ini disebut perladangan berpindah atau perladangan berpindah. Lahan yang digunakan untuk budidaya harus dibiarkan tidak terganggu untuk waktu yang lama agar hutan dapat pulih kembali. Jika waktu istirahatnya pendek, kemungkinan menjadi hutan berkurang, sehingga jika digunakan kembali untuk perladangan berpindah, hasilnya akan menurun. Oleh karena itu, untuk melestarikan lahan, perladangan berpindah hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lahan masih luas;
- b. Populasinya masih sedikit;
- c. Kepemilikan bersama atas tanah (kepemilikan desa)

2. Pertanian menetap yang lebih maju

Usaha tani residensial umumnya merupakan pertanian yang lebih maju, dilakukan secara teratur, menggunakan alat yang cukup (cangkul, bajak, traktor), serta upaya pengairan, pemupukan, dan pemeliharaan. Pertanian dapat dibedakan menjadi pertanian beririgasi (sawah) dan pertanian beririgasi dengan air hujan. Peralatan yang digunakan dapat berupa peralatan teknologi menengah atau peralatan teknologi canggih. Pertanian maju adalah pertanian menetap dan

menetap. Pertanian benar-benar dapat dipahami dalam arti luas dan sempit. Dalam arti sempit, pertanian identik dengan peternakan, dan dalam arti luas, pertanian tidak hanya berbentuk peternakan tetapi juga mencakup perkebunan. Lahan di pedesaan digunakan untuk kegiatan ekonomi, selain pertanian, tetapi juga untuk perikanan, peternakan, dan perkebunan.

3. Perikanan dan ternak, menandai nelayan di tanah maritim dan makanan laut.
4. Secara umum, hutan milik negara. Hutan dapat dibedakan menjadi: hutan konservasi alam, hutan lindung, hutan produksi, dan hutan rekreasi.

4. Pola Ekologi Perkotaan

Ekologi kota adalah kajian atas hubungan antara dimensi sosial dan fisik dari Ekologi perkotaan adalah studi tentang hubungan antara aspek sosial dan fisik dari berbagai kota. Menurut Park, kota ini awalnya berkembang karena terletak di daerah yang subur. Belakangan, berbagai aktivitas manusia menjadikannya sebuah kota dalam citra kelompok Chicago ini. Penjelasan penataan ruang kota menurut Ernest Burgess dan Robert Park (dalam Jamaludin, 2015b, pp. 86–87) berpendapat bahwa model kota selalu memiliki pusat yang dikelilingi oleh zona-zona berbeda yang disebut konsentrisitas. Dalam perkembangan selanjutnya, kota sebagai lingkungan buatan dapat dilihat sebagai hasil interaksi antara manusia dan antara manusia dengan lingkungannya. Untuk mengatasi permasalahan perkotaan, diperlukan sistem pengelolaan yang memadai, terutama sistem ekologi perkotaan. Para ahli perkotaan sepakat bahwa kota merupakan pusat kegiatan manusia, ekonomi, sosial dan budaya. Lingkungan perkotaan merupakan bentuk interaksi antara subsistem sosial, subsistem alam dan subsistem buatan manusia dalam suatu wilayah.

Sering dikatakan bahwa kota adalah ekosistem dalam model makro. Ekologi perkotaan merupakan salah satu bentuk lingkungan buatan (*man-made environment*). Bentuk lain dari lingkungan buatan adalah desa. Ini disebut lingkungan buatan karena desa terbentuk dari berbagai aktivitas manusia. Kegiatan manusia tersebut selain meningkatkan kualitas alam juga menyebabkan penurunan kualitas alam (udara, air dan tanah).

Meningkatnya suhu iklim mikro, banjir dan erosi merupakan efek yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia yang terjadi saat ini di kota-kota besar. Jika tidak diantisipasi dan ditangani, dampak ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan permanen pada suatu kota. Nampaknya untuk saat ini, banjir merupakan salah satu akibat dari kerusakan permanen yang terjadi di beberapa kawasan perkotaan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Semakin banyaknya kegiatan perkotaan, terutama kegiatan ekonomi, meningkatkan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kondisi ini meningkatkan penggunaan lahan perkotaan untuk produksi ekonomi. Oleh karena itu, lahan dengan fungsi lindung (hutan kota, hutan lindung, tepi sungai) dikurangi atau tidak diprioritaskan. Bahkan, kota ini adalah ekosistem, yang harus dipertahankan dan di mana kerusakan lingkungan kota yang disebabkan oleh kegiatan manusia harus seperti upaya untuk meningkatkan kerusakan lingkungan kota agar kota dapat berkelanjutan dalam kondisi kualitas.

Masalah ekologis khawatir jika terkait dengan masalah lingkungan dan manusia. Ekologi adalah ilmu yang mempengaruhi faktor lingkungan lingkungan tubuh atau kenalan yang berusaha mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan di mana mereka hidup dan apa kehidupan mereka dan hidup mereka dan kehidupan

mereka mengapa mereka ada di sana. Makhluk pemasok termasuk pertumbuhan, hewan dan manusia, sedangkan lingkungan adalah sejumlah faktor dan kekuatan di luar tubuh yang mempengaruhi kehidupan tubuh. Ekologi dari bahasa Yunani (Oikos berarti rumah atau tempat langsung). Secara harfiah, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip ekologi dapat menjelaskan dan menginspirasi kita untuk menemukan cara menjalani kehidupan yang lebih baik. Dewasa ini, masyarakat sangat sensitif terhadap isu lingkungan.

Dalam situasi saat ini, dengan laju pertumbuhan kota yang begitu cepat, pola pembangunan perkotaan juga terpaksa mengikuti laju pertumbuhan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, sosial dan komersial yang kuat di sana. Munculnya bangunan fisik telah mengakibatkan berkurangnya lahan hijau di kota dan berkontribusi pada suhu kota yang lebih hangat. Kota sebagai lingkungan buatan dapat dianggap sebagai proses interaksi antara manusia dan antara orang dan lingkungan mereka. Saat ini, kota ini seperti pusat aktif dan konsentrasi kehidupan manusia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pertumbuhan dan perkembangan populasi membutuhkan banyak fasilitas dan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pengembangan dapat dioptimalkan jika didukung oleh rencana penuh.

Salah satu efek dari perkembangan terjadi pada sumber daya alam dan lingkungan. Karena dampaknya berupa kerusakan lingkungan, jika dibiarkan akan merusak lingkungan dan semakin menurunkan kualitasnya. tetapi juga hewan, tumbuhan, dan benda fisik lainnya yang saling bergantung dan timbal balik sebagai satu kesatuan sistem ekologi yang biasa disebut dengan ekosistem (Asy'ari, 1993, p. 37). Ekologi kota memiliki pola tertentu, tergantung pada tujuan penduduknya dalam memajukan atau membangun kotanya, seperti memiliki "kota" di daerah pesisir, di pegunungan atau kota yang terletak di dataran rendah. Ada juga kota pelabuhan, kota komersial atau industri serta kota pusat hiburan dan sejenisnya, dengan model pemerintahan tertentu tentunya. Kota memiliki banyak fungsi sehingga mengakibatkan padatnya aktivitas manusia baik indoor maupun outdoor, tata ruang lingkungan perkotaan juga harus memperhatikan prinsip ekologi.

Oleh karena itu, ekologi kota memiliki model sendiri dengan mempertimbangkan tujuan pembangunan kota. Karena dalam transisi bertahap, menciptakan kota baru akan menjadi kota yang sangat kompleks dengan banyak masalah berbeda, maka pengaturan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan masalah. Akibatnya, untuk mencapai ekosistem kota, pembangunan perkotaan atau desain perkotaan (*urban design*) tidak hanya memenuhi ekspres dan faktor fisik yang nyaman untuk mendukung struktur visual kota, tetapi juga harus mendukung terciptanya citra lingkungan yang kondusif. Di antara elemen-elemen tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tata Guna Lahan

Penggunaan lahan harus mempertimbangkan dua hal, yaitu pertimbangan umum dan pertimbangan di jalanan akan menciptakan ruang manusia. Perampasan tanah suatu tempat berkaitan langsung dengan persoalan bagaimana mengembangkan suatu daerah menjadi suatu daerah. Shirvany mengatakan peraturan perencanaan adalah mekanisme kontrol yang praktis dan berguna dalam desain perkotaan. Fokus utamanya adalah pada isu tiga dimensi, yaitu hubungan yang harmonis antara bangunan dan kualitas lingkungan.

b. Bentuk dan Masa Bangunan

Menyangkut aspek-aspek bentuk fisik karena setting, spesifik yang meliputi ketinggian, besaran, floor area ratio, koefisien dasar bangunan, pemunduran (setback) dari garis jalan, style bangunan, skala proporsi, bahan, tekstur dan warna agar menghasilkan bangunan yang berhubungan secara harmonis dengan bangunan lain di sekitarnya. Prinsip dan teknik urban design yang berkaitan dengan bentuk dan massa bangunan meliputi:

1. Scale, relatif terhadap perspektif manusia, sirkulasi dan ukuran bangunan di sekitarnya;
2. Urban space, sirkulasi ruang yang diciptakan oleh bentuk, batas, dan jenis ruang kota;
3. Urban mass, meliputi bangunan, permukaan tanah dan benda-benda dalam ruang yang dapat ditata membentuk ruang kota dan model operasional skala besar dan kecil..

c. Sirkulasi dan Parkir

Elemen sirkulasi adalah satu aspek yang kuat dalam membentuk struktur lingkungan perkotaan. Tiga prinsip utama pengaturan teknik sirkulasi adalah:

1. Jalan harus merupakan elemen ruang terbuka yang berdampak positif terhadap visual;
2. Jalan harus dapat mengarahkan pengemudi dan membuat lingkungan menjadi jelas untuk dibaca;
3. Sektor publik harus terintegrasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama

d. Ruang Terbuka dan Tertutup

Pembagian ruang menurut dasar arsitekstural, yaitu:

1. Ruang terbuka, yaitu ruang yang dibatasi oleh batas-batas semu, seperti langit atau tajuk pohon yang diibaratkan sebagai atap atau elemen yang biasanya dilupakan atau ditiadakan, kemudian dinding pembatas diibaratkan sebagai pagar hidup, perbedaan ketinggian, batas-batas fungsional lainnya; dan tanah yang kita pijak merupakan lantai;
2. Ruang tertutup, yaitu ruang yang sebagian dibatasi oleh batas aktual dengan batasan artistik, seperti atap ditunjukkan oleh plafon dan bagian atap, dinding dan lantai;
3. Ruang mati, yaitu ruang yang tidak digunakan (ruang yang tidak berguna).

Secara umum ruang terbuka publik di perkotaan meliputi ruang terbuka hijau dan ruang hijau non hijau. Sedangkan ruang terbuka hijau (RTH) kota meliputi ruang terbuka hijau makro, ruang terbuka hijau sedang, dan ruang terbuka hijau mikro (Jamaludin, 2015b, pp. 92–93). Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian ruang terbuka di kawasan perkotaan yang kaya akan flora, fauna dan vegetasi (endemik atau introduksi) untuk mendukung ekologi, budaya dan masyarakat serta arsitektur dapat membawa manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakat. Ruang terbuka bukan pohon dapat berupa ruang terbuka beraspal atau ruang terbuka biru (RTB) berupa permukaan sungai, danau, atau areal yang diperuntukkan sebagai kolam penampungan.

Secara sosial, ruang terbuka hijau (RTH) berfungsi sebagai sarana rekreasi, inklusi sosial, sarana olah raga, dll. Selain itu, ruang terbuka hijau (RTH) juga dapat membawa manfaat ekonomi dengan meningkatkan citra kota yang ramah lingkungan dan ruang visual yang indah untuk menjadikan kota bernilai pariwisata. Ruang terbuka hijau di kota, kota besar dan kecil, merupakan jalan yang tertib, garis-garis hijau yang

membentuk satu kanvas dalam kota disebut garis hijau. Pada dasarnya, ruang terbuka hijau adalah ruang yang terdapat dalam batas tertentu yang berupa suatu kawasan atau kawasan atau area tampilan atau jalan dengan batas tertentu (batas semu atau batas nyata) dengan salah satu atau seluruh batas yang ditumbuhi pepohonan. Batas ini dapat digambarkan dengan berbagai cara, seperti perkerasan, perbedaan ketinggian, batas area hijau, dll.

Ada berbagai jenis ruang terbuka hijau, seperti taman, kawasan lindung (hutan kota), ruang hijau pemakaman, ruang hijau perumahan, ruang hijau perkantoran, ruang terbuka hijau didistribusikan, jalur pohon jalan, jalur pohon sungai, jalur hijau tekanan tinggi, jalur hijau taman industri, jalur kereta api, area hijau pertanian, area hijau penghijauan dan area lainnya. Ruang terbuka memiliki fungsi berikut:

1. Menyediakan cahaya dan sirkulasi udara dalam bangunan, terutama di pusat kota;
2. Menghadirkan kesan perspektif dan visa pada pemandangan kota (*urban scene*) terutama di kawasan pusat kota yang padat;
3. Menyediakan arena rekreasi dengan bentuk aktivitas khusus;
4. Melindungi fungsi ekologi kawasan;
5. Memberikan bentuk solid foid pada kawasan;
6. Sebagai area cadangan untuk penggunaan untuk masa depan (cadangan area pengembangan).

5. Struktur Ekonomi Masyarakat Perkotaan

Pertumbuhan ekonomi perkotaan mungkin merupakan faktor terpenting dalam menentukan kebijakan pembangunan perkotaan. Tiga faktor yang menjadi basis ekonomi perkotaan dapat diklasifikasikan sebagai fondasi ekonomi perkotaan, hubungan antara ekonomi perkotaan dan pedesaan, dan kesejahteraan masyarakat. Basis ekonomi perkotaan sangat ditentukan oleh sumber daya lokal yang dominan. Dalam hal ini, lembaga ekonomi perkotaan utama, dalam hal ini pemerintah kota, perlu mampu mengembangkan kerangka peraturan kota untuk mendorong investasi sektor swasta. Pelaku swasta yang paling berpengaruh di sini adalah bank, pengembang, industrialis, dan kontraktor jasa.

Sektor perbankan memiliki peran strategis karena memiliki kapasitas kunci untuk meningkatkan struktur investasi, pasar obligasi daerah dan menyediakan kredit mikro untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Kapasitas ini menjadi modal awal untuk lebih banyak partisipasi sektor swasta, terutama dalam penyediaan peralatan dan infrastruktur ekonomi perkotaan, di sektor pelayanan publik, dll. Pengembangan fasilitas dan infrastruktur ekonomi perkotaan (transportasi, sumber daya air, telekomunikasi/informasi dan energi) oleh sektor swasta dan pemerintah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Sistem *Built Operate Transfer* (BOT), *Built License Transfer* (BLT) atau *Built Operate Owner* (BOO) telah diadopsi secara luas dengan hasil yang bervariasi. Investasi langsung sektor swasta ini tentunya akan membuka lapangan kerja baru, baik di sektor formal maupun informal.

Integrasi dan akses sektor ekonomi pedesaan ke ekonomi perkotaan juga harus direncanakan dengan baik. Dewasa ini, proses industrialisasi perkotaan, yang mempersempit luas lahan pertanian, telah menciptakan kondisi bagi keberadaan perusahaan pertanian di perkotaan. Hal ini menyebabkan berkurangnya interaksi kota-desa dalam hal arus produksi pangan (dari desa) dan modal (dari kota). Di satu sisi, hal itu dapat meningkatkan kemandirian pangan kota, tetapi itu juga berarti bahwa

pembangunan daerah pedesaan terhambat. Hal ini juga menghambat proses penataan penduduk perkotaan. Perbaikan ini terutama bertujuan untuk mengisi tenaga kerja sektor hulu di pedesaan, di mana terkadang terjadi kekurangan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun kualitas.

Penataan ruang kota di sini berperan dalam penyiapan lahan yang cukup untuk pasar/kegiatan ekonomi lainnya, basis/infrastruktur ekonomi dan permukiman yang memadai. Penataan ruang terpadu, terutama dalam penyiapan infrastruktur ekonomi perkotaan, yaitu transportasi, sumber daya air, telekomunikasi/informasi dan energi. Perencanaan tata ruang transportasi terutama memainkan peran dalam transportasi orang dan barang yang efisien dari desa ke kota dan di dalam kota. Penataan ruang tegakan baik secara vertikal maupun horizontal harus cukup terjamin. Jaringan telekomunikasi berupa jaringan telepon (GSM), internet dan lain-lain juga harus diperhatikan.

BAB V

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA DAN KOTA

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Dalam Bab V ini menguraikan tentang struktur pemerintahan desa dan kota. Bab ini terdiri dari beberapa sub-sub Bab, antara lain: (1) pengertian pemerintahan desa dan kota; (2) pengenalan tentang good governance; (3) pemerintahan daerah; (4) otonomi desa dan otonomi daerah.

2. Manfaat Perkuliahan

Materi yang termuat dalam Bab ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk memahami tentang struktur pemerintahan desa dan kota.

3. Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu membedakan struktur pemerintahan desa dan kota.

B. Materi

1. Pengertian Pemerintahan Desa dan Kota

Pemerintah didefinisikan sebagai sekelompok orang yang mengelola dan menjalankan kekuasaan, menjalankan kepemimpinan dan mengkoordinasikan pembangunan pemerintah dan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja. Menurut Syafiie, secara etimologis, pemerintahan dapat dipahami sebagai berikut. Memerintah berarti melakukan pekerjaan yang diperintahkan. Artinya ada dua pihak, yaitu pihak yang berkuasa memiliki hak dan pihak yang diperintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan. Setelah menambahkan awalan "pe", menjadi pemerintah, yaitu badan yang menjalankan kekuasaan eksekutif. Setelah menambahkan akhiran "an" ke pemerintah, itu menunjukkan tindakan, metode, masalah atau pekerjaan badan pengatur. Pemerintah pada umumnya adalah seperangkat urusan yang dilakukan oleh negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara itu sendiri. Dengan demikian, tidak dipahami bahwa pemerintah hanya menjalankan fungsi eksekutif tetapi juga mencakup tugas-tugas lain, termasuk legislatif dan yudikatif.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, desa memiliki hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Desa bukan lagi bagian dari mesin desa dan berbeda dengan kelurahan, tetapi desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan. Desa dan kecamatan merupakan dua unit pemerintahan dengan status yang berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang secara adat diberikan otonomi untuk dijadikan badan hukum, sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan yang merupakan kepanjangan dari pemerintahan kabupaten/kota. Untuk mengetahui secara mendalam tentang pemerintahan desa, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari pemerintahan desa itu sendiri. Berdasarkan pengertiannya, berikut adalah penjelasan tentang pemerintahan desa:

1. Pemerintah desa adalah bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan untuk desa. Pemerintah desa adalah suatu proses mengintegrasikan upaya masyarakat desa dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Pemerintahan desa, khususnya mengelola pekerjaan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan corak adat telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa terbentuk atas prakarsa masyarakat dengan mempertimbangkan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
3. Menurut Saparin, pemerintahan desa merupakan lambang resmi solidaritas masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan kepala desa dan para wakilnya (pejabat desa), mewakili masyarakat desa dalam hal hubungan eksternal atau internal dengan masyarakat yang bersangkutan.
4. Pemerintah desa adalah unsur penyelenggara kegiatan pemerintahan desa. Menurut Hanif Nurcholis, pemerintah mempunyai tugas pokok, yaitu: (1) mengurus urusan dalam negeri desa, urusan umum pemerintahan, membina dan memajukan masyarakat; (2) melaksanakan tugas pembantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Dari tugas pokok tersebut muncullah fungsi-fungsi pemerintahan desa yang berkaitan langsung dengan situasi sosial kehidupan masyarakat.

Setelah mengetahui pengertian desa, kita juga harus mengetahui fungsi pemerintahan desa tersebut. Fungsi pemerintahan desa yang terlihat dalam visi Rivai (dalam Jamaludin, 2015a, pp. 111–112) merupakan fenomena sosial karena harus terwujud dalam interaksi antar individu dalam suatu situasi. Naik itu. Secara umum dapat dilihat bahwa fungsi pemerintahan desa dalam pelaksanaannya dapat dibagi menjadi beberapa fungsi pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Instrukturif. Fungsi ini adalah komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator adalah pihak yang menentukan apa, bagaimana, kapan, dan di mana pemerintah dibuat sehingga keputusan dapat dilakukan secara efektif.
2. Konsultatif. Fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua dimensi. Ini digunakan sebagai upaya untuk membuat keputusan yang memerlukan pemikiran dan mungkin memerlukan konsultasi dengan komunitas yang dipimpinnya.
3. Partisipasi. Untuk memenuhi fungsi tersebut, pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakat, baik dengan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaannya. Partisipasi bukan berarti bebas melakukan apa yang diinginkan tetapi secara terkendali dan terarah secara kooperatif dengan tidak mencampuri atau mengambil alih usaha utama orang lain.
4. Delegasi. Fungsi ini dilakukan dengan pendelegasian wewenang atau ditentukan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi yang didelegasikan ini pada dasarnya menunjukkan kepercayaan.
5. Pengendalian. Fungsi pengawasan mengandung pengertian bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu membimbing kegiatan anggota secara terarah dan berwawasan luas. Koordinasi yang efektif untuk mencapai tujuan bersama yang maksimal dalam melaksanakan fungsi pengendalian manajemen dapat dicapai melalui kegiatan pengarahan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan.

Dari kelima fungsi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa juga memiliki fungsi mengatur kegiatan sosial dan kelompok masyarakat di dalamnya untuk mencapai tujuan bersama dan memiliki hubungan timbal balik dengan pemerintah daerah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hal ini terstruktur, terprogram sesuai dengan hak dan wewenang masing-masing pemerintah desa untuk mencapai satu tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan para pemangku kepentingan di desa, baik dalam bidang sosial, kemasyarakatan, budaya, ekonomi, teknologi, dan lain-lain.

2. Pemerintahan Daerah

Pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan satu sama lain, khususnya ketika ada masyarakat, ada pemerintah yang dibutuhkan masyarakat. Hubungan ini lebih mengandalkan interaksi antara pihak yang menyediakan atau menyediakan produk dengan pihak yang membutuhkan atau menerima produk. Pemerintah meliputi semua instansi yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat-alat untuk memenuhi kebutuhan rakyat, sedangkan masyarakat berhak memperoleh, menerima, dan menggunakan produk-produk pemerintah. Selanjutnya, sistem administrasi pemerintahan saat ini merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. diundangkannya UU No. 22 tahun 1999, kemudian direvisi menjadi undang-undang no. 32 Tahun 2004 melibatkan pemerintah daerah, yang menciptakan perubahan paradigma pemerintahan dari pusat kekuasaan (sentralisasi) ke negara rakyat dekat (desentralisasi).

Tata kelola tidak lagi berorientasi pada aspek pemerintahan (government), tetapi bergerak ke arah aspek tata kelola (governance). Di sinilah peran strategis birokrasi pemerintah dalam mewujudkan good governance menjadi kunci keberhasilan pembangunannya. Dasar pembentukan pemerintahan daerah adalah Pasal 18 Ayat 1 UUD 1945, yang mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas daerah-daerah. setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintah daerah yang ditentukan dengan undang-undang. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 mengatur bahwa pemerintah daerah adalah daerah pemerintahan sendiri yang dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan sepenuhnya dan berwenang mengatur lembaga-lembaga, badan-badan pemerintahan, kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan pemerintahan yang telah ditentukan. dengan undang-undang sebagai pemerintah pusat. bisnis. Pembentukan pemerintahan daerah, sejalan dengan amanat Pasal 18 UUD 1945 di atas, menjadi dasar lain untuk mengatur pemerintahan daerah.

Dalam bukunya Siswanto Sunarno (2008, p. 54) menjelaskan bahwa undang-undang tersebut antara lain: undang-undang nomor 1 1945, undang-undang nomor 22 tahun 1948, undang-undang nomor 1 tahun 1957, undang-undang 18 1965, undang-undang 5 tahun 1974, undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan terakhir. UU No. 32 Tahun 2004. Pendidikan politik di tingkat lokal. Pengertian pemerintahan daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah adalah pemerintahan daerah dan DPRD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. . sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Oleh karena itu, penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Untuk pemerintah provinsi, termasuk pemerintah provinsi dan DPRD provinsi. Untuk pemerintah kota atau daerah meliputi pemerintah kota atau daerah dan pemerintah kota atau DPRD.

Setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan daerah yang disebut sebagai Kepala Daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota disebut walikota. Kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota. Bupati dan Wakil Bupati mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga berkewajiban untuk memberikan laporan kinerja pemerintah daerah kepada otoritas, dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta laporan informasi kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas provinsi-provinsi. Wilayah provinsi dibagi menjadi wilayah kabupaten dan kota. Setiap provinsi, provinsi, dan wilayah metropolitan memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan masing-masing menurut asas otonomi dan gotong royong. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang sebagai tugas pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk pelaksanaan tugas bersama dan pemerintahan sendiri. Struktur administrasi dan prosedur pemerintah kawasan khusus ditentukan oleh undang-undang.

Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki Dewan Daerah yang mewakili anggotanya dipilih dalam pemilihan umum. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan di tingkat provinsi, provinsi, dan kota dipilih secara demokratis. Hubungan otoritatif antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang berdasarkan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undangundang. Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat serta hakhak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang. Dengan demikian, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

1. Pemerintah provinsi meliputi pemerintah provinsi dan DPRD provinsi.
2. Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota meliputi Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota dan DPRD Pemerintahan/Pemerintah Kota.

3. Otonomi Desa dan Otonomi Daerah

A. Otonomi Desa

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi ataupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa berdasarkan asal usul dan adat-istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Taliziduhu Ndraha (dalam Jamaludin, 2015a, p. 183) menjelaskan tentang pengakuan otonomi di desa sebagai berikut:

1. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga kebergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
2. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Meskipun demikian dalam pelaksanaan hak dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi, desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang, dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan, dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan mengembangkan prakarsa desa termasuk sinergi berbagai aturan dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No.32 tahun 2004 menjelaskan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sutoro Eko, mengemukakan bahwa konteks penting yang mendorong desentralisasi dan otonomi desa adalah sebagai berikut:

1. Secara historis, desa telah lama eksis di Indonesia sebagai kesatuan masyarakat hukum dan selfgoverning community yang memiliki sistem pemerintahan lokal berdasarkan pranata lokal yang unik dan beragam.
2. Lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan.
3. Dari perspektif ekonomi politik, tanah dan masyarakat desa selalu menjadi medan pertempuran antara negara, kapital dan masyarakat.
4. Konstitusi atau peraturan negara mengakui desa sebagai komunitas otonom, tetapi pengakuan ini lebih bersifat simbolis, lebih formal daripada substantif.
5. Selama lima tahun terakhir, desa mengalami gejolak, menuntut desentralisasi dan otonomi.

Kejelian pemerintah dalam implementasi kebijakan otonomi desa hendaknya diarahkan pada potensi-potensi yang dimiliki desa. Dengan demikian, proses pertumbuhan dan perkembangan harus terarah, termasuk aktualisasi nilai-nilai lokal yang tidak dimaksudkan untuk mengembalikan desa ke zaman lama, tetapi hendak dijadikan sebagai koridor dalam proses transformasi. Dengan demikian, jalan yang

ditempuh tidak destruktif, tetapi tetap mempertimbangkan kepentingan generasi ke depan. Otonomi desa membuka peluang dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan lembaga sosial keagamaan termasuk fungsi-fungsi objektif masyarakat. Ndraha (dalam Jamaludin, 2015a, p. 185) mengungkapkan fungsi-fungsi objektif masyarakat sebagai berikut:

1. Peningkatan nilai sumber daya (subkultur ekonomi) seperti:
 - a. Membeli semurah mungkin,
 - b. Menjual seuntung mungkin,
 - c. Membuat sehemat mungkin.
2. Penciptaan keadilan dan kedamaian (subkultur pemerintahan) seperti:
 - a. Berkuasa semudah mungkin,
 - b. Menggunakan kekuasaan seefektif mungkin,
 - c. Mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan seformal mungkin, dan kontrol terhadap kekuasaan (subkultur sosial), seperti peduli (suka usil), budaya konsumeristik, dan sebagainya.

Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan public dan sipil yang cepat, dan membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa. Untuk itu, desa tidak dikelola secara teknokratis, tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi yang berbasis pada sistem nilai lokal yang mengandung tata aturan, nilai, norma, kaidah, dan pranata sosial lainnya. Potensi desa berupa hak tanah (tanah bengkok, titisari, dan tanah-tanah khas desa lainnya), potensi penduduk, sentra ekonomi dan dinamika sosial-politik yang dinamis menuntut kearifan dan profesionalisme dalam pengelolaan desa menuju optimalisasi pelayanan, pemberdayaan, dan dinamisasi pembangunan masyarakat desa. Selain itu, Sutoro Eko (dalam Jamaludin, 2015a, p. 186) juga menjelaskan bahwa tujuan yang substansial dari desentralisasi dan otonomi desa adalah sebagai berikut.

1. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat.
2. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
3. Mendongkrak kesejahteraan perangkat desa.
4. Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa.
5. Memberikan kepercayaan, tanggung jawab, dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa.
6. Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan.
7. Membuka arena pembelajaran yang sangat bagi pemerintah desa, BPD, dan masyarakat.
8. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

Esensi dan substansi rujukan tersebut, yaitu kesejahteraan masyarakat, partisipasi aktif, dan upaya membangun kepercayaan bersama yang dibingkai dengan sinergitas antara pemerintah dengan yang diperintah. Upaya mengawal tujuan desentralisasi dan otonomi desa memerlukan komitmen politik dan keberpihakan pada desa menuju kemandirian desa. Tuntutan kemandirian desa pada hakikatnya adalah terbentuknya daerah otonomi tingkat tiga yang disebut otonomi desa.

B. Otonomi Daerah

a) Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia

Tindakan pertama yang mengatur pemerintahan daerah setelah proklamasi kemerdekaan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Lahirnya undang-undang ini merupakan hasil (hasil) dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan di kerajaan-kerajaan, bangsa dan pada masa kolonialisme. Undang-undang ini lebih menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui ketentuan penciptaan Perwakilan Popularitas Daerah. Undang-undang tersebut mengatur tentang 3 (tiga) jenis daerah otonom, yaitu kawasan pemukiman, kawasan perkotaan, dan perkotaan. Masa berlaku undang-undang ini sangat terbatas, sehingga selama 3 (tiga) tahun tidak ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang penyerahan pekerjaan (desentralisasi) ke daerah. Undang-Undang ini berumur lebih kurang tiga tahun karena diganti dengan undang-undang Nomor 22 tahun 1948.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Di dalam undang-undang ini ditetapkan 2 (dua) jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa, serta 3 (tiga) tingkatan daerah otonom, yaitu provinsi, kabupaten/kota besar dan desa/kota kecil. Mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948, penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah telah mendapat perhatian pemerintah. Pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan undang-undang tentang pembentukan daerah, telah diperinci lebih lanjut pengaturannya melalui peraturan pemerintahan tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan tertentu kepada daerah. Sejarah otonomi daerah di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya produk legislatif yang menggantikan produk sebelumnya. Perubahan tersebut, di satu sisi, menandai dinamika pembangunan daerah di Indonesia dari waktu ke waktu.

Di sisi lain, dapat pula dipahami sebagai bagian dari “pengalaman politik” penguasa dalam proses menjalankan kekuasaannya. Masa otonomi daerah Indonesia setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 ditandai dengan lahirnya sejumlah Undang-undang Pemerintah Daerah, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 (yang merupakan peraturan tunggal pertama yang menerapkan sistem hukum yang seragam).), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 (mengikuti sistem pemerintahan yang paling luas) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-undang kedua menetapkan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat di daerah. Prinsip yang digunakan untuk memberikan otonomi kepada daerah bukan lagi “otonomi yang benar dan meluas”, melainkan “otonomi yang benar dan bertanggung jawab”. Sebab, visi otonomi daerah yang lebih luas dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan NKRI dan tidak selaras dengan maksud dan tujuannya konsisten dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam GBHN menuju pembangunan dalam arti luas. Undang-undang ini memiliki masa hidup paling lama 25 tahun dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 hanya setelah persyaratan reformasi diumumkan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak terlepas dari perkembangan situasi yang terjadi saat itu, ketika kediktatoran Orde Baru mengundurkan diri dan semua pihak ingin melakukan reformasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. . . Atas dasar reformasi ini, rapat luar biasa MPR tahun 1998 mengesahkan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sendiri; pengaturan, pemerataan dan pemerataan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu yang paling mencolok adalah amandemen UU No. 5 Tahun 1974 dengan UU No. 22 Tahun 1999, perubahan mendasar dalam bentuk otonomi daerah dan sifat desentralisasi. Perubahan tersebut dapat dilihat dari isi dokumen yang terdapat dalam rumusan setiap pasal undang-undang. Beberapa poin dalam kedua undang-undang (UU No. 22 Tahun 1999 dan No. 25 Tahun 1999) secara teoritis akan mengarah pada kesimpulan bahwa desentralisasi dalam UU No. 22 Tahun 1999 lebih mungkin terjadi. Hal ini akan lebih nyata jika dikaitkan dengan kepemimpinan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Kepala Daerah Khusus dan Kepala Daerah merupakan kepanjangan tangan Pemerintah.

Dalam praktik pengelolaan kolektif kewilayahan, terlihat bahwa peran kepala daerah yang melaksanakan tugas desentralisasi lebih dominan daripada kepala daerah. Hal ini dimungkinkan karena kepala daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, dan bukan kepada DPRD sebagai wakil rakyat daerah yang memilihnya. Dorongan otonomi daerah di Indonesia tumbuh setelah MPR RI melakukan perubahan pada Pasal 18 UUD 1945 Perubahan Kedua, yang menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa negara Indonesia menggunakan prinsip otonomi dan desentralisasi kekuasaan politik.

b) Pengertian Otonomi Daerah

Istilah "otonomi daerah" dan "desentralisasi" sering digunakan secara bergantian dalam konteks pembahasan administratif. Kedua istilah ini dapat dibedakan secara akademis, tetapi secara praktis tidak dapat dipisahkan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, tidak mungkin membahas masalah otonomi daerah tanpa membandingkannya dengan desentralisasi. Memang, menurut banyak orang, otonomi daerah adalah desentralisasi itu sendiri. Oleh karena itu, buku-buku referensi tentang otonomi daerah diulas dengan menggunakan istilah desentralisasi. Kedua istilah tersebut seperti dua mata, yang pada dasarnya menimbulkan pertanyaan tentang pembagian kekuasaan antar instansi pemerintah, sedangkan otonomi mengacu pada hak untuk mengikuti pembagian kekuasaan.

Konsep desentralisasi sering dibahas dalam konteks diskusi tentang sistem pemerintahan dan pembangunan. Saat ini, hampir semua negara-bangsa menganut prinsip desentralisasi dalam sistem administrasi publiknya. Desentralisasi bukanlah suatu sistem tunggal, melainkan rangkaian unit-unit dari suatu sistem yang lebih besar. Negara-bangsa tidak berkomitmen pada desentralisasi karena merupakan alternatif dari sentralisasi. Sentralisasi terdistribusi dan terpusat tidak khawatir dan tidak alami, tetapi dalam sistem organisasi negara. Akibatnya, keadaan negara adalah payung desentralisasi dan sentralisasi.

Definisi desentralisasi dan otonomi daerah yang berbeda dinamai oleh para ahli yang membandingkan bahan dan diskusi untuk menemukan pemahaman mendasar tentang implementasi otonom lokal sebagai tanda-tanda desentralisasi. Dalam arti sempit, otonomi dapat diartikan sebagai "independen" dan berarti "ketidakberdayaan" dalam arti luas.

Dengan demikian, otonomi daerah berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerah sendiri. Jika

daerah sudah mampu mencapai kondisi tersebut, daerah tersebut dapat dikatakan sudah berdaya untuk melakukan apa saja secara mandiri tanpa tekanan dari luar (external intervention). Menurut pandangan M. Turner dan D. Hulme (dalam Yuwono, 2001, p. 27) bahwa desentralisasi adalah transfer kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa pelayanan kepada publik dari seseorang atau agen pemerintah pusat kepada beberapa individu atau agen lain yang lebih dekat kepada publik yang dilayani. Landasan yang mendasari transfer ini adalah teritorial dan fungsional. Teritorial yang dimaksud adalah menempatkan kewenangan kepada level pemerintahan yang lebih rendah dalam wilayah hierarkis yang secara geografis lebih dekat kepada penyedia layanan dan yang dilayani.

Adapun fungsional artinya transfer kewenangan kepada agen yang secara fungsional terspesialisasi. Transfer kewenangan secara fungsional ini memiliki tiga tipe, yaitu:

- a. Apabila pendelegasian kewenangan itu di dalam struktur politik formal misalnya, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah;
- b. Jika transfer itu terjadi di dalam struktur administrasi publik, misalnya dari kantor pusat sebuah kementerian kepada kantor kementerian yang ada di daerah;
- c. Jika transfer tersebut dari institusi negara kepada agen non negara, misalnya penjualan aset pelayanan publik seperti telepon atau penerbangan kepada sebuah perusahaan.

Rondinelli (dalam Jamaludin, 2015b, p. 170) mendefinisikan tanggung jawab untuk perencanaan, manajemen dan distribusi, yang dapat dimainkan di pemerintah pusat, pasukan pemerintah, unit pemerintah, izin atau unit gender per unit. Berbagai macam bidang atau lembaga swasta non-pemerintah dan organisasi nirlaba, izin lokal atau fungsional. Didistribusikan menunjukkan proses perpindahan kekuatan politik, keuangan, dan administrasi untuk unit pemerintah stasiun. Oleh karena itu, menurut dia, yang terpenting adalah pemerintah daerah dipilih dalam pemilihan kepala daerah (*selecting local government*). Jika tidak, negara tidak dapat dianggap terdesentralisasi. Dia menekankan pentingnya kotamadya terpilih karena dua alasan, yaitu:

1. Alasan terbesar dan paling berisiko dari tiga reformasi struktural (desentralisasi, desentralisasi, privatisasi) mungkin bersifat lokal.
2. Implikasi perilaku yang khas dari desentralisasi. Desentralisasi mengubah struktur pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pemerintah pusat menjadi warga lokal. Di sisi lain, kurangnya fokus untuk menjaga hubungan hierarkis antara pemerintah pusat dan stafnya di daerah yang diprivatisasi menunjukkan adanya motif keuntungan untuk mempengaruhi perilaku.

Dengan demikian desentralisasi ini merupakan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

c) Tujuan Otonomi Daerah

Memasuki abad ke-21, Indonesia berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah memporak-porandakan hampir seluruh sendi ekonomi dan politik negeri ini yang telah dibangun cukup lama. Lebih jauh lagi, krisis ekonomi dan politik yang berlanjut menjadi multikrisis telah mengakibatkan semakin rendahnya tingkat kemampuan dan kapasitas negara dalam menjamin kesinambungan pembangunan. Krisis tersebut salah satunya diakibatkan oleh sistem manajemen negara dan pemerintahan yang sentralistik, yaitu kewenangan dan pengelolaan segala sector pembangunan berada dalam

kewenangan pemerintah pusat, sementara daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur daerahnya. Sebagai respons dari krisis tersebut, pada masa reformasi dicanangkan suatu kebijakan restrukturisasi sistem pemerintahan yang cukup penting, yaitu melaksanakan otonomi daerah dan pengaturan perimbangan keuangan antarpusat dan daerah.

Paradigma lama dalam manajemen negara dan pemerintahan yang berporos pada sentralisme kekuasaan diganti menjadi kebijakan otonomi yang berpusat pada desentralisme. Dalam pada itu, kebijakan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari upaya politik Pemerintah Pusat untuk merespons tuntutan kemerdekaan atau negara federal dari beberapa wilayah yang memiliki aset sumber daya alam melimpah, tetapi tidak mendapatkan haknya secara proporsional pada masa pemerintahan Orde Baru. Desentralisasi dianggap dapat menjawab tuntutan pemerataan, pembangunan sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kehidupan berpolitik yang efektif. sebab desentralisasi menjamin penanganan tuntutan masyarakat secara variatif dan cepat.

Beberapa alasan kebutuhan terhadap desentralisasi di Indonesia saat ini dirasakan sangat mendesak adalah sebagai berikut. Pertama, kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di Jakarta (Jakarta-centris). Sementara itu, pembangunan di beberapa wilayah lain diabaikan. Kedua, pembagian kekayaan secara tidak adil dan merata. Daerah-daerah yang memiliki sumber kekayaan alam melimpah, seperti Aceh, Riau, Irian Jaya (Papua), Kalimantan, dan Sulawesi ternyata tidak menerima perolehan dana yang patut dari pemerintah pusat. Ketiga, kesenjangan sosial (dalam makna seluas-luasnya) antara satu daerah dengan daerah lainnya sangat terasa. Pembangunan fisik pada satu daerah berkembang pesat sekali, sedangkan pembangunan di banyak daerah masih lamban, bahkan terbengkalai. Alasan lain yang didasarkan pada kondisi ideal, sekaligus memberikan landasan filosofis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah (desentralisasi) sebagaimana dikemukakan oleh The Liang Gie (dalam Jamaludin, 2015b, pp. 172–173) yaitu sebagai berikut:

- a. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
- b. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
- c. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Hal-hal yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat diserahkan kepada daerah.
- d. Dari sudut kultur, desentralisasi perlu diadakan supaya adanya perhatian dapat sepenuhnya ditumpukan kepada kekhususan sesuatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
- e. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Pilihan terhadap desentralisasi harus dilandasi argumentasi yang kuat, baik secara teoritis maupun empiris. Kalangan teoretisi pemerintahan dan politik mengajukan

sejumlah argumen yang menjadi dasar atas pilihan tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara empirik atau pun normatif-teoretis. Di antaranbeberapa argumentasi dalam memilih desentralisasi-otonomi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk terciptanya efesiensi-efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah berfungsi mengelola berbagai dimensi kehidupan, seperti bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, integrasi sosial, pertahanan, keamanan dalam negeri, dan lain-lainnya. Selain itu, pemerintah juga mempunyai fungsi distributif akan hal-hal yang telah diungkapkan, fungsi regulatif baik yang menyangkut penyediaan barang dan jasa maupun yang berhubungan dengan kompetensi dalam rangka penyediaan tersebut, dan fungsi ekstraktif, yaitu memobilisasi sumber daya keuangan dalam rangka membiayai aktivitas penyelenggaraan negara. Selain itu, memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, menjaga keutuhan negara-bangsa, serta mempertahankan diri dari kemungkinan serangan dari negara lain, merupakan tugas pemerintahan yang bersifat universal. Oleh karena itu, tidaklah mungkin hal itu dapat dilakukan dengan cara yang sentralistik, dan pemerintahan negara menjadi tidak efisien dan tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
- b. Sebagai sarana pendidikan politik. Banyak kalangan ilmuwan politik berargumentasi bahwa pemerintahan daerah merupakan kancah pelatihan (training ground) dan pengembangan demokrasi dalam sebuah negara. John Stuart Mill dalam tulisannya "Representative Government" menyatakan bahwa pemerintahan daerah akan menyediakan kesempatan bagi warga masyarakat untuk berpartisipasi politik, baik dalam rangka memilih atau kemungkinan untuk dipilih dalam suatu jabatan politik. Mereka yang tidak mempunyai peluang untuk terlibat dalam politik nasional dan memilih pemimpin nasional akan mempunyai peluang untuk ikut serta dalam politik lokal, baik dalam pemilihan umum lokal ataupun dalam rangka pembuatan kebijakan publik. Dengan demikian, pendidikan politik pada tingkat lokal sangat bermanfaat bagi warga masyarakat untuk menentukan pilihannya.
- c. Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan. Banyak kalangan ilmuwan politik sepakat bahwa pemerintah daerah merupakan langkah persiapan untuk meniti karier lanjutan, terutama karier di bidang politik dan pemerintahan di tingkat nasional. Keberadaan institusi lokal, terutama pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif lokal), merupakan wahana yang banyak dimanfaatkan guna menapak karir politik yang lebih tinggi. Presiden Amerika Serikat seperti George Bush, Bill Clinton, Ronald Reagan, Jimmy Carter dan lain-lainnya, sebelumnya adalah gubernur di negara bagian tempat mereka berasal.
- d. Stabilitas politik. Sharpe berargumentasi bahwa stabilitas politik nasional mestinya berawal dari stabilitas politik pada tingkat lokal menjadinya pergolakan daerah pada tahun 1957-1958 dengan puncaknya adalah kehadiran dari PRRI dan PERMESTA, karena daerah melihat kenyataan kekuasaan pemerintah Jakarta yang sangat dominan. Demikian juga, yang terjadi di Philipina, yang mengakibatkan masyarakat Muslim di Mindanao berjuang untuk melepaskan diri dari pemerintahan di Manila. Hal yang sama dapat kita temukan di Thailand. Warga Muslim di Daerah Selatan yang dikenal sebagai masyarakat Patani juga berjuang melawan pemerintahan nasional di Bangkok karena mereka menganggap bahwa Bangkok tidak memperlakukan mereka dengan baik. Gejolak

disintegrasi yang terjadi di beberapa daerah merupakan contoh yang sangat konkret hubungan antara pemerintahan daerah dan ketidakstabilan politik kalau pemerintah nasional tidak menjalankan otonomi dengan tepat.

- e. Kesetaraan politik (*political equality*). Dengan dibentuknya pemerintahan daerah, kesetaraan politik di antara berbagai komponen masyarakat akan terwujud. Masyarakat di tingkat lokal, sebagaimana halnya dengan masyarakat di pusat pemerintahan, mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam politik, baik melalui pemberian suara pada waktu pemilihan kepala desa, bupati, walikota, dan gubernur. Di samping itu, warga masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok ikut terlibat dalam memengaruhi pemerintahannya untuk membuat kebijakan, terutama yang menyangkut kepentingan mereka.
- f. Akuntabilitas publik. Demokrasi memberikan ruang dan peluang kepada masyarakat, termasuk daerah, untuk berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan penyelenggaraan negara. Keterlibatan ini sangat dimungkinkan sejak dari awal tahap pengambilan keputusan sampai dengan evaluasi. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat akan dapat diawasi secara langsung dan dapat dipertanggung jawabkan karena masyarakat terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Good Governance dalam Suatu Negara

Istilah *good governance* pertama kali dipopulerkan oleh lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, UNDP dan IMF dalam rangka menjaga dan menjamin kelangsungan dana bantuan yang diberikan kepada negara-negara sasaran. Pada dasarnya organisasi-organisasi internasional ini berpendapat bahwa setiap bantuan pembangunan internasional di negara-negara di dunia, terutama negara-negara berkembang, tidak akan berhasil tanpa tata kelola yang baik, manajemen yang baik di negara-negara sasaran. Kemudian, *good governance* menjadi isu sentral dalam hubungan antara lembaga multilateral tersebut dengan negara sasaran.

Menurut Asosiasi Transparansi Indonesia (MTI, 2002), wacana *good governance* menjadi relevan di Indonesia setidaknya karena tiga alasan utama; Pertama, krisis ekonomi dan politik masih berlangsung dan tampaknya belum berakhir; Kedua, masih banyak korupsi dan banyak penyimpangan dalam pengelolaan negara. Ketiga, kebijakan otonomi daerah merupakan harapan besar bagi demokratisasi sekaligus ketakutan akan kegagalan program. Penyebab lainnya adalah belum optimalnya pelayanan aparatur penyelenggara pemerintahan dan swasta untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Meskipun istilah pemerintahan yang baik sering disebut dengan berbagai cara, istilah tersebut dipahami dengan cara yang berbeda. Di sisi lain, ada pula yang mengartikan *good governance* sebagai kinerja suatu organisasi, misalnya kinerja suatu pemerintahan, perusahaan atau organisasi masyarakat. Menurut MM. Billah, istilah ini mengacu pada arti aslinya, memerintah berarti mengarahkan atau mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik suatu bangsa. Oleh karena itu, pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai tindakan atau perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai untuk mengarahkan, mengontrol atau mempengaruhi urusan publik untuk menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan dan tindakan sehari-hari.

Dengan demikian, bidang pemerintahan yang baik tidak terbatas pada administrasi publik atau pemerintahan, tetapi juga pada bidang masyarakat sipil yang

diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), seperti organisasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sektor swasta. Pendeknya, persyaratan *good governance* tidak hanya ditujukan kepada penyelenggara negara atau pemerintahan, tetapi juga kepada pihak di luar birokrasi pemerintah yang dengan antusias menuntut kinerja *good governance* di negara.

Di sisi lain, *good governance* merupakan wujud nyata dari demokrasi. Tegasnya, menurut Taylor, *good governance* adalah pemerintahan yang demokratis seperti yang dipraktikkan di negara-negara demokrasi maju di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan dianggap sebagai sistem pemerintahan yang baik karena paling mencerminkan karakteristik pemerintahan yang baik yang harus ada untuk mendukung keberhasilan lembaga partai politik di dunia. Ini adalah alternatif dari sistem pemerintahan lain, seperti totalitarianisme komunis atau otoritarianisme militer yang berlaku di negara-negara dunia ketiga selama Perang Dingin.

Konsep *good governance* pada dasarnya memberikan rekomendasi bagi sistem pemerintahan yang menekankan kesetaraan antar lembaga publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Tata pemerintahan yang baik berdasarkan visi ini berarti kesepakatan tentang peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah, masyarakat sipil (*civil society*) dan sektor swasta. Kesepakatan mencakup semua bentuk mekanisme, proses dan institusi di mana warga negara dan kelompok masyarakat mengekspresikan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum mereka, memenuhi kewajiban mereka, dan menghubungkan perbedaan di antara mereka. Santosa (dalam Jamaludin, 2015b) menjelaskan bahwa *governance* sebagaimana didefinisikan oleh UNDP adalah penerapan politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan urusan nasional. Pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dikatakan baik (baik atau solid) apabila dilakukan secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan kebutuhan rakyat, dalam suasana yang demokratis, dan transparan.

Menurut pengertian di atas, *good governance* adalah pemerintahan yang baik dari segi proses dan hasil, semua elemen pemerintahan bergerak secara sinergis, tidak saling bertentangan, didukung oleh rakyat dan tidak memiliki pemerintahan yang anarki. yang dapat menghambat pembangunan. Pemerintah juga dikatakan baik jika dapat mencapai pembangunan dengan menggunakan biaya yang sangat minim menuju cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran sebagai basis model pemerintahan. Pemerintah juga bisa dikatakan baik, jika bekerja secara efisien dan efektif dengan indikator peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat baik produktivitas maupun daya beli, kesejahteraan mental mereka terus meningkat, dengan ekspresi perasaan aman, tenang, dan kebahagiaan serta rasa kebangsaan yang baik. Indikator ini diukur dengan menggunakan model distribusi seragam, sehingga kesenjangan terus dikurangi pada tahap awal. Proses pelaksanaan pembangunan sebagai bentuk pelaksanaan amanat pemerintah juga harus dilakukan secara transparan dan didukung oleh manajemen yang bertanggungjawab.

Good governance sebagai model dapat tercapai jika tiga pilar pendukung dapat berfungsi dengan baik, yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Negara dengan birokrasi pemerintahannya terpaksa mengubah model pelayanannya dari birokrasi elit menjadi birokrasi kerakyatan. Sektor swasta sebagai penjaga sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah juga harus berkontribusi dalam upaya pengelolaan sumber daya dan pada akhirnya membutuhkan keterlibatan organisasi masyarakat sebagai kekuatan penyeimbang negara (Jamaludin, 2015b, pp. 138–140).

BAB VI

HUBUNGAN MASYARAKAT PEDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Dalam Bab VI ini menguraikan tentang hubungan masyarakat pedesaan dan perkotaan. Bab ini terdiri dari beberapa sub-sub Bab, antara lain: (1) perbedaan desa dan kota; (2) persamaan desa dan kota: sektor formal dan informal; (3) persamaan desa dan kota: pusat dan pinggiran; (4) persamaan desa dan kota: pusat dan pinggiran.

2. Manfaat Perkuliahan

Materi yang termuat dalam bab ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk memahami tentang hubungan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan.

3. Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu mengetamendeskrripsikan tentang hubungan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan.

B. Materi

Dikotomi antara kehidupan perkotaan dan pedesaan pada dasarnya tidak pernah dibuat dalam sosiologi. Dikotomi tersebut dalam konteks tipologi sosial. Misalnya, Ferdinand Tony (1887) tentang komunitas dan masyarakat, dan Emile Durkheim tentang solidaritas mekanis dan organik. Menurut Wallerstein, sejarah 500 tahun terakhir telah dibentuk oleh ekspansi sistem kapitalis. Bahkan daerah-daerah terpencil akan diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi dunia yang sedang berkembang. Kota-kota yang ada telah diintegrasikan ke dalam sistem baru dan fungsinya telah diubah. Kota-kota baru telah tumbuh untuk mendukung kontrol politik dan mengarahkan sumber daya alam ke kota-kota besar. Penduduk pedesaan ditarik ke dalam kegiatan pertambangan dan perkebunan baru, menjadi petani dan menghasilkan segalanya untuk pasar perkotaan. Semuanya dipengaruhi oleh dominasi politik dan infiltrasi budaya yang berasal dari kota (D. T. Kartono, 2010, p. 7).

Perkembangan selanjutnya adalah koordinasi pembagian dikotomis dan dikotomis antara kota dan desa. Kota bercirikan tipologi yang diarahkan pada hubungan sosial yang dangkal, sedangkan desa bercirikan kehidupan masyarakat dengan hubungan sosial yang mendalam. Kota merupakan jenis solidaritas sosial dan/atau organik yang sama, sedangkan desa merupakan jenis solidaritas sosial dan/atau mekanis yang sama. Pada tahun 1956, Worth melakukan penyelidikan tentang persamaan dan perbedaan antara daerah pedesaan dan perkotaan, tetapi ini bermasalah. Hasil penelitian mengungkapkan berbagai perbedaan terkait ukuran keluarga, kematian, pernikahan, etnis, pendidikan, dan lainnya. Ini adalah analisis variabel individu yang tidak saling terkait.

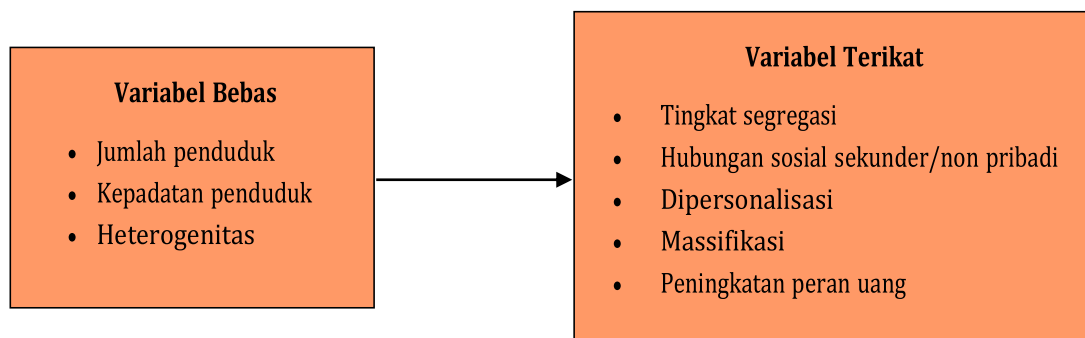
Perbedaan ini didasarkan pada tipologi dan keberadaannya berguna untuk tujuan analitis. Pada kenyataannya, tipologi jenis ini tidak sepenuhnya ada. Kritik lain terhadap pembatasan ini adalah bahwa daerah antara kota dan desa (daerah sekitar kota) telah

memudar. Akibatnya, dikotomi jenis ini banyak dikritik dan cenderung kurang bermanfaat. Selain itu, para ahli lebih cenderung mengembangkan tipologi yang kontinum.

1. Perbedaan Desa dan Kota

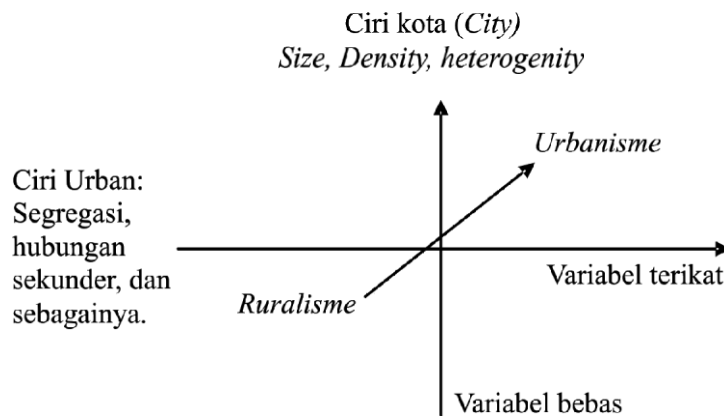
Menurut Wirth (dalam D. T. Kartono, 2010, pp. 8–10), ada tiga indikator penting untuk membedakan masyarakat pedesaan dan perkotaan. 2) Kepadatan atau kepadatan penduduk. (3) Heterogenitas atau keragaman penduduk dalam hal jenis pekerjaan atau perspektif lainnya. Ketiga indikator ini bersifat berkesinambungan dalam arti bahwa kualitas secara bertahap meningkat, daripada terjadi tanpa adanya pencapaian. Misalnya tidak ada kepadatan antara penduduk padat dan tidak padat (ini dikotomi), tetapi kepadatannya berangsur-angsur berubah dari 1 / m² menjadi 2 / m² menjadi 1000 / m² meningkat. Dengan kata lain, dalam kaitannya dengan ukuran, secara kualitatif dapat dikatakan bahwa densitasnya rendah, agak tinggi, dan sangat tinggi.

Lebih lanjut Wirth menjelaskan bahwa peningkatan indikator-indikator tersebut berkorelasi positif dengan perkembangan karakteristik perkotaan (metode kehidupan perkotaan). Wirth menjelaskan korelasi ini sebagai berikut: Namun, ada juga kebebasan yang lebih besar terkait dengan situasi kelompok seperti keluarga. Pada saat yang sama, peningkatan kepadatan penduduk menyebabkan pemisahan orang dan fungsi, termasuk pemisahan tempat tinggal dan pekerjaan. Peningkatan heterogenitas juga menyebabkan diferensiasi sosial, tidak adanya hierarki yang jelas dan sering berganti kelompok, sehingga tidak mungkin untuk melihat gambaran masyarakat secara keseluruhan. Hal ini disertai dengan gejala personalisasi (kehilangan kepribadian) dan popularisasi (pengumpulan massa), serta semakin pentingnya uang sebagai sarana umum dalam masyarakat. Wirth merekomendasikan menghubungkan variabel seperti:



Gambar 6.1 Korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat

Hubungan kedua variabel tersebut secara positif dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6.2. Hubungan variabel bebas (ciri rural) dengan variabel terikat (ciri urban)

Teori Worth dikritik oleh Redfield (1969), yang mempelajari desa Guatemala. Ternyata ada desa-desa (*impersonal*, *sekuler*, dll) di mana kehidupan stabil tetapi gaya hidup perkotaan berkembang dengan baik. Berdasarkan temuan ini, Redfield menyatakan bahwa konsep kontinum linier Worth hanya sesuai untuk *urbanisme primer* (*urbanisme dalam arti menempatkan penghuni perkotaan*) dan *urbanisme sekunder* (*karakteristik ontologis*). Dia mengkritik Worth, menyatakan bahwa itu tidak sesuai untuk *urbanisme* (*membahas tindakan dan ide*). *Urbanisasi dalam pengertian sekunder ini bersifat ambigu jika dikaitkan dengan urbanisme*. Jelas bahwa analisis Wirth tentang kontinum linier hanya cocok untuk variabel independen atau garis vertikal ketika diaktifkan oleh gambar di atas. Meskipun variabel terikat atau horizon tidak selalu berkembang dalam garis lurus. Selanjutnya, Redfield, Singer, dan McGee menyarankan untuk memperlakukan perkembangan bentuk-bentuk sekunder urbanisasi sebagai perubahan yang berkelanjutan setelah mencapai tahap urbanisasi. Perubahan tersebut dapat terjadi dengan cara yang berbeda dan membentuk kombinasi baru.

2. Persamaan Desa dan Kota: Sektor Formal dan Informal

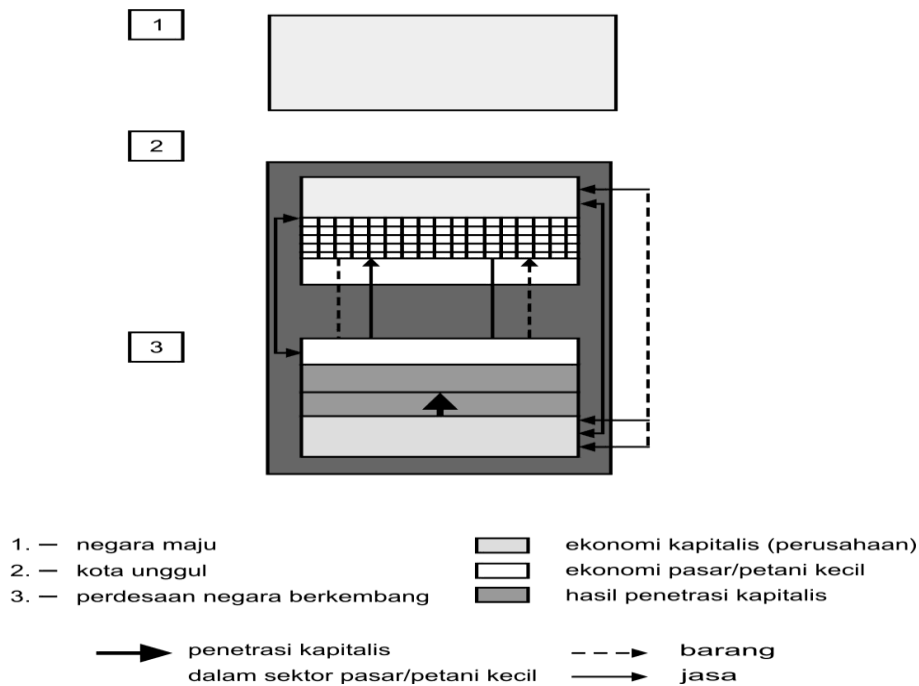
Kritik tajam terhadap konsep diferensiasi perkotaan, baik yang dikotomis maupun berkesinambungan, bermula dari gagasan untuk menyamakan wilayah pedesaan dan perkotaan. Kelompok ini menggunakan analisis ekonomi yang melihat desa, kota, bahkan negara bagian sebagai bagian dari perkembangan kapitalisme. Karakter dalam grup ini adalah McGee, Nas, Wirthheim dan Saskia Sassen. Analisis persamaan lokal dan perkotaan menargetkan orang-orang dari negara-negara Dunia Ketiga. Para pemimpin kelompok mengatakan bahwa perkembangan kapitalisme berada di antara dua sektor ekonomi (*dual circuit*), yaitu ekonomi formal (*sirkuit di atas kapitalisme*) dan bazaar atau ekonomi informal (*non-kapitalis atau sub-sirkuit*). itu membuat perbedaan. Perbedaan ini dapat membedakan negara-negara maju (AS, Eropa, Jepang, dll) sebagai sirkuit yang baik dan negara-negara Dunia Ketiga (termasuk Indonesia) sebagai sirkuit yang lebih rendah. Negara-negara Dunia Ketiga juga memiliki perekonomian formal (*kapitalis*), tetapi perekonomian tersebut hanyalah salah satu bentuk distribusi ekonomi modal dari negara-negara maju. Perekonomian ini memiliki kemampuan untuk campur tangan antara tingkat nasional atau sirkuit informal. Pembagian kedua ekonomi ini sama di kota dan negara. Berdasarkan analisis seperti itu, perbedaan antara daerah pedesaan dan perkotaan di negara-negara Dunia Ketiga tidak penting bagi mereka. Mereka setara. Keduanya merupakan ruang ekonomi dimana

terdapat ekonomi formal, ekonomi bazar, dan ekonomi campuran (intervensi kapitalisme eksternal).

Dalam kasus Santos (dalam D. T. Kartono, 2010), wilayah pedesaan dan perkotaan terdiri dari dua bagian, yang juga dikenal sebagai sektor formal dan informal. Karakteristik sektor formal atau kelas atas memiliki beberapa karakteristik yang menonjol yang berbeda dengan sektor informal. Adapun ciri sektor formal yaitu:

1. Kebanyakan diperdagangkan barang dalam jumlah besar dan mutu tinggi,
2. Investasi modal besar,
3. Teknologi tinggi,
4. Kesempatan kerja terbatas dan inelastis,
5. Ada sistem pembayaran upah kerja,
6. Sistem pemberian kredit sudah melembaga dan terutama diberikan bank,
7. Hubungan dengan langganan tidak langsung dan nonpribadi, umumnya, keuntungan pada setiap barang rendah akan tetapi menjadi tinggi karena jumlah barang yang diperdagangkan (omzet) besar, ketergantungan langsung pada faktor-faktor yang berada di luar perusahaan adalah besar.

Sedangkan ciri di dalam sektor informal, adalah jumlah barang sedikit dan mutunya rendah, modal sangat terbatas atau negatif, masih menggunakan teknik tradisional, kesempatan kerja elastis terdapat banyak tenaga kerja yang tidak diberi upah seperti anggota keluarga, pemberian kredit terjadi secara pribadi, hubungan dengan pembeli secara langsung dan pribadi, sering kali keuntungan tinggi pada setiap kesatuan, dan ketergantungan pada faktor faktor ekstern adalah ringan. Selanjutnya, menurut (dalam D. T. Kartono, 2010), model di bidang sosial ekonomi kota unggul di Asia menegaskan hubungan antara sektor formal dan informal. Menurut model ini (lihat gambar di bawah), kota unggul merupakan bagian dari sistem yang terdiri dari dua tipe ekonomi, yaitu ekonomi kapitalis dengan perusahaan sebagai kesatuan produksi, dan ekonomi pasar (bazaar economy), serta ekonomi petani kecil (peasant economy) dengan suatu cara produksi di mana hubungan keluarga memegang peranan penting. Ada dua jenis produksi di kota yang baik. Ada pertukaran barang dan jasa antara bagian kapitalis dari kota-kota atas dan negara-negara maju. Cara produksi kapitalis memasuki ekonomi pasar kota yang baik. Metode ini juga relevan untuk daerah pedesaan di negara berkembang dan meresap dalam ekonomi pasar. Ekonomi pasar lokal dan metropolitan juga memiliki hubungan yang relevan.



Gambar 6.3 Pola Sosio-Ekonomi Kota Unggul

McGee mencoba menjelaskan berfungsinya kota yang baik di suatu wilayah. Dari sisi ekonomi, kota dikatakan mampu menciptakan lapangan kerja, namun terutama di sektor pemerintahan dan pasar, bukan sektor kapitalis yang mengutamakan modal. Ini menciptakan struktur masyarakat yang tidak mendorong perubahan. Secara politik, elit berada dalam posisi dualistik. Sementara kita harus mengembangkan rencana pembangunan di seluruh negeri yang berakar kuat di pasar dan ekonomi petani, kita memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sektor kapitalis yang tidak mendukung pembangunan ini. Akibat hubungan yang saling bertentangan tersebut, banyak perubahan yang sebenarnya diperlukan untuk kepentingan nasional, seperti land reform, tidak dapat dilaksanakan.

Melalui model ini, masalah adaptasi masyarakat terhadap kota dalam bidang sosial budaya, model perkotaan yang baik sangat membantu dalam menjelaskannya. Penduduk lokal yang bekerja di sektor kapitalis juga memasuki sektor ini ketika mereka datang ke kota. Itu tidak membawa banyak kesulitan dalam koordinasi mereka. Bahkan orang-orang dari sektor pasar biasanya memasuki sektor ini di kota tanpa masalah. Oleh karena itu, tidak ada anomie atau kejahatan di kota-kota Dunia Ketiga, seperti yang sering terjadi di kota-kota Dunia Ketiga, tergantung pada kekuatan sektor pasar. Jika sangat kuat, perubahan yang diharapkan akan kecil. Selain itu, perubahan yang terjadi bergantung pada proses perubahan di tingkat nasional. Jelas bahwa perbedaan antara sektor-sektor ini merupakan kritik penting terhadap konsep kontinum pedesaan dan perkotaan. Hal ini tidak hanya mengungkapkan bahwa penataan fitur budaya berbeda antara titik awal dan akhir, tetapi kota dan desa pada dasarnya tidak dapat dianggap sebagai satu kesatuan.

Perbedaan antara sektor formal dan informal memiliki implikasi praktis yang penting bagi proses pembangunan dan bagaimana pengaruhnya terhadapnya. Untuk waktu yang lama, semua perhatian diarahkan ke sektor formal, tetapi sektor informal diabaikan. Proses pembangunan diharapkan dapat dimulai dengan memanfaatkan modal

dan pengetahuan untuk mendorong sektor formal agar dapat dengan cepat mengatasi fase transisi. Tapi harapan ini terhambat oleh kenyataan. Pembangunan ternyata berjalan lambat, dan dorongan semacam itu juga memperlebar jurang antara daerah kaya dan miskin. Akibatnya, banyak sarjana yang lebih memperhatikan masyarakat miskin dan sektor informal yang menyediakan mata pencaharian bagi kelompok-kelompok ini. Oleh karena itu, memang benar bahwa sektor informal seolah-olah diciptakan oleh para sarjana dan pejabat pemerintah. Sektor ini perlu penelitian intensif dan tidak diperlakukan negatif (misalnya dengan menghilangkan, menghilangkan, atau mengurangi perdagangan dan transportasi di sektor informal seperti pedagang kaki lima dan becak). Tetapi ini tidak boleh mengarah pada sikap sepihak lainnya. Oleh karena itu, harapan untuk sektor informal saja tidak memuaskan terhadap hasil upaya pembangunan.

3. Persamaan Desa dan Kota: Pusat dan Pinggiran

Kelompok lain yang melakukan analisis serupa adalah Kelompok Ekonomi Pembangunan yang memiliki paradigma subordinat, terutama Dos Santos, A.G. Kelompok Amerika Latin seperti Frank dll. Tetapi mereka membuat perbedaan antara negara pusat dan negara peri-peri. Upaya untuk melihat istilah kota dan negara sebagai ekspresi khusus untuk istilah perimeter pusat juga mengarah pada pola analisis yang lebih kompleks. Sementara istilah kota dan negara digunakan terutama sebagai istilah geografis, istilah pusat dan batas dirumuskan secara lebih abstrak sehubungan dengan kekuatan dan ketergantungan sosial, ekonomi dan politik.

Menurut Husken dan Nas (dalam D. T. Kartono, 2010, p. 16), perbedaan ini menimbulkan dua keuntungan. Pertama, dugaan dan halhal yang dianggap berhubungan dengan pengertian kota dan perdesaan dapat lebih mudah ditinggalkan jika di sampingnya itu pengertian pusat dan pinggiran dapat dipergunakan untuk tingkat yang lebih tinggi. Kedua, dengan dipakainya pengertian pusat dan pinggiran, dapatlah orang mengadakan analisis pada beberapa tingkat, yaitu tidak hanya pada tingkat daerah, melainkan pula pada tingkat nasional bahkan internasional. Untuk memudahkan analisis tentang pusatpinggiran maka dalam modul ini akan dipelajari tiga hal untuk memudahkan proses pembelajaran, yaitu pembuatan klasifikasi untuk teoriteori yang berhubungan dengan masalah itu, membahas persoalan tentang perlunya kota itu sebagai pusat dan pemberian contoh penggunaan pusat pinggiran.

a. Klasifikasi Teori

Dalam pembuatan klasifikasi untuk teori-teori dibagi menjadi empat kategori, yaitu pola integrasi kota dan pedalaman, pola pertentangan kota dan pedalaman, pola integrasi pusat dan pinggiran, dan pola pertentangan pusat dan pinggiran. Dalam pola integrasi kota dan pedalaman disusun berturut-turut teori-teori antropologi yang menegaskan saling ketergantungan (interdependensi) fungsional antara kota dan pedalaman. Karena ada surplus perdesaan, dapat timbul kota yang dihuni oleh golongan pujangga (literati) sebagai pengemban warisan yang agung (great tradition). Dengan demikian saling ketergantungan itu terdiri dari ketergantungan ekonomi di kota dan ketergantungan kebudayaan di perdesaan. Hal ini juga berlaku bagi pola integrasi pusat-pinggiran yang berpangkal tolak dari saling ketergantungan semacam itu. Akan tetapi kurang diberi tekanan kepada kota sebagai kesatuan dalam ruang. Analisisnya terutama ditujukan kepada golongan elite dan penyebaran proses peradaban dari atas ke arah dasar, sistem masyarakat maupun ke pinggiran.

Husken dan Nas menempatkan teori Marx dan Engels yang menyebut bahwa perbedaan antara kota dan perdesaan menimbulkan keterasingan sebagai peneropongan khusus terhadap perbedaan antara pekerjaan otak dan pekerjaan tangan dalam rangka pola pertentangan antara kota dan perdesaan. Dalam pola pertentangan pusat pinggiran termasuk teori- teori mengenai imperialisme bahwa perkembangan pusat yang juga disebut metropol, merugikan perkembangan pinggiran, yang juga disebut satelit. Selanjutnya, pemerasan pada tingkat nasional ini dilanjutkan pada tingkat internasional antara pusat nasional (metropol) dan daerah-daerah pinggiran (satelit).

b. Perlunya Kota Sebagai Pusat

Kota sebagai pusat masih menyisakan banyak pertanyaan dan masalah. Untuk pusat kota, asumsi barat adalah bahwa kekuatan selalu tampak terkonsentrasi di kota dan pembaruan selalu meluas dari kota. Bagi negara berkembang, pusat kota dapat disebabkan oleh proses internal dalam masyarakat atau dipengaruhi oleh Barat. Penjelasan yang mungkin untuk munculnya kota sebagai pusat negara berkembang adalah kondisi untuk menyedot surplus pertanian ke kota. Sebelum Revolusi Industri, beberapa produk pertanian digunakan untuk kepentingan penduduk kota, tetapi kota tidak memiliki banyak produksi untuk diberikan kepada pedesaan sebagai imbalannya.

Adanya pelembagaan pengelolaan ketenagalistrikan untuk memperoleh surplus merupakan bagian dari proses pembentukan kota. Pada hari-hari awal keberadaan industri, bahkan perlu untuk menyerap surplus untuk mendanai industri kota yang sedang berkembang. Tentu saja beban ini menimbulkan ketegangan antara kota dan desa. Sejauh mana ketegangan-ketegangan ini berperan dalam kebijakan pembangunan dan kelompok-kelompok mana yang memiliki pengaruh perlu mendapat pertimbangan yang lebih rinci dan umumnya tidak cukup untuk menjelaskannya.

c. Contoh Penggunaan Pusat-Pinggiran

Husken dan Nas menunjukkan bahwa ada dua komponen keseimbangan kekuasaan dalam hubungan antara pusat dan pinggiran. Artinya, proses di mana pusat mendominasi perimeter dan proses komunikasi di dalam perimeter yang cenderung menciptakan gerakan menuju pusat. Tiga jenis perantara dapat berperan dalam proses ini. Mereka adalah makelar yang mewakili pusat kota, pengendali yang mewakili pusat pedesaan, dan perantara yang relatif independen. Peran ini ditampilkan dengan pola batas tengah. Tetapi untuk lebih jelasnya dapat dilakukan dengan mengadakan penelitian tentang peranan mereka dalam tahap pembangunan yang berhubungan dengan pusat-pinggiran.

Penelitian yang dilakukan oleh Husken dan Nas adalah menjelaskan gejala kesukuan. Masalah kesukuan ini digunakan lambanglambang kebudayaan dalam perebutan kekuasaan antara kelompokkelompok yang bertentangan di bidang politik. Gerakan tradisional yang mau memisahkan diri maka akan terjadi gerakan kembali ke desa (pedalaman) dan menarik diri dari pusat. Akan tetapi, pola pusatpinggiran kesukuan ini dapat ditarik dalam dua hal yaitu gerakan dari pinggiran melawan pusat atau manipulasi pinggiran oleh pusat. Apabila ada gerakan melawan pusat, tidak terdapat tradisionalisme atau separatisme, melainkan mekanisme penyesuaian pertama pada proses politik oleh golongangolongan yang sampai sekarang tidak memiliki kedudukan dalam kekuasaan.

BAB VII

KAJIAN TEORI SOSIOLOGI DALAM ASPEK STRUKTUR SOSIAL PEDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Materi pada Bab VII ini menguraikan tentang kajian teori sosiologi dalam aspek struktur sosial pedesaan dan perkotaan yang terdiri dari: (1) proses dan interaksi sosial; (2) stratifikasi sosial; (3) keluarga dan sistem kekerabatan; (4) perubahan sosial; (5) lembaga sosial.

2. Manfaat Perkuliahan

Diharapkan setelah membaca Bab ini mahasiswa dapat memahami tentang struktur sosial desa dan kota khususnya di Indonesia.

3. Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kajian teori sosiologi dalam aspek struktur sosial pedesaan dan perkotaan dan dapat menganalisis berbagai jenis kajian teori sosial yang terdapat di pedesaan dan perkotaan dengan menggunakan teori proses interaksi sosial, stratifikasi sosial, keluarga dan sistem kekerabatan, perubahan sosial dan institusi sosial di ranah pedesaan dan perkotaan khususnya di Indonesia.

B. Materi

Pada bagian ini, penulis mendemonstrasikan dari berbagai pendekatan penelitian teori sosiologi yang membantu mahasiswa dalam menganalisis masalah yang terjadi di pedesaan dan perkotaan. Saya mencoba menjelaskan keterkaitan antara realitas. Tentu saja, kita perlu memperhitungkan masalah yang dipelajari akan membantu kita memahami teori tersebut. Setelah memahami sifat masalah yang biasa terjadi dalam kehidupan sosial, terutama di pedesaan dan perkotaan, studi teoritis dapat dengan mudah digunakan atau dipahami untuk menganalisis masalah tersebut. Fenomena sosial yang terjadi di pedesaan dan perkotaan nampaknya sangat menarik untuk dibahas, karena memiliki berbagai permasalahan dalam kajian ilmu-ilmu sosial. Secara khusus, sosiologi merupakan studi interdisipliner, sehingga memungkinkan untuk membahas semua aspek masalah yang muncul di ranah masyarakat pedesaan dan perkotaan. Ini tentu saja didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah. Hal terpenting dalam mempertimbangkan fenomena sosial di pedesaan dan perkotaan adalah mengkaji teori struktur sosial.

Pada dasarnya, struktur sosial dibagi menjadi dua bagian. Artinya, (1) struktur sosial yang statis berkaitan dengan bagaimana masyarakat terbentuk secara vertikal dan horizontal. Vertikal berupa kepemilikan tanah, kepemilikan ternak, kebaktian keagamaan, dan stratifikasi sosial kepemilikan tanah. Sedangkan horizontal berbentuk kelompok sosial tertentu (kelompok ternak) dan komunitas emosional. (2) Struktur sosial yang dinamis, yaitu pola-pola hubungan yang terorganisir. Secara umum, struktur sosial pedesaan merupakan struktur sosial yang sederhana. Karena sebagian besar

kehidupan mereka sama atau seragam, kegiatan pedesaan mereka (kegiatan masyarakat) terbatas pada mempertahankan kehidupan dan memenuhi kebutuhan subsistem mereka. Oleh karena itu, kami tidak ingin mengambil risiko yang lebih besar sehubungan dengan persyaratan subsistem. Berbeda dengan masyarakat perkotaan yang memiliki sistem sosial yang heterogen dan beragam, ruang gerak masyarakat perkotaan lebih cenderung dinamis dengan pergerakan dan perubahan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti sistem.

1. Proses Interaksi Sosial

A. Pengertian Interaksi Sosial

Pada dasarnya interaksi sosial merupakan inti dari semua kehidupan sosial dan tidak dapat hidup berdampingan tanpa adanya interaksi sosial. George Simmel, seorang sosiolog yang mengatakan bahwa masyarakat ada ketika ada interaksi antar individu dalam masyarakat. Pertemuan individu dengan orang-orang tidak menciptakan kehidupan sosial dalam kelompok sosial. Komunitas kehidupan ini hanya terwujud ketika setiap individu dalam kelompok manusia bekerjasama, berdiskusi, mencapai tujuan bersama, dan menciptakan persaingan, pertengkar, dan sebagainya. Dengan cara ini, interaksi sosial adalah dasar dari proses sosial dan mengacu pada hubungan yang dinamis.

Menurut HM Arifin Arifin (Jamaludin, 2015a, pp. 55–56), interaksi sosial adalah suatu bentuk hubungan antara dua orang atau lebih yang perilakunya diubah oleh perilaku orang lain yang dapat didefinisikan. Melalui dorongan dan reaksi hubungan interpersonal, orang-orang interpersonal biologis perlahan berubah menjadi makhluk hidup. Proses berinteraksi, masing-masing berfungsi sepanjang proses, mempengaruhi proses lain dan mempengaruhi proses lainnya. WA Gerungan mendefinisikan interaksi sosial sebagai hubungan antara dua orang atau lebih yang perilakunya mempengaruhi individu lain dan sebaliknya. Definisi ini mewakili hubungan timbal balik yang berkelanjutan antara dua orang atau lebih. Dalam hal ini, jelas bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, manusia adalah makhluk sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pengertian ini, manusia mengerahkan karakter sosialnya melalui interaksi sosial, sehingga titik tolaknya adalah manusia sebagai individu yang berinteraksi.

Dari kedua pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa interaksi sosial adalah suatu pola interaksi antar individu, antar individu dengan kelompok, atau antar kelompok dalam suatu komunitas dan saling mempengaruhi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia adalah satu sama lain (interaksi sosial). Ia selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga kepribadian, kemampuan, dan karakteristik aktivitasnya menjadi kepribadian yang sejati hanya jika sistem psikofisiknya relevan dengan lingkungannya.

Dalam interaksi sosial, orang memiliki dua fungsi. Artinya, sebagai aset dan objek yang besar bagi orang-orang karena dapat mempengaruhi subjek. Ini sebenarnya sebuah langkah dalam kehidupan sosial. Jika manusia hanyalah benda, nyawanya tidak bisa lebih tinggi dari benda mati. Sebaliknya, manusia tidak dapat hidup dalam masyarakat jika menjadi sasaran, sebagaimana sosialisasi dapat terjadi jika ada saling memberi dan menerima dari seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, jelas bahwa kehidupan individu dan regional tidak dapat dipisahkan dan selalu dapat berinteraksi satu sama lain.

B. Faktor-Faktor Penyebab Interaksi Sosial

Pertama, imitasi yang meniru perilaku dan perilaku manusia. Ini karena sejak bayi terus berkembang dengan keluarga mereka, sehingga lingkungan yang berdekatan berkembang menjadi asosiasi sosial yang lebih luas. Proses imitasi mungkin positif untuk mempertahankan standar dan nilai yang diterapkan pada masyarakat. Imitasi juga bisa berdampak negatif. Dengan kata lain, menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat dan meniru perilaku buruk sehingga menghambat kebiasaan orang untuk berpikir kritis.

Kedua, sugesti, yaitu rangsangan, efek, atau rangsangan yang diberikan satu sama lain untuk mengikuti atau melaksanakan sugesti tanpa pertimbangan ulang yang kritis dan rasional oleh penerima. Proposal terjadi atau terjadi ketika seseorang mengungkapkan pandangan dan sikapnya sendiri dan diterima oleh orang lain. Karena orang yang mengungkapkan pendapat bisa menjadi otoriter, otoriter, atau orang yang sangat berpengaruh, penerima diliputi oleh emosi, hambatan kemampuan berpikir secara wajar. Bentuk sugesti dapat berupa sikap atau bentuk tindakan seperti tindakan, pendapat, saran, pertanyaan, dan lain-lain. Usulan dan imitasi dalam hal interaksi sosial hampir sama. Bedanya peniruan dan peniruan dilakukan dengan mengejar sesuatu yang lain, sedangkan sugesti adalah pandangan dan sikap orang yang mempengaruhi orang lain dan sebaliknya.

Ketiga, identifikasi. Ini adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Proses identifikasi dapat terjadi tanpa disadari atau disengaja dengan sendirinya, karena seseorang memberikan teladan yang ideal dalam hidupnya. Sikap, keyakinan, atau tindakan seseorang sangat menginspirasi bagi yang mengenali dan mengikutinya. Ada hubungan yang erat antara diskriminator dan diskriminator. Identifikasi yang sedang berlangsung memiliki makna yang lebih dalam daripada proses peniruan dan pengusulan, namun tidak menutup kemungkinan proses identifikasi tersebut pertama kali diprakarsai oleh proses imitasi dan sugesti.

Keempat, simpati, yaitu perasaan tertarik pada orang lain. Simpati tidak didasarkan pada alasan rasional, tetapi pada penilaian perasaan seseorang yang tiba-tiba tertarik pada orang lain. Simpati adalah proses membuat seseorang merasa tertarik pada orang lain. Emosi memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini. Kekuatan pendorong utama simpati adalah keinginan untuk memahami dan bekerjasama dengan orang lain. Anda tiba-tiba menemukan bahwa satu orang tertarik pada orang lain. Daya tarik tidak disebabkan oleh sifat-sifat tertentu, tetapi oleh keseluruhan cara seseorang bertindak dan bertindak. Kerjasama lahir dalam proses saling empati. Dalam proses preferensi, dorongan utama ingin memahami dan bekerjasama dengan orang lain, tetapi dalam identifikasi, dorongan utama adalah mengikuti jejak mereka, meniru, dan belajar dari mereka yang dianggap ideal. Jadi, dalam proses simpati, orang berniat untuk bekerjasama, sedangkan dalam identifikasi, orang berniat untuk belajar.

C. Syarat Terjadinya Interaksi Sosial

Interaksi sosial tidak akan terjadi apabila tidak memenuhi atau tidak mempunyai dua syarat, yaitu sebagai berikut (Jamaludin, 2015a, pp. 58–59):

1. Kontak Sosial

Kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan fisik. Meskipun demikian, orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa menyentuhnya. Kontak sosial dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu: (a) kontak antar individu, (b) kontak antara

individu dengan kelompok, dan sebaliknya. (c) Kontak antara kelompok dengan kelompok lain. Kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif. Kontak positif akan mengarah pada kerja sama, sedangkan yang bersifat negatif akan mengarah pada pertentangan. Kontak sosial juga dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kontak sekunder langsung, yaitu kontak yang terjadi kontak primer. Kontak ini terjadi apabila seseorang mengadakan hubungan langsung atau bertatap muka dengan orang lain;
2. Kontak sekunder tidak langsung, yaitu kontak yang dilakukan melalui perantara. Kontak ini mencakup (a) kontak dua pihak dengan cara tertentu, (b) kontak sekunder tidak langsung, dan kontak dengan pihak lain.

2. Komunikasi

Komunikasi berasal dari bahasa latin yaitu *comminicare*. Artinya terlibat. Komunikasi berarti mengirim atau menerima pesan atau pesan antara dua orang atau lebih sehingga mereka dapat menyelidiki dan memahami pesan yang dimaksud. Komunikasi tidak selalu mengarah pada kerjasama, tetapi juga dapat menimbulkan konflik melalui kesalahpahaman dan kurangnya pengendalian diri. Oleh karena itu, kontak dan komunikasi sangat penting untuk mencapai interaksi sosial yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

D. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Jamaludin, 2015a, pp. 59–64), proses interaksi sosial terdapat dua bentuk, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif.

- a. Proses asosiatif, yaitu proses yang cenderung untuk bersatu serta meningkatnya rasa solidaritas anggota kelompok. Proses ini meliputi sebagai berikut.
 - 1) Kerja sama
Beberapa sosiolog menganggap kerjasama sebagai bentuk utama dari interaksi sosial. Yang lain melihat kolaborasi sebagai proses utama. Dengan bekerjasama, kelompok ini memahami sebagian besar bentuk interaksi sosial berdasarkan kemampuan untuk mereduksi segala bentuk interaksi menjadi kerjasama. Dalam hal ini kerjasama dimaksudkan sebagai usaha bersama oleh orang-orang atau sekelompok orang untuk mencapai satu atau lebih tujuan bersama.
 - 2) Akomodasi
Istilah akomodasi dipergunakan dalam dua arti, yaitu menunjuk pada keadaan dan proses. Akomodasi yang menunjuk pada suatu keadaan, berarti adanya suatu keseimbangan (ekuilibrium) dalam interaksi antara orang per seorangan atau kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma sosial dan nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Sebagai suatu proses, akomodasi menunjuk pada usaha manusia untuk meredakan pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya.
 - 3) Asimilasi
Asimilasi adalah proses sosial yang maju. Asimilasi ditandai dengan upaya untuk mengurangi perbedaan yang ada antara individu atau kelompok orang, dan melibatkan upaya untuk meningkatkan kesatuan perilaku, sikap, dan proses mental, dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama.
- b. Proses disosiatif, sering disebut sebagai proses oposisi, ditemukan di semua masyarakat serta kerja sama, dan bentuk serta arahnya ditentukan oleh budaya

dan sistem sosial masing-masing masyarakat. Proses disosiasi dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

1) Persaingan (*competition*)

Menurut Hasan Shadily, persaingan adalah proses menunjukkan dampak konflik antar individu atau kelompok dalam mengejar tujuan.

2) Kontroversi (*controvertion*)

Kontroversi pada hakekatnya merupakan bentuk persaingan dan konflik atau proses sosial yang terjadi antar konflik. Pelanggaran ditandai dengan tanda-tanda kecemasan tentang diri sendiri, atau rencana emosional yang tersembunyi dari kebencian, kebencian, atau kecurigaan terhadap kepribadian seseorang. Dalam bentuk murni, adat adalah sikap spiritual yang tersembunyi terhadap unsur-unsur budaya orang lain atau kelompok tertentu. Sikap tersembunyi ini bisa berubah menjadi kebencian, tetapi itu bukan titik konflik atau konflik.

3) Pertentangan atau pertikaian (*conflict*)

Individu atau kelompok dapat mengenali perbedaan dari pihak lain dan mengubah perbedaan tersebut menjadi konflik atau konflik, dengan masing-masing pihak berusaha untuk saling menghancurkan. Sebab-sebab terjadinya perselisihan atau perselisihan adalah sebagai berikut:

- a) Perbedaan antar individu. Perbedaan pendapat dan perasaan dapat menimbulkan diskusi di antara mereka.
- b) Perbedaan budaya. Perbedaan kepribadian individu juga tergantung pada pola budaya yang melatarbelakangi terbentuknya dan berkembangnya kepribadian tersebut.
- c) Perbedaan kepentingan.
- d) Perubahan sosial yang cepat untuk sementara mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

2. Stratifikasi Sosial

A. Pengertian Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas hierarkis, yang bentuknya adalah kelas atas dan kelas bawah. Soejono Soekanto mengatakan siapa saja yang memiliki begitu banyak barang berharga seperti barang, uang, dan ternak dianggap masyarakat kelas atas. Bagi mereka yang memiliki nilai kecil, mereka tidak memiliki status sosial.

Stratifikasi sosial di dalam kehidupan masyarakat cukup beragam. Namun, pada prinsipnya, berbagai bentuk tersebut dapat diklasifikasikan atas tiga macam kelas (Narwoko & Suyanto, 2007), yakni:

1. Kelas yang didasarkan pada faktor ekonomis, misalnya kekayaan.
2. Kelas yang didasarkan pada faktor politis, misalnya kekuasaan.
3. Kelas yang didasarkan pada jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat.

Landasan stratifikasi sosial dalam masyarakat tidak lain adalah adanya nilai-nilai yang lebih tinggi seperti kekayaan, kekuasaan, kehormatan, pengetahuan dan silsilah. Siapa pun yang menghargai sesuatu berada di kelas atas. Sebaliknya, jika seseorang

memiliki nilai yang sedikit atau tidak sama sekali, orang tersebut ditempatkan pada tingkat yang paling rendah.

1. *Kekayaan*

Menurut Max Weber, *properti* (atau kekayaan) sangat penting dalam menentukan posisi seseorang dalam hierarki sosial masyarakat. Siapa pun yang memiliki kekayaan paling kaya (dalam bentuk kepemilikan barang berharga atau aset produktif) akan menempati tingkat tertinggi. Memang kekayaan ini bisa dilihat dari bentuk rumah, jenis kendaraan pribadi, gaya pakaian dan jenis bahan yang digunakan, kebiasaan dan kebiasaan berbelanja.

2. *Kekuasaan*

Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan orang lain, tetapi kadang-kadang bertentangan dengan keinginan mereka. Kekuasaan bisa datang dari kepemilikan. Orang kaya biasanya memiliki kekuatan untuk membuat banyak keputusan. Kekuasaan juga bisa diwariskan. Dalam masyarakat feodal, bahkan simbolis, keturunan aristokrat masih berkuasa. Kekuasaan juga dapat berasal dari legitimasi publik, dan anggota masyarakat memutuskan untuk menunjuk secara langsung seorang penguasa (atau pemimpin) yang percaya bahwa mereka dapat melindungi kepentingan mereka. Siapapun yang memiliki kekuasaan atau otoritas terbesar akan menduduki posisi tinggi dalam masyarakat (Setiadi, 2011).

3. *Kehormatan*

Orang yang dihormati dan disegani diberi tempat pertama dalam sistem stratifikasi sosial. Jenis ukuran ini biasanya ditemukan dalam masyarakat tradisional. Misalnya, orang tua dan orang dianggap cocok atau berpengalaman dalam masyarakat dan kelompoknya. Tingkat kehormatan biasanya tidak tergantung pada tingkat kekayaan dan kekuasaan (Setiadi, 2011).

4. *Ilmu pengetahuan*

Sains dijadikan sebagai salah satu atau dasar pembentukan kelas sosial dalam masyarakat yang berorientasi pada sains. Dalam masyarakat dengan ilmu pengetahuan dan budaya, individu yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga jenjang tertinggi (S3) atau bergelar profesor sangat dihargai dan ditempatkan pada jenjang tertinggi. Di sisi lain, mereka yang tidak bisa membaca dan menulis atau tidak menyelesaikan pendidikan dasar berada di urutan terbawah.

5. *Keturunan*

Dalam masyarakat feodal, anggota masyarakat yang berasal dari keluarga kerajaan dan bangsawan menempati lapisan atas. Sedangkan keturunan rakyat jelata berada dalam formasi (Setiadi, 2011).

B. Karakteristik dan Bentuk Stratifikasi Sosial

Secara rinci, terdapat tiga aspek yang merupakan karakteristik stratifikasi sosial yakni:

a. *Adanya perbedaan dalam kemampuan dan kesanggupan*

Anggota masyarakat yang menduduki lapisan lebih tinggi tentunya memiliki kesanggupan dan kemampuan lebih besar dibanding anggota masyarakat pada lapisan di bawahnya.

b. *Adanya perbedaan gaya hidup*

Anggota masyarakat yang menduduki lapisan lebih tinggi biasanya mengembangkan gaya hidup (*lifestyle*) sebagai pembeda dengan lapisan di bawahnya.

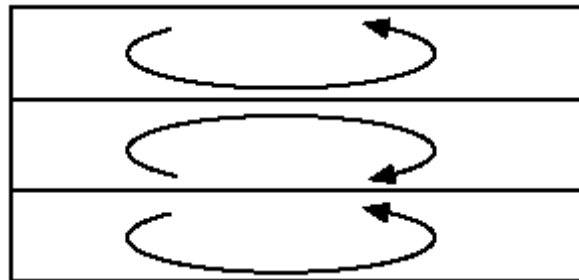
c. *Adanya perbedaan hak dan akses dalam memanfaatkan sumber daya*

Seseorang yang menduduki lapisan tinggi biasanya akan memiliki hak dan akses lebih luas terhadap beragam fasilitas atau sumber daya dibanding lapisan di bawahnya.

Menurut Soerjono Soekanto (2004), ditilik dari sifatnya, stratifikasi sosial dapat dibedakan atas beberapa bentuk:

a. Stratifikasi sosial tertutup (*closed social stratification*)

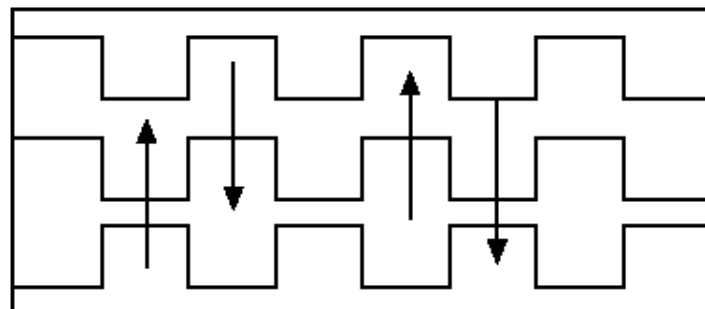
Sistem pelapisan sosial tertutup membatasi kemungkinan seseorang untuk pindah dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik lapisan atas ataupun bawah. Di dalam sistem pelapisan yang demikian itu, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota atau warga suatu pelapisan tertentu hanyalah melalui kelahiran. Ini misalnya ditemui pada masyarakat India yang masih menganut sistem kasta.



Gambar 7.1. Stratifikasi sosial tertutup

b. Stratifikasi sosial terbuka (*opened social stratification*)

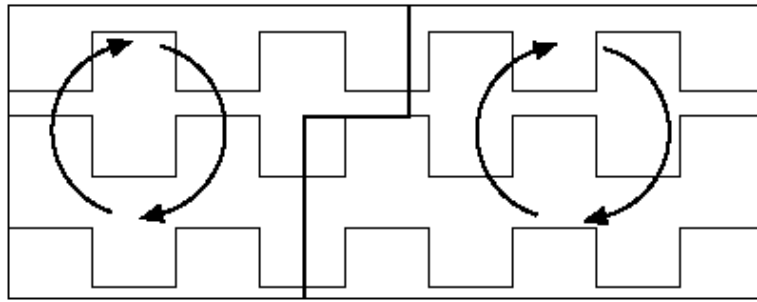
Pada sistem pelapisan sosial yang terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk naik ke pelapisan sosial yang lebih tinggi karena kemampuan dan kecakapannya sendiri. Atau bisa juga turun (jatuh) ke pelapisan yang lebih rendah bagi mereka yang tidak cakap dan tak beruntung.



Gambar 7.2. Stratifikasi sosial terbuka

c. Stratifikasi sosial campuran

Perpaduan antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Untuk berpindah lapisan sosial, individu harus pindah ke daerah yang pelapisan sosialnya bersifat terbuka. Misalnya, bila seorang anggota kasta Sudra tetap bertahan di masyarakat yang menganut sistem kasta, maka ia takkan pernah bisa memperoleh kedudukan terhormat. Oleh sebab itu, satu-satunya cara untuk mengubah status adalah dengan pindah ke masyarakat lain yang tidak mengenal kasta.



Gambar 7.3. Stratifikasi sosial campuran

Menurut Soerjono Soekanto stratifikasi sosial dapat membantu memecahkan berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat, dengan menempatkan individu pada posisi-posisi yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban sesuai kedudukan dan peranannya.

C. Fungsi Stratifikasi Sosial

Fungsi stratifikasi sosial dalam masyarakat dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a) Distribusi obyektif dari hak-hak istimewa seperti pendapatan, kekayaan, dan keputusan otoritas. Keberadaan kelas sosial memfasilitasi pemberian hak istimewa. Orang-orang kelas atas tentu memiliki hak untuk mendapatkan lebih banyak keistimewaan daripada orang-orang kelas bawah.
- b) Menentukan status atau simbol. Ada simbol-simbol tertentu yang sengaja digunakan untuk menunjukkan lokasi. Benda-benda seperti mobil mewah, jam tangan berlapis emas, kemeja sutra, atau hobi tertentu seperti menyelam atau golf harus dipahami dengan jelas sebagai simbol barang mewah.
- c) Penjelasan tingkat kesulitan saat mengubah posisi. Dengan memeriksa bentuk-bentuk utama stratifikasi (tertutup, terbuka, atau campuran), individu dapat berpindah lapisan atau melakukan apa yang perlu mereka lakukan untuk meningkatkan posisi mereka.
- d) Sebagai sarana mempererat solidaritas antar individu atau kelompok yang menempati kelas sosial yang sama dalam masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena perasaan bahwa nasib dan tujuan bersama.

Selain dalam stratifikasi, keragaman mewujud pula pada diferensiasi sosial, yakni klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan yang biasanya sama

3. Keluarga dan Sistem Keekerabatan

A. Pengertian Sistem Keekerabatan

Dalam bahasa Inggris, kerabat disebut *kinship*. Keekerabatan dalam bahasanya adalah "hubungan darah", artinya kerabat adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Dalam kalimat ini, hubungan genetik antara orang tua dan anak adalah keekerabatan utama. Definisi yang hampir sama diberikan dalam kamus-kamus antropologi, yang menyatakan bahwa orang tua adalah orang-orang yang hubungan darahnya disebut dan/atau disebut dengan istilah keekerabatan.

Levi-Strauss mengatakan bahwa setidaknya ada tiga alasan mengapa seseorang disebut sebagai orang tua, yaitu orang tua berdasarkan hubungan darah, orang tua berdasarkan hubungan perkawinan, dan orang tua berdasarkan hubungan genetik. Relatif menurut hubungan darah, yaitu hubungan kekerabatan karena hubungan antara individu dengan saudara-saudaranya yang berupa hubungan darah. Kekerabatan perkawinan adalah hubungan antara individu dengan pasangannya berupa hubungan perkawinan yang mengikat saudara kandung seseorang dengan saudara kandung pasangannya. Sedangkan kekerabatan garis keturunan adalah hubungan individu dengan anak-anaknya, yang bersifat turun temurun.

Bentuk atau sistem kelompok kekerabatan yang banyak ditemukan dalam literatur antropologi adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga inti (*nuclearfamily*), terdiri atas orangtua dan anak-anak yang masih bergantung. Keluarga inti adalah jenis kelompok kekerabatan yang ada dan dikenal oleh semua orang di dunia. Sebuah keluarga inti terdiri dari suami, istri dan anak-anak mereka yang belum menikah.
- b. Keluarga besar (*extended family*), keluarga besar adalah kumpulan keluarga inti, yang berhubungan darah dan hidup bersama. Kelompok kekerabatan ini mencakup lebih dari satu keluarga inti, tetapi semuanya merupakan unit sosial yang sangat dekat dan sering tinggal dan melakukan aktivitas di tempat yang sama, yaitu di dalam satu rumah atau pada satu pekarangan.
- c. Kindred, yaitu suatu kesatuan kerabat yang mengelilingi seseorang melakukan kegiatan, baik berupa pertemuan, ritual atau upacara yang diadakan pada tingkat siklus hidup (*life-cycle*).
- d. Keluarga ambilineal, merupakan kelompok kekerabatan perusahaan (*company kinship group*). Kelompok kekerabatan ini muncul ketika sebuah keluarga besar bukan penduduk memperoleh kepribadian yang diakui oleh warganya, tidak hanya selama hidup mereka, tetapi dianggap telah ada selama dua atau tiga generasi sistem di masa lalu. Kelompok ini biasanya terdiri dari 2530 orang. Semua warganya masih hidup untuk jangka waktu tertentu, dan masih saling mengenal dan sesama.
- e. Klen, yaitu suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari kelompok luas leluhur dan keluarga leluhur yang terkait. Golongan yang hanya berhubungan darah dengan laki-laki adalah berdasarkan garis keturunan dan yang hanya terikat oleh perempuan adalah dengan matriarki.
- f. Fratri (*phratry*), yaitu kelompok marga yang patriarki atau matrilineal, bersifat lokal dan merupakan penggabungan dari kelompok marga lokal. Kelompok klan yang dapat bergabung dengan saudara kandung dapat berupa klan kecil atau divisi lokal dari klan besar. Kesatuan antara bagian-bagian lokal dari gen sering tidak setara secara alami dengan seluruh gen. Saudara tidak dapat melacak garis keturunan yang tepat dari nenek moyang mereka, bahkan jika mereka mengakui bahwa nenek moyang seperti itu ada.
- g. Moety atau lebih dikenal sebagai anggota komunitas, adalah kelompok kekerabatan yang terkait dengan klan seperti fratri, tetapi mewakili setengah dari komunitas, menurut struktur komunitas. Suatu bagian dapat berupa penyatuan klan kecil dan penyatuan bagian lokal dari klan besar.

Dalam kajian antropologi sosial, terdapat beberapa jenis kelompok kekerabatan mulai dari yang relatif kecil hingga yang besar. Kekerabatan bukan hanya karena perkawinan atau ikatan keluarga, tetapi juga karena hubungan darah. Anggota kelompok

kekerabatan (keturunan) berhubungan satu sama lain karena memiliki nenek moyang yang sama. Kelompok kerabat kecil disebut keluarga inti, dan kelompok kerabat besar disebut klan.

Di Indonesia, sistem kekerabatan adalah hubungan keluarga melalui perkawinan. Secara garis besar, Indonesia mengenal tiga bentuk sistem kekerabatan. *Pertama*, sistem kekerabatan matrilineal, mengambil garis keturunan dari pihak perempuan (ibu), misalnya suku Minangkabau. Karena sistem kekerabatan ini, anak perempuan lebih disukai daripada anak laki-laki. *Kedua*, sistem kekerabatan patriarki, yaitu sistem kekerabatan patriarki yang mengambil garis keturunan dari selatan (ayah), misalnya suku Batak. Oleh karena itu, anak laki-laki lebih penting daripada anak perempuan, jadi setiap keluarga tanpa anak laki-laki harus mengadopsi anak laki-laki. Dalam sistem kekerabatan patriarki ini, adat perkawinan diterapkan dengan pembayaran yang jujur. Sistem ini digunakan di daerah Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Bengkulu, Seram, Nusa Tenggara, Bali dan Irian. *Ketiga*, sistem kekerabatan orang tua. Sistem kekerabatan orang tua adalah sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan laki-laki dan perempuan. Dalam sistem kekerabatan ini, anak laki-laki dan perempuan tidak membedakan hak waris. Kerabat adalah ayah, ibu, anak, menantu, cucu, saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara laki-laki, paman, bibi, kakek, nenek, dll.

4. Perubahan Sosial

A. Pengertian Perubahan Sosial

Setiap perusahaan harus merasa berubah. Perubahan ini terbatas, ada juga perubahan lambat, ada juga perubahan yang sangat cepat. Ketika perubahan lanjutan berasal dari dua kata, yaitu perubahan (*change*), berarti peristiwa yang terkait dengan perubahan pada posisi elemen sistem sampai ada perubahan dalam struktur sistem. Untuk kata-kata sosial menunjukkan hubungan antara seorang individu dengan orang lain dengan tipe yang sama. Oleh karena itu, perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan bentuk rute sosial.

Perubahan sosial merupakan gejala perubahan struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan dalam masyarakat dapat dikaitkan dengan berbagai hal, seperti nilai sosial, norma sosial, pola perilaku, struktur kelembagaan, kelas sosial, hak kekuasaan dan otoritas serta interaksi sosial. Perubahan sosial budaya adalah fenomena umum yang terjadi selama berabad-abad di semua masyarakat. Perubahan terjadi sesuai dengan kodratnya dan sifat manusia selalu ingin berubah. Bahkan, kebosanan manusia dikatakan sebagai penyebab perubahan.

Kingsley Davis mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, munculnya organisasi buruh dalam masyarakat kapitalis telah mengubah hubungan antara pekerja, majikan, dll. Serta menyebabkan perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik. Gillin dan Gillin menjelaskan perubahan sosial sebagai perubahan cara hidup yang diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, budaya material, demografi, ideologi, atau penyebaran atau penemuan baru di masyarakat. Samuel Koenig mengatakan bahwa perubahan sosial mengacu pada perubahan yang terjadi dalam cara hidup masyarakat. Perubahan terjadi karena penyebab internal dan eksternal.

B. Teori tentang Perubahan Sosial

Pertama, teori evolusi perubahan. Teori ini berasumsi bahwa perubahan sosial yang melewati tahapan-tahapan tertentu akan dilampaui atau diikuti oleh semua masyarakat. Perubahan terus berlanjut, sampai akhir perubahan, yaitu akhir dari perubahan sosial. Pada dasarnya, aliran ini berpandangan bahwa kemajuan mengikuti hukum atau hukum alam. Jumlah teori ini adalah sebagai berikut (Jamaludin, 2015a, pp. 80-81):

- a. Herbert Spencer mengungkapkan perubahan sosial bahwa masyarakat adalah organisasi sesuatu yang hidup. Oleh karena itu, ada kesamaan yang signifikan antara masyarakat dan organisme biologis. Oleh karena itu, ada sejumlah alasan untuk perlakuan sosial sebagai sebuah organisme.
- b. August Comte sebagai bapak sosiologi, berpendapat bahwa perubahan sosial dalam perkembangan masyarakat melewati tiga tahap, yaitu: (1) tahap teologis. Pada titik ini, pikiran orang adalah bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki jiwa; (2) tahap metafisik. Saat ini, orang masih percaya bahwa gejala di dunia ini disebabkan oleh kekuatan di atas manusia. Manusia belum berusaha menemukan sebab dan akibat dari gejala-gejala tersebut. (3) tahap aktif, adalah tahap dimana orang memiliki kemampuan berpikir ilmiah. Pada tahap ini, pengetahuan berkembang. Menurut August Comte, masyarakat adalah bagian dari alam, oleh karena itu gejala alam, termasuk hukum-hukum perkembangan alam, dapat digunakan untuk menggambarkan gejala perkembangan sosial, karena gejala alam dianggap sebagai ciri gejala sosial. Dengan demikian, alam dan masyarakat memiliki kesamaan dalam proses transformasi. Dengan demikian, perubahan sosial yang ada di masyarakat sama dengan yang terjadi di alam.

Kedua, teori siklus perubahan sosial. Teori sosial menempatkan variabel sejarah dengan fokus pada proses evolusi sebagai faktor penting dalam perubahan sosial. Teori ini memeriksa perubahan dua hipotesis yang berbeda, yaitu perubahan sebagai siklus dan perubahan sebagai pengembangan. Sebagai siklus karena sulit untuk mengetahui akhir fasilitas penyebab asli perubahan sosial. Perubahan yang terjadi adalah peristiwa tepat waktu dengan melihat sejarah sebagai serangkaian lingkaran tanpa akhir. Salah seorang ahli teori, Ibnu Khaldun, memandang perubahan sebagai suatu siklus, yang analisisnya berfokus pada bentuk dan derajat organisasi kelompok-kelompok yang berlatar belakang sosiokultural yang berbeda. Model siklus perubahan sosial lebih banyak diterima oleh masyarakat Timur, khususnya Cina, termasuk Indonesia, daripada Barat. Dengan demikian, para ahli teori berpendapat bahwa sampai akhir evolusi, perubahan sosial tidak akan berhenti, tetapi akan kembali ke keadaan semula pada awal evolusi, dan bahwa perubahan itu seperti siklus tanpa akhir. Dengan demikian, menurut teori ini, perubahan sosial bersifat abadi.

Ketiga, teori fungsional perubahan sosial. Teori ini juga dikenal sebagai teori struktur-fungsi. Menurut Talcott Parsons, masyarakat seperti organ tubuh manusia, dalam proses perkembangan dan perubahannya. Dengan demikian, masyarakat, seperti halnya tubuh manusia, selalu seimbang dalam hal institusinya, semua ditujukan untuk menjamin kelangsungan masyarakat. Jika perubahan menyebabkan kejutan atau ketidakseimbangan, organisasi yang ada akan mencoba menstabilkannya. Munculnya pendatang di suatu daerah, munculnya gangguan alam, munculnya konflik yang berlebihan, bahkan munculnya perang akan menimbulkan perubahan tatanan

masyarakat, serta fungsi sosial masyarakat. Ini merupakan ciri awal terjadinya perubahan fungsi sosial.

Keempat, teori konflik perubahan sosial. Menurut teori ini, kemajuan masyarakat terjadi ketika setiap kelompok terlibat dalam suatu konflik, sehingga digunakan istilah “dinamika konflik”. Sosiolog berpendapat bahwa ketika masyarakat terikat pada situasi tertentu, secara evolusioner tidak lagi ditakuti, tetapi perubahan sosial mendasar (revolusioner) yang sangat cepat terjadi. Perubahan sosial yang cepat dan cepat dapat menimbulkan berbagai kerusakan dan gangguan nilai-nilai sosial budaya dan harus dihindari. Menghindari hal ini membutuhkan penelitian yang rinci, mendalam, dan mungkin filosofis dalam ilmu-ilmu sosial, yang dijelaskan dalam bentuk rencana sosial yang solid.

Mengikuti perubahan fisik baik wilayah maupun penduduknya, maka terjadi pula perubahan perilaku, norma dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Hal ini terlihat dari kecenderungan sikap warga yang cenderung individualisme dan kecenderungan untuk menggunakan rumah hanya sebagai tempat peristirahatan. Hal ini membuat retak di antara warga. Pola interaksi dibatasi hanya pada saat dibutuhkan. Juga dikenal sebagai pola interaksi ekonomi atau solidaritas organik. Artinya, interaksi hanya didasarkan pada keuntungan. Sangat jarang terjadi interaksi solidaritas mekanis seperti itu. Bentuk-bentuk perubahan sosial terjadi secara umum, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut (Jamaludin, 2015a, pp. 90–94):

Tabel 7.1
Bentuk Perubahan Sosial Masyarakat Desa (Agraris) menjadi
Masyarakat Kota (Industri)

No	Karakteristik Kehidupan Masyarakat		Proses Perubahan Sosial yang Terjadi
	Masyarakat Asli	Masyarakat Pendatang	
1	Wilayahnya berbentuk rawarawa, sawah, perkebunan, perikanan, pohon rindang, jalan setapak, alat transportasi minim, masih berbentuk warung-warung kecil, dan masih berjalan kaki.	Wilayah berbentuk bangunan-bangunan rumah, pepohonan sedikit dari hasil tanam, suasana panas, jalan banyak, alat transportasi kendaraan pribadi, angkot, tempat belanja di supermarket, toko serta menggunakan motor untuk berkendaranya.	Wilayah sebagian besar telah berubah menjadi areal perumahan, perkantoran, dan jasa (perdagangan). Wilayah asli masih ada tapi sedikit.
2	Masih bertahan pada daerahnya dan masih menempati wilayah asli daerah tersebut.	Menempati perumahan.	Sebagian menempati daerah asli, pindah daerah (lokasi) serta ada yang menempati perumahan.
3	Masyarakat membangun model rumah sesuai tradisi dan adat, dan rumah antara satu dengan yang lainnya, tidak berdempet-dempet.	Rumah dalam bentuk minimalis atau bentuk perumahan sangat padat berdempet.	Banyak masyarakat yang mengubah rumahnya dalam model perumahan (minimalis) dan sedikit dijumpai rumah masih adat lama.
4	Pekerjaan dan penghasilan pada sektor pertanian sebagai tani, buruh, dagang sebagian kecil,	Bekerja pada sector jasa dan perdagangan seperti pegawai kantor, karyawan pabrik, PNS, dan pramuniaga.	Tidak ada pekerjaan sebagai petani karena banyak masyarakat bekerja sebagai karyawan pabrik, PNS, kantor, dan lainnya.

	<i>ngojeg</i> , dan wiraswasta lainnya.		
5	Menggunakan bahasa daerah sebagai Bahasa kampung (daerah) untuk komunikasi dengan orangtua, anak-anak, tetangga, dan lainnya.	Menggunakan Bahasa Indonesia murni dan bahasa daerah sudah mulai ditinggalkan oleh para pendatang.	Menggunakan bahasa Indonesia dalam interaksi sehari-hari. Bahasa daerah sedikit dipakai, hanya dilakukan oleh orangtua dulu yang masih hidup. Anak-anak lebih suka bahasa Indonesia
6	Proses siklus hidup (lahir, pernikahan, kematian) masih menggunakan adat dan tradisi daerah setempat.	Proses pernikahan menggunakan adat masing-masing sesuai tradisi daerahnya. Begitupun untuk adat kelahiran dan kematian sesuai agama masing-masing.	Untuk kelahiran sudah jarang dilakukan adat setempat, atau lainnya, begitupun dengan kematian. Akan tetapi, untuk pernikahan apabila berbeda etnis disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.
7	Budaya atau kesenian Menggunakan adat dan tradisi daerah setempat (topeng, wayang golek, tanjidor, dan lainnya).	Budaya dan kesenian modern seperti dangdut, organ, kesenian modern, degung Sunda, calung, dan band.	Jarang dijumpai saat hajatan (pernikahan, sunatan) menggunakan adat setempat seperti topeng, tanjidor, dan lainnya. Masyarakat sudah menggunakan kesenian modern seperti band, dangdut, dan lainnya.
8	Makanan adat setempat seperti sayur pucung, semur jengkol, dodol, kue bugis, apem, dan lainnya.	Makanan super market.	Makanan tradisional adat setempat sudah jarang ditemukan, menggunakan makanan siap saji.
9	Agama seluruhnya muslim (Islam).	Campur Islam, Kriten, Hindu, Buddha.	Masyarakat asli masih tetap beragama Islam.

Berdasarkan tabel di atas, proses perubahan sosial terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam struktur pedesaan ke perkotaan (kondisi atau infrastruktur wilayah) maupun budaya (norma, perilaku, nilai). ini adalah salah satu ciri perkotaan yang dijelaskan oleh Meno, Mustamine Alwi, dan Elly M. Setiadi, semakin memperkuat teori bahwa memiliki infrastruktur fisik seperti perumahan, sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan lainnya. Perubahan nilai dan perilaku yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Artinya, ada kota fisik (infrastruktur) dan kota spiritual (spiritualitas dan perilaku masyarakat).

Namun, analisis terhadap perubahan sosial yang terjadi di pedesaan menunjukkan bahwa sebagian masih ada dalam keasliannya, sementara yang lain benar-benar berubah. Ada dua jenis ketika mengklasifikasikan mereka. Salah satunya adalah masyarakat adat setempat yang dapat dikelompokkan sebagai masyarakat yang masih kuat adat istiadatnya, dan karena jiwanya masih perkampungan dan pedesaan (agraris) sehingga masih yang diklasifikasikan sebagai masyarakat mentalitas kota bertempat tinggal rata-rata di perumahan. Mereka biasanya memfokuskan pekerjaannya pada

instansi pemerintah dan swasta seperti pegawai, pedagang dan penyedia jasa. Banyak pendatang yang memeluk budaya kota, dan budaya lokal yang mereka bawa dari kampung halamannya berangsur-angsur menurun. Dari sisi ekonomi, hal ini menunjukkan adanya tipe kehidupan ekonomi pasar dan tipe bisnis dan jasa. Kedua kelompok masyarakat di atas berada dalam satu kawasan yang sama, satu di pinggir kawasan pemukiman dan satu lagi di tengah kawasan pemukiman. Interaksi antara dua kelompok masyarakat ini sangat intens, karena keduanya sebenarnya saling membutuhkan. Tapi komunikasi mereka berhasil. Ini berarti bahwa komunikasi terjadi pada saat dibutuhkan.

5. Institusi Sosial

A. Pengertian Institusi Sosial

Institusi sosial atau lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing, yaitu social institution. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada istilah dalam bahasa Indonesia yang menggambarkan social-institutions tersebut. Ada yang menggunakan istilah pranata sosial, tetapi istilah ini menunjukkan adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lembaga memiliki banyak arti, yaitu lembaga berarti asal sesuatu, dan acuan sesuatu yang memberi bentuk kepada yang lainnya, serta badan atau organisasi yang bertujuan melakukan sesuatu penelitian keilmuan atau melakukan sesuatu usaha. Definisi lain berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Soerjono Soekanto, mengartikan lembaga kemasyarakatan dengan istilah association. Lembaga kemasyarakatan menurut Soerjono Soekanto adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.
2. Menurut Emile Durkheim, organisasi atau lembaga sosial adalah suatu tindakan yang diorganisir melalui aspek-aspek pekerjaan yang mendorong kegiatan-kegiatan sosial yang saling terkait, komposisi kegiatan masyarakat, dan tindakan individu. Di sisi lain, menurut teori sistem struktural dan fungsional Talcoltt Parsons, lembaga sosial atau organisasi sosial atau lembaga sosial mengatur peran dan konsep individu atau kelompok masyarakat yang tidak terbatas sesuai dengan pola normatif dan nilai-nilai sosial budaya yang ada sebagai alat kontrol sosial di dalam masyarakat.
3. Koentjaraningrat, seorang antropolog sosial Indonesia, menyebut lembaga kemasyarakatan dengan istilah pranata sosial, yaitu suatu sistem perilaku dan hubungan yang menitikberatkan pada kegiatan yang menangani kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.

B. Fungsi Lembaga Kemasyarakatan

Setiap lembaga kemasyarakatan memiliki fungsi dan manfaat bagi perubahan kehidupan dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, tentang cara mereka harus bertingkah-laku atau bersikap dalam menghadapi masalahnya, terutama berkaitan dengan kebutuhan pokoknya.
- b. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.

- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control), yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggotaanggotanya.

Adapun manfaat dari lembaga sosial kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Pengawas atas konsekuensi hidup orang banyak.
- b. Menjamin stabilitas sosial dan kelangsungannya.
- c. Menyediakan peranan-peranan sosial dengan sikap yang sesuai dengan institusi tersebut sehingga setiap anggota dapat memilih lembaga mana yang sesuai dengan keinginan individu.
- d. Setiap lembaga sosial telah menentukan cara bertingkah laku yang diterima oleh masyarakat.

C. Ciri-ciri Institusi Sosial

Lembaga kemasyarakatan mempunyai ciri-ciri umum, seperti diungkapkan oleh Gillin and Gillin (Jamaludin, 2015a, pp. 96–97) dalam karyanya yang berjudul *General Features of Sosial Institutions*, yaitu sebagai berikut:

- a. Lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga kemasyarakatan terdiri atas adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan serta unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung ataupun tidak langsung tergabung dalam suatu unit yang fungsional.
- b. Kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. Sistem kepercayaan dan tindakan, akan menjadi lembaga kemasyarakatan setelah melewati waktu yang relatif lama. Misalnya, suatu pendidikan tertentu baru diterapkan seluruhnya setelah mengalami suatu masa percobaan.
- c. Lembaga-lembaga kemasyarakatan biasanya berumur lama karena pada umumnya orang menganggapnya sebagai himpunan norma yang berkisar pada kebutuhan pokok masyarakat yang sudah sewajarnya harus dipelihara.
- d. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau tujuan tertentu. Tujuan tersebut akan sesuai atau sejalan dengan fungsi lembaga yang bersangkutan apabila dipandang dari sudut budaya yang bersangkutan berpegang teguh padanya. Sebaliknya, fungsi sosial lembaga tersebut yaitu peranan dalam sistem sosial dan kebudayaan masyarakat, mungkin tidak diketahui atau disadari golongan masyarakat tersebut. Fungsi tersebut baru disadari setelah diwujudkan dan ternyata berbeda dengan tujuannya. Misalnya, lembaga perbudakan ternyata bertujuan untuk mendapatkan tenaga buruh yang semurah-murahnya, tetapi dalam pelaksanaannya sangatlah mahal.
- e. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat kelengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga bersangkutan, seperti bangunan, peralatan, mesin, dan sebagainya. Bentuk serta penggunaan alat-alat tersebut berlainan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.
- f. Lambang biasanya juga merupakan ciri khas dari lembaga kemasyarakatan. Lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Sebagai contoh, kesatuan angkatan bersenjata mempunyai panji-panji, universitas atau perguruan tinggi mempunyai lambang atau logo, dan sebagainya. Kadangkadang lambang-lambang tersebut berbentuk tulisan atau slogan-slogan.

- g. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun tidak tertulis yang merumuskan tujuannya, serta tata tertib yang berlaku dan lain-lain. Tradisi tersebut merupakan dasar dari lembaga itu di dalam pekerjaannya memenuhi kebutuhan masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi bagian dari masyarakat.

D. Klasifikasi Tipe Lembaga Kemasyarakatan

Menurut Gillin and Gillin (Jamaludin, 2015a, pp. 98-100) lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. *Crescive institutions* dan *enacted institutons* yang merupakan klasifikasi dari sudut perkembangannya. *Crescive institutions* juga disebut lembaga yang paling primer, lembaga-lembaga yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat-istiadat masyarakat. Contohnya hak milik, perkawinan, agama, dan sebagainya. *Enacted institutons* dengan tidak sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya lembaga utangpiutang, lembaga perdagangan, dan lembaga pendidikan yang semuanya berakar pada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Pengalaman melaksanakan kebiasaan-kebiasaan tersebut, kemudian disistemisasi dan diatur untuk kemudian dituangkan ke dalam lembaga-lembaga yang sisahkan oleh negara.
- b. Dari sudut sistem yang diterima oleh masyarakat, timbul klasifikasi atas *basic institutions* dan *subsidiary institutions*. *Basic institutions* dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia, misalnya keluarga, sekolah, negara, dan sebagainya dianggap sebagai *basic institutions* yang pokok. Sebaliknya, *subsidiary institutions* dianggap kurang penting, seperti kegiatan untuk rekreasi. Ukuran yang dipakai untuk menentukan suatu lembaga kemasyarakatan sebagai *basic* atau *subsidiary* berbeda pada setiap masyarakat. Ukuran-ukuran tersebut juga bergantung pada masa hidup masyarakat berlangsung. Misalnya, sirkus pada zaman Romawi dan Yunani kuno dianggap sebagai *basic institutions*, tetapi pada era global saat ini tidak akan dijumpai masyarakat yang mempunyai keyakinan demikian.
- c. Dari sudut penerimaan masyarakat dapat dibedakan *approved (social sanctioned institutions)* dengan *unsanctioned institutions*. *Approved (social sanctioned institutions)* adalah lembaga-lembaga yang diterima masyarakat seperti sekolah, perubahan dagang, dan lain-lain. Sebaliknya *unsanctioned institutions* adalah lembaga yang ditolak oleh masyarakat, walaupun kadang-kadang masyarakat tidak berhasil memberantasnya. Misalnya kelompok penjahat, pemeras, pencoleng, dan sebagainya.
- d. Dilihat dari faktor penyebaran, ada dua jenis, yaitu *general institutions* dan *restricted institutions*. Misalnya, agama merupakan suatu *general institutions*, karena dikenal oleh semua masyarakat dunia, sedangkan agama Islam, Protestan, Katholik, Buddha, Hindu, dan lain-lain, merupakan *restricted institutions*, karena dianut oleh masyarakat-masyarakat tertentu di dunia ini.
- e. Dari sudut fungsinya, terdapat pembedaan *operative institutions* dan *regulative institutions*. *Operative institutions* berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, seperti lembaga industrialisasi. *Regulative institutions*, bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian

mutlak lembaga itu sendiri. Suatu contoh adalah lembaga hukum seperti kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya.

Klasifikasi tipe-tipe lembaga kemasyarakatan tersebut, menunjukkan bahwa dalam setiap masyarakat akan dijumpai lembaga kemasyarakatan. Setiap masyarakat memiliki sistem nilai yang menentukan sistem sosial mana yang dianggap sentral bagi masyarakat lain. Misalnya, dalam masyarakat totaliter, negara dianggap sebagai sistem sosial utama yang mengawasi sistem sosial lainnya seperti keluarga, hak milik, bisnis, dan sekolah. Namun, di semua masyarakat ada banyak pola yang mengatur hubungan antara lembaga-lembaga sosial.

BAB VIII

PROBLEMATIKA MASYARAKAT PEDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Materi pada Bab VII ini menguraikan tentang problematika masyarakat pedesaan dan perkotaan yang terdiri dari: (1) kemiskinan; (2) pengangguran; (3) kriminalitas; (4) urbanisasi; (5) kenakalan remaja; (6) industrialisasi; dan (7) transportasi.

2. Manfaat Perkuliahan

Diharapkan setelah membaca Bab ini mahasiswa dapat memahami tentang fenomena sosial mengenai problematika masyarakat pedesaan dan perkotaan khususnya di wilayah Indonesia.

3. Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tentang problematika yang terjadi pada masyarakat pedesaan dan perkotaan khususnya di wilayah Indonesia.

B. Materi

Fenomena sosial yang terjadi di masyarakat pedesaan dan perkotaan tidak terlepas dari permasalahan yang mereka hadapi akibat dinamika perubahan sosial yang relatif. Tidak heran jika setiap kehidupan sosial selalu menghadapi masalah sosial. Namun banyak permasalahan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan dan perkotaan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dari kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, urbanisasi, kenakalan remaja, industrialisasi, lalu lintas, dll. Masalah ini diangkat atas dasar analogi yang luas karena faktanya masih banyak lagi masalah yang mungkin kita temui jika menggunakan sudut pandang sosiologis kritis. Di antara semua masalah ini, itu benar-benar tidak dapat dipisahkan dari akar masalah yang ditinjau dari perspektif ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sistem kebijakan pemerintahan. Masyarakat pedesaan dan perkotaan selalu berkuat dengan fenomena sosial yang terjadi dilihat berdasarkan kerangka berfikirnya yaitu fakta sosial, definisi sosial dan perubahan sosial yang membentuk klaster problematika sosial yang cukup menarik untuk dibahas sehingga dapat menjawab permasalahan tersebut dengan cara menarik benang merah sebagai solusi dalam menganalisis isu yang terjadi di ranah desa dan kota. Untuk memahami problematika yang terjadi di masyarakat pedesaan dan perkotaan dapat dilihat pada beberapa penjelasan sebagai berikut.

1. Kemiskinan

Masalah kemiskinan masih menjadi masalah global. Artinya kemiskinan tidak hanya menjadi masalah utama di negara-negara dunia ketiga, tetapi juga menjadi dilema di negara-negara industri. Di sebagian besar negara berkembang, hanya sebagian kecil penduduk yang memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, sedangkan sisanya, sebagian besar penduduk, hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari. Kemiskinan tidak hanya dirasakan langsung oleh

masyarakat miskin, tetapi juga berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Hal ini karena mata rantai kemiskinan adalah timbulnya masalah lain seperti pengangguran, kelaparan, kebodohan, dan lainnya. Oleh karena itu, untuk mengurangi masalah itu, tidak sedikit masyarakat yang menyelesaikannya dengan cara yang bertolak dari norma yang berlaku, yaitu dengan cara tindak kriminalitas.

Selain masyarakat desa, kemiskinan juga melanda masyarakat kota. Kemiskinan pada masyarakat perkotaan lebih mengarah pada mentalitas individualistik, persaingan yang tidak terpandu, yang besar kecenderungannya akan menambah dalam jurang pemisah antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Kemudian, muncul konflik yang terjadi akibat seleksi alam (*survival of the fittes*), yaitu yang kuat akan tetap bertahan hidup, dan yang lemah akan tersisihkan. Ironisnya korban akibat dari persaingan tersebut adalah masyarakat lokal, sebab pemilik modal dikuasai oleh pihak asing yang mencoba merauk keuntungan dari tenaga kerja lokal tersebut, seperti yang terjadi pada masa kolonialisme sebagai bukti historis. Kemiskinan merupakan suatu fenomena persoalan structural dan multidimensional, yang mencakup politik, sosial, ekonomi, aset, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, dimensi-dimensi kemiskinan muncul dalam berbagai bentuk berikut:

1. Dimensi politik, seringkali diwujudkan dalam bentuk tidak adanya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka sepenuhnya dikecualikan. Proses pengambilan keputusan penting yang mempengaruhi mereka, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumber daya utama yang diperlukan untuk kehidupan yang layak, termasuk akses ke informasi.
2. Dimensi sosial dimanifestasikan dalam non-integrasi orang miskin ke dalam lembaga-lembaga sosial yang ada dan dalam internalisasi budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka.
3. Dimensi lingkungan, yang seringkali memanifestasikan dirinya dalam bentuk sikap, perilaku, dan cara pandang yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, sehingga cenderung memutuskan dan melakukan kegiatan yang kurang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan permukiman.
4. Dimensi ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk pendapatan yang rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka secara memadai.
5. Dimensi kekayaan ini dicirikan oleh rendahnya pendapatan masyarakat miskin dalam berbagai hal yang dapat menjadi modal vital mereka, antara lain asset sumber daya manusia (*human capital*) yang bernilai tinggi, peralatan kerja, dana modal, perumahan dan permukiman, dan sebagainya.

Dari dimensi-dimensi di atas, kemiskinan dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu:

1. Kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan manusia.
2. Kemiskinan struktural atau buatan, yaitu kemiskinan disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh pengaturan kelembagaan yang berpihak pada kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu yang menyudutkan pihak lain.

Orientasi berbagai program penanggulangan kemiskinan hanya menitik beratkan pada salah satu dimensi dari gejala kemiskinan ini, pada dasarnya mencerminkan pendekatan program yang parsial, sektoral, dan tidak menyentuh akar penyebab

kemiskinan itu sendiri. Akibatnya, program-program tersebut tidak mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat serta mewujudkan aspek keberlanjutan dari program-program penanggulangan kemiskinan tersebut.

2. Pengangguran

Pengangguran adalah masalah yang masih merupakan tugas pemerintah pusat pada otoritas umum dan lokal pada khususnya. Pemerintah selalu menawarkan banyak cara untuk mengatasi masalah ini, tetapi masalah ini terus bertahan dan tumbuh. Jika kita menganggap ekonomi, pengangguran adalah produk dari situasi di mana pasar tenaga kerja dinonaktifkan dalam menyerap tenaga kerja yang tersedia, terus tumbuh, antara lain, oleh karena jumlah pekerjaan yang tersedia kurang dari jumlah pencari kerja. Keterampilan pencarian pekerjaan tidak mematuhi pasar tenaga kerja dan informasi pasar tenaga kerja kurang efektif untuk pencari kerja. Selain itu, pengangguran juga dapat disebabkan oleh penghentian lapangan kerja (PHK) yang terjadi karena perusahaannya atau mengurangi aktivitasnya karena sedikit krisis ekonomi dan kurang bermanfaat bagi investasi peraturan penghambatan dan lainnya. Jumlah pengangguran tinggi akan dikaitkan dengan tingkat tingkat perawatan kesehatan masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena telah bekerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang berdampak langsung pada masyarakat dan merupakan masalah yang paling serius. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti standar hidup yang lebih rendah dan merupakan pemicu psikologis. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa pengangguran sering menjadi topik perdebatan politik dan politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka usulkan akan membantu menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2003, p. 150). Untuk memahami defenisi pengangguran lebih mendalam, dapat kita lihat ada beberapa pengertian tentang pengangguran, yang dikemukakan para ahli, yaitu sebagai berikut:

1. Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai keadaan seseorang yang diklasifikasikan sebagai tenaga kerja (tenaga kerja), tetapi tidak bekerja dan secara proaktif meneliti pekerjaan (Muana, 2005, p. 253).
2. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, mencari pekerjaan, beroperasi kurang dari dua hari dalam seminggu atau seseorang yang mencoba mencari pekerjaan.
3. Sadono Sukirno (2011, p. 59), menyatakan bahwa pengangguran adalah keadaan seseorang dalam angkatan kerja yang menginginkan suatu pekerjaan, tetapi tidak dapat memperolehnya. Oleh karena itu, seseorang yang tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan tidak digolongkan sebagai pengangguran.

Menurut Muana Nanga (2005, p. 26) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, khususnya sebagai berikut:

1. Tingkat gaji; memainkan peran yang sangat penting dalam kondisi kerja. Tingkat upah yang berlaku akan mempengaruhi penawaran dan permintaan tenaga kerja.
2. Teknologi; Penggunaan teknologi yang tepat akan mengurangi permintaan tenaga kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah pengangguran.

3. Produktivitas; Peningkatan produktivitas tenaga kerja akan menurunkan permintaan tenaga kerja dan hal ini akan meningkatkan jumlah pengangguran.
4. Fasilitas mempengaruhi permintaan tenaga kerja dalam dua cara. Efek substitusi, di mana peningkatan modal mengurangi permintaan tenaga kerja. Pengaruh tambahan, peningkatan modal akan membutuhkan lebih banyak pekerja untuk mengelola modal yang tersedia.
5. Struktur ekonomi; Perubahan dalam struktur ekonomi menyebabkan pengurangan kerja, terutama tenaga kerja dan pekerja anak tidak berpendidikan.

Menurut Zainab Bakir dan Cris Maning (dalam Jamaludin, 2015b) bahwa klasifikasi konsep pengangguran harus dianggap sebagai ukuran yang berkaitan dengan pengangguran, yaitu:

1. Intensitas kerja (terkait dengan kesehatan dan nutrisi makanan) adalah;
2. Waktu (banyak dari mereka bekerja ingin bekerja lebih lama);
3. Produktivitas (kurangnya produktivitas seringkali disebabkan oleh kurangnya sumber daya tambahan untuk dioperasikan).

3. Kriminalitas

Istilah kriminologi pertama kali diperkenalkan oleh Antropolog Perancis, P. Topinard (1830-1911) , yaitu secara harfiah berasal dari dua kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Menurut P. Topinard menjelaskan kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, baik kriminologis teoretis maupun kriminologis murni. Kriminologi teoretis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, yaitu memerhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya. Disamping itu beberapa ahli memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi ini, yaitu sebagai berikut (Jamaludin, 2015b, pp. 328–331):

1. Edwin H. Sutherland mendefinisikan, “Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena” (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai gejala sosial).
2. J. Constant mendefinisikan kriminologi ini sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau penjahat. WME. Noach, dalam buku yang sama memberikan definisi bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh serta akibat-akibatnya.
3. W.A. Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, hingga membagi kriminologi ini mencakup sebagai berikut:
 - a) Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam.
 - b) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (etiologi sosial).
 - c) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya.

- d) Psikopatologi kriminal dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya, atau lebih dikenal dengan istilah psikiatri.
- e) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya penghukuman, arti penghukuman, dan manfaat penghukuman. Di samping itu, terdapat kriminologi terapan berupa:
- hygiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencengah terjadinya kejahatan;
 - politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi;
 - kriminalistik (*policie scientific*), yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.
4. Edwin H. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a sosial phenomenon*).
5. Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu sebagai berikut:
- a) Sosiologi hukum. Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hokum pidana).
 - b) Etiologi kejahatan, yaitu merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.
 - c) Penology. Pada dasarnya, ilmu tentang hukuman, tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.
6. Paul Moedigdo Moeliono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Ia tidak sependapat dengan definisi yang diberikan Sutherland. Menurutnya, definisi itu tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itu pun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut.
7. Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan, keseragaman, pola, dan faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi, objek studi kriminologi melingkupi:
- a) Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
 - b) Pelaku kejahatan; dan
 - c) Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila mendapat reaksi dari masyarakat.

4. Urbanisasi

Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi merupakan masalah yang cukup serius bagi kita semua karena persebaran penduduk yang tidak merata antara desa dengan kota akan menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan. Jumlah peningkatan penduduk kota yang signifikan tanpa didukung dan diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan, fasilitas umum, aparat penegak hukum, perumahan, penyediaan pangan, dan sebagainya tentu menjadi masalah yang harus segera dicarikan jalan keluarnya.

Proses urbanisasi yang tidak terkendali menunjukkan adanya ketidakseimbangan demografi secara keruangan, yang sering disebut dengan istilah urbanisasi berlebih atau *over urbanization*, dalam istilah lain sering disebut juga sebagai urbanisasi semu atau *pseudo-urbanization*. Hal ini menjadi penyebab yang menghambat pembangunan. Berkenaan dengan hal itu, Smith dan Nemeth (dalam Jamaludin, 2015b, p. 179) menyatakan bahwa urbanisasi harus dikendalikan, sebab jika tidak terkendali akan timbul dampak negatif, baik terhadap penduduk kota, penduduk pedesaan maupun pengaruh makro terhadap negara. Walaupun demikian, jika proses urbanisasi bisa dikendalikan akan memberikan dampak positif. Laporan Bank Dunia (1994) yang dikutip oleh Keban (dalam Jamaludin, 2015b) menyebutkan bahwa adanya hubungan positif antara tingkat urbanisasi pada suatu negara dengan tingkat pendapatan per kapita. Korelasi positif tersebut telah didukung dengan data empiris, sehingga memberikan keyakinan bahwa urbanisasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan, artinya peningkatan urbanisasi dapat mempercepat pembangunan.

Salah satu sebabnya adalah penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar di suatu daerah merupakan potensi pembangunan, dalam arti daerah mempunyai sumber daya manusia yang cukup. Sebaliknya, walaupun jumlah penduduk yang banyak jika tidak berkualitas tidak akan menjadi potensi pembangunan, tetapi menjadi ancaman bagi pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, jika di suatu wilayah memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, perlu dilakukan upaya penanganan pengendalian dan peningkatan kualitas agar tidak menjadi beban bagi proses pembangunan yang akan dilaksanakan.

Pada negara maju, perkembangan kota yang telah menyulap aktivitas ekonomi telah mengubah pedesaan menjadi perkotaan, yaitu pada sektor industri dan jasa. Adapun di negara berkembang, seperti halnya Indonesia, ekonomi pertanian menjadi aktivitas yang penting dan masih dianggap menjadi lapangan kerja yang cukup. Sekalipun demikian, negara sedang berkembang pun pada umumnya sedang berusaha untuk mengembangkan industri dan jasa sebagai basis ekonominya karena pertumbuhan sektor pertanian pada umumnya terbatas, hanya bisa ditingkatkan sekitar 3% per tahun, sedangkan pertumbuhan sektor industri dan jasa dapat mencapai pertumbuhan sampai 75% atau 20% per tahun. Akhirnya sektor industri dan jasa ini berada di kota, maka laju penduduk kota pun menjadi lebih tinggi. Negara industri maju telah menjadi kota, sementara negara sedang berkembang dalam proses menjadi kota.

Daya tarik kota yang mendorong terjadinya urbanisasi ini disebut sebagai faktor penarik (*pull factor*). Pemicunya bukan saja kota. Bayangan tentang kemajuan dan gemerlapnya kota menjadi daya tarik terjadinya migrasi ke kota. Di Indonesia, diperkirakan perpindahan penduduk yang disebabkan oleh pekerjaan hanya sekitar 40%, selebihnya karena alasan nonekonomi dan nonlapangan kerja seperti misalnya ikut keluarga, mendapatkan pendidikan lebih tinggi, dan tanpa tujuan yang jelas (Kuswartojo,

2005, p. 98). Perpindahan penduduk desa ke kota, selain karena faktor daya tarik kota, juga bisa disebabkan oleh dorongan kemiskinan dan kelangkaan lapangan kerja pedesaan (disebut dengan push factor). Karena pedesaan tidak lagi dapat memberikan sumber penghidupan, penduduk pedesaan pindah ke kota dengan harapan dapat menemukan sumber penghidupan yang baru. Struktur pemilikan tanah yang tidak seimbang, dan adanya konsentrasi usaha ekonomi nonpertanian pada petani pemilik tanah yang luas, sering mempersempit usaha dan lapangan kerja di pedesaan. Selain itu, tidak adanya rotasi penanaman dan pemanenan, karena kegiatan tersebut dilakukan secara serempak, menyebabkan ketidakseimbangan penyerapan tenaga kerja pula.

Semua itu merupakan faktor yang mendorong perpindahan penduduk dari pedesaan ke kota. Sekalipun demikian, migrasi penduduk tersebut di Indonesia tidak terjadi secara serempak dan tiba-tiba, seperti yang terjadi di Amerika Latin. Oleh karena itu, urbanisasi di Indonesia sering dianggap lamban. Walaupun tercatat 40% migrasi karena pekerjaan, keluarga, kerabat atau kenalan tetap menjadi saluran terjadinya proses migrasi. Bagaimana pun, migrasi penduduk yang disebabkan oleh kemiskinan pedesaan, akhirnya menjadi beban kota. Terlebih lagi, karena pihak kota pun sering tidak siap dan tidak mempunyai kemampuan untuk menyiapkan prasarana dan fasilitas yang memadai untuk menampung lapisan penduduk ini.

Beberapa tantangan yang dihadapi kota dengan adanya migrasi penduduk desa yang miskin ini sebagaimana dijelaskan oleh Tjuk Kuswanto (2005, p. 98) yaitu sebagai berikut.

1. Golongan masyarakat ini masih harus belajar berperilaku dan menyesuaikan diri dengan kondisi perkotaan yang bergantung pada lingkungan buatan yang serba berongkos. Padahal, golongan masyarakat ini tidak mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan ongkos tersebut.
2. Lapangan kerja tercipta atau diciptakan oleh lapisan masyarakat ini. Dari pekerjaan menjadi kurir, tukang lem amplop, tukang jok, menjadi lapangan kerja di perkotaan yang tidak pernah ada di pedesaan.
3. Keterikatan batin pada kota tempat tinggal lemah, bahkan tidak ada. Tanggung jawab pada lingkungan tempat tinggalnya sangat kurang. Banyaknya kebakaran di Jakarta, misalnya, disebabkan oleh ketidakpeduliannya pada lingkungan. Mereka juga bersedia hidup seadanya, karena apa yang diperoleh justru digunakan untuk membantu keluarganya yang miskin di kota.

5. Kenakalan Remaja

Pada awalnya, kenakalan remaja hanyalah merupakan perilaku “nakal” dari kalangan remaja yang sering dikatakan sedang mencari identitas diri. Kenakalan seperti ini tidak menimbulkan kekhawatiran dikalangan masyarakat luas (orangtua, guru, teman, dan masyarakat umum) karena dipahami sebagai fase yang akan terjadi dan dialami oleh setiap orang, yang akan berlalu begitu saja oleh masyarakat luas. Akan tetapi, kenakalan remaja tampaknya bukan lagi bersifat nakal, tetapi sudah menjurus pada tindakan brutal. Kartini Kartono (2003, pp. 101–103) menjelaskan fase perkembangan kenakalan remaja, yaitu sebagai berikut:

1. Pada tahun 1950-an, karena masih dalam suasana mengalami kemelut merebut kemerdekaan, kenakalan remaja pada zaman itu pada umumnya berupa penodongan di sekolah-sekolah untuk mendapatkan ijazah, dan penonjolan-diri yang berlebihan bak “pahlawan kesiangan”. Kenakalan yang lebih serius hamper

tidak pernah terjadi. Hal ini disebabkan masih kuatnya sanksi-sanksi masyarakat, ditambah tingginya citra perjuangan dan semangat berkorban untuk mengisi kemerdekaan.

2. Pada tahun 1960-an mulailah muncul “top hits”, mengenai kenakalan remaja, yaitu berupa keberandalan dan tindak kejahatan ringan, seperti ala crossbyism dan crossgirlism, menirukan pola tingkah laku dan budaya Barat. Adapun sumber kenakalan dan kejahatan mereka adalah ketidakmampuan si anak dalam memanfaatkan waktu kosong dan kurangnya pengendalian terhadap dorongan meniru.
3. Pada tahun 1970-an, kenakalan remaja di kota-kota besar di tanah air sudah menjurus pada kejahatan yang lebih serius berupa tindak kekerasan, penembretan secara terang-terangan di siang hari, penggarongan, perbuatan seksual dalam bentuk perkosaan beramai-ramai sampai melakukan pembunuhan, dan perbuatan kriminal lainnya yang berkaitan dengan kecanduan bahan narkotik. Kejahatan dan kenakalan remaja tahun 1970-an ini, memang sangat erat berkaitan dengan semakin derasnya arus urbanisasi dan semakin banyaknya jumlah remaja desa yang bermigrasi ke daerah perkotaan. Saat itu, Indonesia mulai bangkit pada sisi perekonomian, sehingga banyak warga desa yang melakukan urbanisasi ke kota untuk mengadu nasib. Setelah datang ke kota, mereka ikut terjangkit dengan budaya kota yang glamour dan hedonis.
4. Pada tahun 1980-an, gejala kenakalan remaja ini menjadi semakin meluas, baik dalam frekuensi maupun kualitas kejahatannya. Bahkan, bentuk dan sifat kenakalannya, lebih menjurus kepada perbuatan kriminal (kejahatan). Beberapa bentuk kenakalan remaja sekarang adalah tawuran (perkelahian antarkelompok), penggunaan narkotika atau obat terlarang, perampasan, geng motor (kebut-kebutan di jalan raya tanpa aturan), penyimpangan seksual, dan tindakan-tindakan yang menjurus pada perbuatan kriminal.

Para ahli sepakat bahwa penyebab utama kenakalan remaja berawal dari keluarga. Keluarga broken home menjadikan anak remajanya memiliki kelainan berperilaku. Para remaja merasa kurang diperhatikan dan kurang mendapatkan kasih sayang orangtua. Bentuk kasih sayang yang bersifat materi tidak dapat menggantikan dahaga mereka akan kasih sayang dan perhatian orangtua. Istilah baku untuk penyebutan kenakalan remaja dalam konsep psikologis adalah juvenile delinquency, yang memiliki arti perilaku jahat atau dursila, atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda. Juvenile delinquency merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang (Simanjuntak, 1984, p. 43).

Juvenile berasal dari bahasa latin “juvenilis” yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Delinquent berasal dari bahasa latin “delinquere” yang berarti: terabaikan, mengabaikan; yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan Delinquency selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah usia 22 tahun (K. Kartono, 2003, p. 6).

Dalam rumusan arti juvenile delinquency oleh Fuad Hasan dan Bimo Waljito, tampak adanya pergesaran mengenai kualitas subjek, dari kualitas anak menjadi remaja atau anak remaja. Bertitik tolak dari konsepsi dasar inilah, juvenile delinquency pada gilirannya mendapat pengertian “kenakalan remaja”. Dalam arti luas tentang kenakalan

remaja adalah perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila dan menyalahi norma-norma agama. Marlina (2009, p. 40) mendefinisikan kenakalan remaja berdasarkan perspektif sosiologis, dalam tiga kategori, yaitu:

1. Hukum, menekankan pada tindakan atau perlakuan yang bertentangan dengan norma yang diklasifikasikan secara hukum;
2. Peranan, dalam hal ini penekanannya pada pelaku, remaja yang peranannya diidentifikasi sebagai kenakalan;
3. Masyarakat, perilaku ini ditentukan oleh masyarakat.

Kenakalan remaja dalam arti luas meliputi perbuatan-perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis, baik yang terdapat dalam KUHP maupun dalam perundang-undangan di luar KUHP (pidanan khusus). Perbuatan tersebut bersifat anti sosial yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, kenakalan remaja tersebut semakin luas cakupannya dan lebih dalam bobot isinya yang meliputi perbuatan-perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga. Contoh sederhana dalam hal ini, yaitu perkelahian antarsekolah, pencurian dan pembentukan geng motor yang suka menimbulkan keresahan masyarakat.

Anak-anak remaja yang melakukan kejahatan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, atau justru menyalahgunakan control diri tersebut, dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri, di samping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan itu pada umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subjektif, yaitu mencapai suatu objek tertentu dengan disertai kekerasan dan agresi. Pada umumnya, remaja sangat egoistis dan sering menyalahgunakan atau melebih-lebihkan harga dirinya.

Adapun penyebab terjadinya kenakalan pada remaja, yaitu sebagai berikut:

1. Identitas. Erickson (Santrock, 2003, p. 522) mengemukakan bahwa masa remaja berada pada tahap krisis identitas versus difusi identitas yang harus di atasi. Ia percaya bahwa perubahan biologis berupa pubertas merupakan awal dari perubahan yang terjadi bersamaan dengan harapan sosial yang dimiliki keluarga, teman sebaya, dan sekolah terhadap remaja. Perubahan biologis dan sosial memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi pada kepribadian remaja, yaitu terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya dan tercapainya identitas peran, dengan cara menggabungkan motivasi, nilai-nilai, kemampuan dan gaya yang dimiliki remaja dengan peran yang dituntut dari remaja. Erickson percaya bahwa kenakalan ditandai dengan kegagalan remaja dalam memenuhi bentuk integrasi yang kedua, yang melibatkan berbagai aspek peran identitas. Bagi Erickson, kenakalan adalah upaya membentuk suatu identitas, walaupun identitas tersebut negatif.
2. Kontrol diri. Kenakalan remaja juga dapat digambarkan sebagai kegagalan untuk mengembangkan kontrol diri yang cukup dalam hal tingkah laku. Beberapa anak gagal mengembangkan kontrol yang esensial yang sudah dimiliki orang lain selama proses pertumbuhan. Kontrol diri yang rendah dalam merespons perbedaan sering menjadi penyebabnya. Remaja terkadang terlalu emosional dalam merespons suatu kejadian dan menolak kejadian tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Feldman & Weinberger pada tahun 1994 menguatkan pendapat bahwa kontrol diri memainkan peranan penting dalam kenakalan remaja

(Santrock, 2003, p. 524). Kebanyakan remaja yang melakukan kenakalan tidak banyak memiliki kemampuan dalam berbagai kompetensi yang dapat meningkatkan cara pandang terhadap dirinya sendiri.

3. Proses keluarga. Menurut Patterson & Stouthamer-Loeber (Santrock, 2003, p. 524), pengawasan orangtua terhadap remaja terutama penting dalam menentukan apakah remaja akan melakukan kenakalan atau tidak. Dalam sebuah penelitian, ditemukan bahwa pengawasan orangtua terhadap keberadaan remaja adalah faktor keluarga yang paling penting dalam meramalkan kenakalan remaja.
4. Kelas sosial atau komunitas. Jenkins & Bell (dalam Santrock, 2003, p. 525) mengatakan bahwa sekalipun kenakalan remaja tidak lagi terbatas pada kelas masalah sosial yang lebih rendah dibandingkan pada masa sebelumnya, beberapa ciri kebudayaan kelas sosial yang lebih rendah cenderung memicu terjadinya kenakalan. Norma yang berlaku di antara teman-teman sebaya dan geng dari kelas sosial yang lebih rendah adalah antisosial dan berlawanan dengan tujuan dan norma masyarakat secara meluas.
5. Rendahnya Pemahaman Keagamaan. Anwar Sutoyo (2009, pp. 99–100) menjelaskan bahwa kenakalan remaja disebabkan fitrah iman yang ada pada individu tidak bisa berkembang dengan sempurna, dan atau imannya berkembang, tetapi tidak berfungsi dengan baik. Iman yang berkembang dengan sempurna akan berfungsi sebagai pemberi arah, pendorong dan sekaligus pengendali bagi fitrah jasmani, rohani dan nafs; yang pada akhirnya akan melahirkan kecenderungan untuk berperilaku positif.

6. Industrialisasi

Dalam pengertian luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan pada bidang ekonomi yang bersifat produktif. Adapun pengertian secara sempit, industri atau industri pengolahan adalah kegiatan yang mengubah barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, dalam hal ini termasuk kegiatan jasa industri dan pekerja perakitan (*assembling*). Menurut Dumairy (1996, p. 207), industri mempunyai dua pengertian, yaitu:

1. Himpunan perusahaan sejenis, contoh industri kertas berarti himpunan perusahaan penghasil kertas.
2. Sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.

Dalam pengertian kedua, kata industri sering disebut sector industri pengolahan atau manufaktur, yaitu salah satu faktor produksi atau lapangan usaha dalam perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan produksi. Proses industrialisasi yang sebagian besar berlangsung di perkotaan mengakibatkan kota banjir imigran dari desa-desa dengan segala aspeknya. Tentu saja, perbedaan budaya antara desa dan kota dan proses adaptasi mengakibatkan terjadinya akulturasi dan asimilasi budaya masyarakat urban perkotaan. Dalam konteks industrialisasi, hubungan desa-kota bukan lagi hubungan administratif, melainkan sebagai transformasi budaya dan sosial.

Gulick (dalam Jamaludin, 2015b, p. 206) menyebutkan pola hubungan antara desa dan kota setelah terjadi industrialisasi dalam kasus tentang adaptasi migran pedesaan di kota-kota Timur Tengah yang mengalami industrialisasi, yaitu Pemeliharaan ikatan-ikatan pedesaan secara alamiah mencakup komunikasi, tetapi di balik hal tersebut ada sejumlah pola budaya yang terkandung dalam hubungan transformasi tersebut, yaitu:

1. Secara teratur kembali ke desa asal untuk menikah, pemakaman dan upacara-upacara lainnya;
2. Pertukaran pemberian secara teratur (seperti produk desa) dan kunjungan-kunjungan;
3. Perubahan tempat tinggal secara musiman;
4. Pulang pergi ke tempat tinggal secara berkala.

Ciri-ciri pedesaan yang dibawa oleh masyarakat urban di kota menunjukkan pola yang berbeda didasarkan pada ciri-ciri desa asal yang dibawa oleh migran. Laporan penelitian UNESCO (1959) tentang desa-kota di Asia yang mengalami proses industrialisasi dan urbanisasi menggambarkan beberapa kota di Asia dan Timur Jauh, bertentangan dengan kota-kota yang ada di Barat. Kota-kota itu masih memiliki ciri-ciri pedesaan yang kental atau kebiasaan pengelompokan desa-desa.

Pada umumnya, kota-kota di negara berkembang cenderung didikotomikan menjadi dua kawasan yang berbeda, yang pertama, kawasan tipe Barat dan yang kedua kawasan tipe pribumi yang terdiri atas pengelompokan desa-desa. Akibatnya, walaupun elite penduduk pribumi yang minoritas itu muncul di kota-kota Asia, mereka memiliki ciri yang sama dengan penduduk yang tinggal di pedesaan dan cenderung mempertahankan ciri desa (folk). Ciri penduduk kota diidentikkan dengan semacam dikotomi "kota-desa" atau kategori "komunitas-masyarakat". Artinya walaupun terjadi proses urbanisasi, industrialisasi dan perkembangan ekonomi berkaitan serta kota-kota masyarakat tradisional memainkan peranan dalam memodernkan struktur sosial dan ekonomi, tetapi sistem-sistem budaya, sikap individu dan tradisi tidak hancur secara keseluruhan. Moore (dalam Jamaludin, 2015b, pp. 206–207) mengatakan bahwa munculnya industrialisasi tidak hanya merupakan unsur pokok bagi pertumbuhan ekonomi secara mendasar, tetapi juga mengarah pada penciptaan suatu budaya umum. Proses ini berlangsung secara kontinu yang selalu melibatkan faktor ekonomi, urbanisasi, transformasi sosial budaya menuju keseimbangan struktur sosial yang baru.

7. Transportasi

Jika dilihat dalam kerangka ekonomi makro, transportasi merupakan tulang punggung perekonomian nasional, regional, dan lokal, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Bahkan, dianggap sebagai urat nadi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mempunyai fungsi sebagai penggerak, pendorong, dan penunjang pembangunan. Keberhasilan pembangunan pun sangat ditentukan oleh peran sektor transportasi sehingga sistem transportasi harus dibina agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang andal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, serta mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa.

Kenworthy (dalam Jamaludin, 2015b, pp. 247–248), mengatakan bahwa kota keberlanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berkaitan erat dengan transportasi. Transportasi yang baik merupakan jantung dari kota keberlanjutan hingga tingkat global. Oleh sebab itu, sudah saatnya diciptakan sistem transportasi secara terpadu dan mampu menyediakan jasa perangkutan yang seimbang dengan tingkat kebutuhan pelayanan jasa angkutan yang memenuhi syarat aman, selamat, nyaman, cepat, lancar, tertib, teratur, efisien, dan murah. Prinsip pembangunan sistem transportasi berkelanjutan adalah: (a) kesetaraan sosial; yaitu layanan transportasi mampu menjangkau masyarakat yang paling miskin, (b) keberlanjutan ekologi; yaitu dampak

lokal transportasi, seperti kebisingan dan polusi udara dan menggantikan kecenderungan ini dengan sistem transportasi yang lebih kecil kontribusinya terhadap kerusakan lingkungan, (c) kesehatan dan keselamatan; transportasi memiliki dampak yang besar terhadap kesehatan dan keselamatan.

Transportasi adalah pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Kegiatan tersebut mengandung tiga hal, yaitu adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui. Ada proses pemindahan dari gerakan tempat asal, kemudian ada kegiatan pengangkutan dimulai dan ke tempat tujuan. Untuk itu, dengan adanya pemindahan barang dan manusia tersebut, transportasi merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang kegiatan ekonomi (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*the servicing sector*) bagi perkembangan ekonomi. Jadi, transportasi merupakan pergerak tingkah laku orang dalam ruang baik dalam membawa dirinya sendiri maupun membawa barang-barang.

Menurut Ofyar Z. Tamin (1997, p. 68) mengatakan bahwa prasarana transportasi mempunyai dua peran utama, yaitu: (1) alat bantu untuk mengarahkan pembangunan di daerah perkotaan dan (2) prasarana bagi pergerakan manusia dan/atau barang yang timbul akibat adanya kegiatan di daerah perkotaan tersebut. Peran pertama sering digunakan oleh perencana pengembang wilayah untuk mengembangkan wilayahnya sesuai dengan rencana. Misalnya akan dikembangkan wilayah baru yang sebelumnya tidak ada peminatnya. Pada kondisi tersebut, prasarana transportasi akan menjadi penting untuk aksesibilitas menuju wilayah tersebut dan akan berdampak pada tingginya minat masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Hal ini merupakan penjelasan peran prasarana transportasi yang kedua, yaitu mendukung pergerakan manusia dan barang.

Kegiatan ekonomi dan transportasi memiliki keterkaitan yang sangat erat, dan saling memengaruhi. Selain itu, Ofyar Z. Tamin (1997, p. 91) juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan dengan transportasi. Hal ini karena akibat pertumbuhan ekonomi, mobilitas seseorang meningkat dan kebutuhan pergerakannya pun meningkat melebihi kapasitas prasarana transportasi yang tersedia. Dapat disimpulkan bahwa transportasi dan perekonomian memiliki keterkaitan yang erat. Pada satu sisi transportasi dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi suatu daerah, karena dengan adanya infrastruktur transportasi, suatu daerah dapat meningkatkan kegiatan ekonominya. Pada sisi lain, akibat tingginya kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi meningkat timbul masalah transportasi, karena terjadinya kemacetan lalu lintas, sehingga perlunya penambahan jalur transportasi untuk mengimbangi tingginya kegiatan ekonomi tersebut.

Pentingnya peran sektor transportasi bagi kegiatan ekonomi mengharuskan sebuah sistem transportasi yang andal, efisien, dan efektif. Transportasi yang efektif memiliki arti bahwa sistem transportasi yang memenuhi kapasitas yang angkut, terpadu atau terintegrasi tertib, lancar, cepat dan tepat, selamat, aman, nyaman dan biaya terjangkau secara ekonomi. Adapun efisien dalam arti beban publik sebagai pengguna jasa transportasi menjadi rendah dan memiliki utilitas yang tinggi. Peranan perencanaan transportasi adalah memastikan bahwa kebutuhanakan pergerakan dalam bentuk pergerakan manusia, barang, atau kendaraan dapat ditunjang oleh sistem prasarana transportasi yang ada dan harus beroperasi di bawah kapasitasnya.

Kebutuhan pergerakan mempunyai ciri yang berbeda-beda, seperti perbedaan tujuan perjalanan, moda transportasi yang digunakan, dan waktu terjadinya pergerakan.

Tamin (dalam Jamaludin, 2015b, p. 260) mengatakan bahwa sistem prasarana transportasi terbentuk dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem prasarana (penunjang), misalnya sistem jaringan jalan raya atau jalan rel termasuk terminal;
2. Sistem manajemen transportasi, misalnya undang-undang, peraturan, dan kebijakan;
3. Beberapa jenis moda transportasi dengan berbagai macam operatornya.

BAB IX

BIAS PEMBANGUNAN MASYARAKAT PEDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Materi pada Bab IX ini menguraikan tentang bias pembangunan masyarakat desa dan kota yang terdiri dari: (1) interaksi desa dan kota; (2) fenomena bias pedesaan dan perkotaan; (3) bentuk bias pedesaan dan perkotaan; (4) dampak bias pedesaan dan perkotaan.

2. Manfaat Perkuliahan

Diharapkan setelah membaca Bab ini mahasiswa dapat memahami tentang bias pembangunan masyarakat pedesaan dan perkotaan khususnya di wilayah Indonesia.

3. Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tentang bias pembangunan masyarakat pedesaan dan perkotaan.

B. Materi

1. Interaksi Desa dan Kota

Jika kita mendiskusikan tentang interaksi desa dan kota maka salah satu isu yang menarik untuk dibahas adalah ketertinggalan desa dalam berbagai aspek dibanding dengan adanya kemajuan hidup di kota. Desa dan masyarakatnya masih berada pada kondisi serba kekurangan dan tertinggal dibanding kondisi masyarakat kota di berbagai aspek kehidupan, khususnya sosial ekonomi. Kota dipandang lebih sejahtera dari pada desa dari ukuran ekonomi. Terdapat anggapan bahwa pembangunan nasional justru menciptakan kesenjangan antara antara desa dan kota. Pembangunan yang bias perkotaan semakin memperbesar disparitas antara desa dan kota. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika negara berkembang seperti Indonesia memulai pembangunannya lebih banyak diletakkan pada sektor industri, sehingga sektor pertanian bukan menjadi prioritas. Dengan adanya prioritas industri di perkotaan maka pertanian mulai terabaikan sehingga memberi dampak terhadap adanya kesenjangan antara desa dan kota (Nain, 2019, pp. 136–137).

Masalah kesenjangan tidak hanya terjadi antara desa dan kota tetapi juga dalam aspek yang luas, seperti kesenjangan antara negara maju dengan negara berkembang, negara kaya dengan negara miskin, termasuk kesenjangan antar daerah dan kesenjangan antara orang-orang kaya dan orang miskin. Kesenjangan yang terjadi di dalam derap pembangunan cenderung di ukur dengan pendapatan. Dalam pembicaraan masa kini diungkapkan dalam pernyataan seperti "dunia terbelah" dan "jurang yang semakin meluas", meskipun kalau diperhatikan dunia kita tidak terbelah, bahkan sebaliknya dunia itu satu. Kesenjangan diberbagai masyarakat dan negara timbul karena segala sesuatunya semakin terkait antara satu dengan lainnya. Dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat desa, maka interaksi antara desa dan kota tidak terlepas dari kesenjangan, yang dapat berdampak pada munculnya dikotomi desa-kota. Menurut

Chambers (dalam Nain, 2019) mengatakan bahwa dikotomi desa-kota seperti hubungan dengan ilmu pengetahuan inti dan pinggiran. Disatu sisi, berdampingan unsur kaya, kota, industrialisasi, status yang tinggi; sedangkan pada sisi lain, miskin, desa, pertanian dan status pinggiran yang rendah. Di lingkungan yang pertama, terdapat daya tarik menarik dan mengukuhkan kekuatan, kekuasaan, prestise, sumber daya, latihan yang profesional serta kemampuan untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan.

Jika kita melihat dimasa lalu yang terkait dengan terjadinya kesenjangan, maka sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Sebagai gambaran selama periode 1969-1973 pertumbuhan ekonomi mencapai 8,66 persen pertahun dan kira-kira 7-8 persen pertahun dalam Pelita I dan II. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut Bank dunia dalam World Development Report 1982 telah menaikkan kelas Indonesia dari kelompok ekonomi berpenghasilan rendah menjadi kelompok ekonomi berpenghasilan menengah. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat sampai 7 persen dan jumlah penduduk miskin menurun sampai tahun 1990 namun masalah ketimpangan tetap berlangsung. Pertumbuhan ekonomi yang pesat ternyata menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan antara penduduk kota dan desa. Selama periode pembangunan dari tahun 1987-1990 ketimpangan pendapatan penduduk kota dan desa terus meningkat yaitu pertumbuhan kemakmuran di pedesaan sekitar 11,4 persen pertahun dan di perkotaan sekitar 25,6 persen pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang berhasil ternyata lebih banyak di nikmati oleh penduduk kota dari pada penduduk desa, sehingga tidak mengherankan apabila penduduk miskin lebih banyak di pedesaan (Nain, 2019).

Pembangunan dapat dikatakan berhasil dan bermakna apabila hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat, terutama kelompok miskin. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi belaka, akan berakibat pada terabaikannya kelompok miskin dalam menikmati program-program pembangunan. Hal ini ditegaskan pula oleh Brook bahwa pembangunan sebagai upaya pegerakan kearah kesejahteraan diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran serta ketimpangan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan perubahan struktural dimasyarakat. Ketidakmampuan strategi pertumbuhan mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan antara pedesaan dan perkotaan maka diperlukan suatu model pembangunan yang egalitarian dimana produksi dan konsumsi harus memenuhi baik kriteria efisiensi maupun pemerataan dan keadilan serta kebijaksanaan pemberantasan kemiskinan yang ditujukan untuk mengatasi berbagai bentuk disparitas, dan diperlukan transformasi politik yang membuka partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks inilah pemerataan pembangunan kemudian menjadi isu sentral dalam proses pembangunan di Indonesia. Pemerataan pembangunan di usahakan pencapaiannya melalui strategi delapan jalur pemerataan yang bertujuan mengurangi ketimpangan dan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan pokok dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Usaha yang telah dilakukan Pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan antara lain di implementasikan melalui kebijakan. Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan cara menyelenggarakan berbagai proyek Insruksi Presiden (Inpres) karena proyek itu akan mendatangkan pentrasferan sumber-sumber pembanguna dari pusat ke daerah. Kedua, mempermudah lapisan sosial miskin untuk memperoleh akses dalam berbagai pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, air bersih, sanitasi dan lain-lain. Ketiga, penyediaan fasilitas-fasilitas kredit untuk masyarakat lapisan bawah seperti kupedes,

kredit bimas pembangunan pertanian. Keempat, pembangunan Infrastruktur pedesaan, khususnya pembangunan pertanian. Kelima, pengembangan kelembagaan seperti program pengembangan wilayah (PPW), pengembangan kawasan terpadu (PKT), program peningkatan pendapatan petani kecil dan program pengentasan kemiskinan di desa tertinggal (IDT).

Secara konseptual kebijakan pembangunan seperti disebutkan di atas pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan sehingga mengurangi terjadinya ketimpangan antara kota dan desa atau dengan kata lain dapat mengurangi secara bertahap perbedaan antara kota dan desa. Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara desa dan kota adalah faktor isolasi fisik, yang dapat pula mengakibatkan terjadinya isolasi sosial dan kultural dalam arti kontak sosial dan kebudayaan tidak terjadi antara masyarakat desa dan kota.

Dalam upaya pengembangan masyarakat desa maka untuk mengatasi terjadinya isolasi fisik diprioritaskan pembangunan intrastruktur dipedesaan seperti jalan dan jembatan, agar masyarakat tidak terisolasi sehingga ada hubungan komunikasi yang lancar antara desa dan kota. Menurut Por Horton dalam buku "*The Sociology*" (1960) mengatakan bahwa sejak tahun 1970 tidak ada lagi dikotomi kota dan desa. Hanya saja dalam penjelasan Horton tidak disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga tidak terjadi dikotomi desa dan kota. Akan tetapi paling tidak ini menunjukkan bahwa antara desa dan kota tidak ada lagi perbedaan yang ekstrim seperti jika kita melihat hubungan desa-kota dalam perspektif modernisasi dimana desa bersifat tradisional dan kota bersifat modern.

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi transportasi yang memberi kemudahan manusia untuk melakukan interaksi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudahan hidup yang diperoleh di kota dapat juga didapatkan di desa sekalipun lebih rendah tingkatannya, sehingga praktis tidak relevan lagi untuk membedakan desa dan kota. Perbedaan desa-kota sekedar berkaitan dengan pembagian wilayah administrasi yang dibentuk pemerintah guna memungkinkan terselenggarakan fungsi-fungsi administrasi negara termasuk relevan disimak dalam dimensi politik, ekonomi dan kelembagaan formal lainnya, namun kurang relevan dalam dimensi sosiologisnya.

Meskipun tidak relevan secara sosiologis namun dalam pandangan pembangunan pedesaan yang paling mutakhir saat ini, melihat hubungan desa-kota selalu ditempatkan dalam hubungan keterkaitan (*linkages*) yang tidak terpisahkan dan hubungan yang saling memperkuat. Keterkaitan kota dan desa tidak terpisahkan dari struktur ekonomi global atau mata rantai kekuasaan global yang secara status quo cenderung ingin mempertahankan kemiskinan dan keterbelakangan pedesaan. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dan mewaspadaikan keinginan untuk berglobalisasi yang disertai dengan kepentingan-kepentingan untuk memperluas operasi perusahaan trans nasional yang sebenarnya akan memperlemah perkembangan kawasan pedesaan.

2. Fenomena Bias Pedesaan dan Perkotaan

Menurut Dalal Clayton (dalam Nain, 2017), pedesaan di dunia ketiga atau negara-negara yang sedang berkembang secara umum dicirikan oleh tiga isu menonjol. Pertama, adalah masalah kemiskinan dan terbatasnya alternatif lapangan kerja. Kedua, adalah masalah pengelolaan sumber daya lahan secara berkelanjutan, dan masalah-masalah terkait dengan hak untuk mengakses penggunaan sumberdaya utama khususnya jalan. Ketiga, masalah hubungan dan keterkaitannya keperkotaan (urban linkages), termasuk spatial links (aliran penduduk, barang, limbah, kapital/finansial serta informasi) dan sektoral links (keterkaitan dengan aktivitas-aktivitas berbasis pedesaan diperkotaan seperti urban agriculture dan masalah membangkitkan sektor manufaktur dan jasa di kawasan pedesaan dan implikasi terhadap perencanaan keterkaitan desa-kota.

Dari ketiga permasalahan tersebut diatas maka salah yang menarik untuk dikaji adalah keterkaitan desa-kota dalam pelaksanaan pembangunan desa. Untuk memperjelas hubungan itu di era tahun 1970-an, Lipton (dalam Nain, 2017) mengenalkan istilah urban bias, yaitu pedesaan secara politik, sosial dan ekonomi cenderung memiliki posisi melayani atau membantu perkotaan. Apabila kita mengamati pelaksanaan pembangunan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan, maka seringkali kebijakan pembangunan yang dilaksanakan belum mencapai sasaran yang tepat dan optimal. Hal ini karena kebijakan yang dilaksanakan kurang memihak dan menguntungkan masyarakat desa sebab mengalami suatu bias perkotaan (urban bias). Kebijakan yang hanya menguntungkan masyarakat kota yang secara sosial dan ekonomi kondisi kehidupannya jauh lebih baik.

Menurut Chambers (dalam Nain, 2017, pp. 237–238), mengatakan bahwa bias-bias perkotaan secara sistematis telah menjaga mental para perencana sehingga tidak memungkinkan mereka memahami isu-isu dasar pedesaan akibat adanya: (1) insentif berkarir yang lebih baik di ibu kota, (2) rendahnya apresiasi atas peranan pertanian secara ekonomi, (3) kecenderungan berkunjung secara singkat ke pedesaan karena ketidaknyamanan, (4) menghindari kunjungan saat-saat situasi terburuk, dan (5) keengganan mempertanyakan masalah-masalah kemiskinan dan kesulitan pada elite-elite desa berdiplomasi dan lain-lain. Dampaknya sebagian besar perencana tidak dapat memahami permasalahan pedesaan secara komprehensif dan mendalam, sehingga akhirnya cenderung memandang strategi urbanisasi sebagai pembangunan wilayah yang utama. Diluar pandangan yang urban bias, walaupun sangat minor terdapat pula ekstrim lain yakni pandangan yang rural bias atau pandangan yang bersifat urban phobi. Berbagai pihak cenderung memandang perkotaan sebagai parasit pedesaan secara ekstrim. Perkotaan tidak dipandang sebagai sistem yang secara positif dapat berpengaruh pada kemajuan pedesaan.

Perlu diketahui bahwa tidak semua kebijakan pembangunan yang dilaksanakan dapat menimbulkan bias perkotaan, namun dalam kenyataannya terdapat beberapa bentuk program pembangunan setelah di kaji secara mendalam menunjukkan terjadinya bias perkotaan. Oleh karena itu argumentasi pemerintah untuk memihak kepada kepentingan masyarakat desa sebagai prioritas terabaikan, akibatnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa masih tertinggal jika dibandingkan dengan masyarakat kota. Berdasarkan kajian Michael Lipton (Nain, 2017, p. 238) dalam tulisannya mengenai "*Bias Perkotaan dalam Perkembangan Dunia*" dikemukakan bahwa konflik yang terjadi di negara sedang berkembang bukanlah antara tenaga kerja dan modal, serta bukan pula antara kepentingan asing dan kepentingan nasional. Akan tetapi konflik yang terjadi

adalah antar kelas pedesaan dan kelas perkotaan. Selanjutnya dikatakan bahwa sektor pedesaan memiliki jumlah terbesar dari kemiskinan sedangkan perkotaan memiliki kelebihan dalam hal sumber daya manusia, organisasi dan kekuasaan.

Pertentangan yang terjadi akan dimenangkan oleh sektor perkotaan sehingga pembangunan lebih lambat dan tidak merata dipedesaan, karena alokasi sumber daya yang lebih mengutamakan daerah perkotaan. Perkotaan yang identik dengan industri dan pedesaan dengan pertanian menjadi tidak seimbang, karena alokasi pengeluaran pemerintah (*public expenditure*) yang memberi prioritas sektor industri perkotaan dengan mengabaikan sektor pertanian yang merupakan bagian penting dalam meningkatkan pendapatan nasional.

Dari uraian terdahulu telah dijelaskan bahwa dengan berakhirnya isolasi fisik karena pengaruh perkembangan komunikasi dan transportasi sehingga secara sosiologis antara desa dan kota kurang relevan lagi untuk dibedakan, namun untuk pembahasan tulisan ini akan mengacu pada analisa Lipton dalam melihat perbedaan kota dan desa berdasarkan perbedaan alokasi sumber daya yang berakibat pada terjadinya ketidakseimbangan antara perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya Lipton mengatakan bahwa perbedaan desa-kota adalah dalam hal upah yang dapat dilihat dari perbandingan pendapatan desa-kota yang didasarkan pada indeks standar upah dikota dan indeks kasar pendapatan pertanian, sehingga harga-harga yang telah ditentukan untuk hasil tanaman pangan.

Di Indonesia ada kebijakan pemerintah pada level pemasaran hasil produksi yaitu kebijakan penetapan harga dasar gabah, yang merupakan kebijakan lanjutan modernisasi pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Kebijakan penetapan harga dasar gabah ini sesungguhnya tidak lepas dari keinginan pemerintah untuk dapat mengendalikan harga beras dipasaran, sebagai prasyarat dalam menciptakan stabilitas masyarakat. Dengan dalih stabilitas masyarakat maka terjadi depolitisasi di tingkat petani di pedesaan. Kalau ditelaah kebijakan tersebut maka yang paling banyak memperoleh keuntungan didalamnya adalah masyarakat perkotaan, karena dengan pengendalian harga gabah/beras dipasaran mereka mendapatkan beras yang murah. Dampaknya petani dipedesaan mengalami kerugian karena tidak ada nilai surplus dari hasil penjualan produksinya.

Hak politik petani untuk memengaruhi kebijakan pemerintah yang merugikan dirinya sulit terlaksana karena tekanan pemerintah terlalu kuat sampai kepada birokrasi paling rendah, sehingga apapun kebijakan pemerintah mereka terima meskipun menimbulkan beban yang dapat membawa kerugian dan penderitaan petani di pedesaan. Untuk itu diperlukan pembangunan yang memihak kalangan bawah, negara atau pemerintah mengurangi kekuasaan politiknya untuk melakukan olah kekuasaan hegemonik terhadap rakyatnya. Kesadaran akan keadilan dan ciri demokratisme (kesetaraan dan kesejajaran) menjadi penciri penting konsep pembangunan kontemporer terutama di era reformasi di Indonesia (Arsyad, 2011, p. 22).

3. Bentuk Bias Pedesaan dan Perkotaan

Berdasarkan penjelasan di depan telah digambarkan bahwa fenomena bias perkotaan berkaitan dengan paradigma pembangunan yang dipusatkan pada pertumbuhan ekonomi, yang berdampak pada terjadinya ketidakseimbangan perkembangan antara sektor perkotaan dan pedesaan. Mengenai pembangunan bias perkotaan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat desa dalam penerapannya mempunyai bentuk yang bervariasi. Dalam kebijakan pembangunan yang variatif seperti kebijakan pembangunan pada sektor tertentu di perkotaan, kebijakan tentang subsidi, kebijakan pemerintah tentang intervensi harga beras sampai kebijakan kultural.

Untuk melihat gambaran tentang pembangunan bias perkotaan dibawah ini akan diuraikan beberapa kebijakan yang selama ini terjadi di Indonesia, yang apabila diamati cukup memberi dampak kepada ketidakberdayaan masyarakat desa khususnya masyarakat desa yang miskin. Adapun kebijakan pemerintah yang bias perkotaan adalah:

1. Kebijakan pemerintah yang melihat pembangunan pedesaan sebagai subordinat dari pembangunan perkotaan.

Maksudnya pembangunan perkotaan yang utama, sedangkan pembangunan pedesaan bersifat menunjang pembangunan perkotaan. Jika kita perhatikan dimasa lalu mengenai pembangunan pedesaan, maka setelah ditelusuri dalam dokumen Repelita maka ada indikasi penganaknirian pembangunan pedesaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mubyarto (Nain, 2017, pp. 240–241) bahwa dalam Repelita kita memang tidak akan menemukan adanya suatu bab khusus yang membahas pembangunan pedesaan. Dalam klasifikasi Repelita, pembangunan pedesaan diletakkan sebagai salah satu bagian dari pembangunan daerah, yang meliputi pembangunan desa, pembangunan ruang daerah dan penataan agraria. Sehubungan dengan pembangunan perkotaan Repelita antara lain menggariskan bahwa pembangunan perkotaan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan secara terencana dan terpadu. Sedangkan pembangunan masyarakat desa, Repelita menggariskan bahwa pembangunan masyarakat desa perlu terus ditingkatkan terutama melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan.

Berdasarkan kedua penjelasan tersebut diatas dapat disaksikan betapa adanya semacam kesenjangan untuk disatu pihak meningkatkan pembangunan perkotaan secara terencana dan terpadu, sedangkan dipihak lain pembangunan pedesaan lebih banyak diserahkan pada prakarsa dan swadaya masyarakat desa sendiri. Penekanan pembangunan pedesaan pada pembangunan masyarakat secara tidak langsung merupakan pengakuan terhadap keterbelakangan masyarakat desa dibandingkan dengan masyarakat kota. Prioritas pada pembangunan perkotaan dimaksudkan bahwa perkotaan akan mengalami transformasi ekonomi lebih cepat dibandingkan dengan pedesaan.

Sebagai konsekuensi dari pengembangan perkotaan maka desakan kebutuhan lahan untuk pengembangan kawasan industri dan fasilitas pelayanan meningkat, menyebabkan lahan garapan petani dipinggiran kota banyak dialih fungsikan sehingga lahan pertanian dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Masyarakat pinggiran ada yang sukarela menjual lahan garapan mereka kepada pemilik modal, tetapi ada pula secara terpaksa melepaskan lahan garapan mereka. Pengalihan, penggusuran dan pengusiran dengan cara-cara sistimatis menyebabkan para petani tersingkir.

Berdasarkan laporan surat kabar di kota-kota provinsi di Indonesia, bahwa sejak Juli 1994 sampai dengan September 1996 terdapat 891 pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berupa "penyitaan lahan melalui berbagai cara" dan "perampasan lahan melalui berbagai cara". Suatu jumlah yang luar biasa, mengingat bahwa yang dikemukakan dimedia massa berdasar kenyataan. Meskipun jenis sengketa tanah yang terjadi bervariasi, mayoritas sengketa adalah antara modal besar dengan rakyat penguasa tanah dan pembangunan infrastruktur milik pemerintah versus rakyat penguasa tanah (Fauzi, 2017, pp. 1–2). Selama pemerintahan orde baru sengketa tanah yang terjadi adalah akibat dari ekspansi besar-besaran dari modal yang difasilitasi oleh hukum dan kebijakan pemerintah.

Dampaknya adalah orang-orang yang tasingkir tadi sebagian tetap tinggal di desa dengan tetap miskin dan yang lainnya mengadu nasib dikota. Oleh karena industri yang dikembangkan di perkotaan adalah industri yang menggunakan teknologi tinggi (high technology), sementara sumber daya manusia pedesaan yang melakukan migrasi ke kota kebanyakan berkualitas rendah. Dengan demikian mereka mengalami kesulitan dalam memasuki pasar kerja sektor modern, akibatnya terjadilah pengangguran terbuka yang sangat berpotensi menjadi sumber kerawanan sosial diperkotaan. Sementara itu keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari kebijakan industri mengalir ke pemilik modal yang berada di kota dari pada ke golongan miskin yang berada di pedesaan (Nain, 2017).

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa maka diperlukan upaya yang serius dari pemerintah untuk melihat sektor pertanian sebagai sektor potensial untuk dikembangkan sejajar dengan sektor industri, karena di samping dapat menciptakan lapangan kerja juga dapat meningkatkan pendapatan nasional. Berdasarkan pengamatan bahwa ketika krisis ekonomi berlangsung pada tahun 1997 sektor pertanian untuk komoditi tertentu tidak mengalami dampak krisis, bahkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat karena nilai jualnya disesuaikan dengan perkembangan nilai dollar Amerika Serikat seperti komoditi kakao, lada dan udang. Sedangkan industri di perkotaan banyak yang colaps dan tutup terutama industri yang bahan bakunya diimport dari luar negeri, akibatnya timbul pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berdampak pada masalah pengangguran di perkotaan.

Oleh karena itu agar terjadi keseimbangan pembangunan pedesaan dan perkotaan maka industrialisasi tidak hanya dipusatkan diperkotaan, tetapi juga perlu dikembangkan di pedesaan sesuai dengan kondisi, potensi dan sumberdaya lokal di pedesaan melalui pengembangan agroindustri, kerajinan dan pengembangan teknologi tepat guna yang dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan. Menurut Mochtar Mas'ood (dalam Nain, 2017, pp. 242–243) mengatakan bahwa dalam melihat hubungan antara masyarakat desa dengan masyarakat kota yang diperlukan bukan pendekatan yang menekankan pembentukan kapital, tetapi yang lebih penting adalah memperhatikan tenaga kerja dan penyediaan lapangan kerja.

2. Kebijakan Pembangunan Pertanian di Indonesia melalui penetapan harga dasar gabah/ beras, merupakan indikasi adanya kebijakan Pemerintah yang bias perkotaan

Kebijakan modernisasi pertanian di Indonesia melalui penerapan panca usaha tani kelihatannya tidak berhenti sampai disitu, tetapi ditindaklanjuti dengan kebijakan penetapan harga gabah/beras setiap tahun. Kebijakan ini sesungguhnya tidak lepas dari keinginan pemerintah untuk dapat mengendalikan harga beras di pasaran. Harga beras

pada tingkat rendah dan stabil akan menekan upah buruh dan pegawai sebagai keunggulan kompetitif untuk menarik investor yang berujung pada peningkatan industri. Setiap kali terjadi harga dasar gabah/beras selalu diikuti dengan argumen untuk kesejahteraan petani.

Namun demikian apabila dicermati justru penetapan harga dasar tersebut yang membatasi petani menentukan harga sehingga petani lebih banyak dirugikan, karena mereka sulit menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip ekonomi yang dibutuhkan dalam proses produksi pertaniannya. Kalkulasi biaya produksi dan harga jual yang akan diterima petani tidak diperhitungkan pemerintah. Di samping itu kenaikan secara periodik harga dasar gabah/beras selalu juga di ikuti oleh kenaikan harga sarana produksi. Apalagi setelah subsidi pupuk dan pestisida dicabut pemerintah pada bulan Desember 1998 sehingga daya beli petani tidak pernah meningkat. Nasib petani lebih buruk dibandingkan buruh di sektor industri yang tingkat upah nominalnya diproteksi melalui instrumen upah minimum regional (UMR) baik secara geografis atau sektoral. (Ismawan, 2000, p. 6).

Implikasinya yang diuntungkan dari kebijakan penetapan harga dasar gabah/beras adalah penduduk perkotaan yang menjadi konsumen beras, karena mereka dapat memperoleh beras dengan harga murah. Masyarakat non petani yang selama ini telah dikonstruksi untuk memperoleh beras murah, begitu terjadi lonjakan harga beras mereka akan protes sehingga muncul resistensi masyarakat untuk mengancam kestabilan pemerintahan. Untuk itu diperlukan political will pemerintah agar dapat memberlakukan kembali subsidi kepada petani. Namun subsidi yang diperlukan bukan subsidi konvensional dalam bentuk input produksi seperti benih, pupuk dan pestisida sebagaimana yang dilakukan selama ini. Oleh karena subsidi input yang diuntungkan adalah produsen atau penjual pupuk. Subsidi yang diperlukan adalah subsidi output produksi seperti subsidi harga. Dengan subsidi harga berarti pemerintah dapat membeli beras petani dengan harga tinggi kemudian dijual kepada masyarakat sedikit di bawahnya, sehingga subsidi tersebut dapat menyentuh sasaran karena membantu masyarakat luas khususnya masyarakat miskin perkotaan.

Subsidi harga di tingkat petani hendaknya diciptakan sebagai terobosan baru untuk stimulan, agar petani bersemangat memproduksi karena adanya jaminan pasar terhadap komoditi yang dihasilkan. Melalui subsidi harga diharapkan petani dapat memperoleh keuntungan, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatannya. Hal ini relevan dengan proposisi dari George Homan dalam Ritzer (2003, p. 78) bahwa makin tinggi ganjaran (reward) yang diperoleh atau yang akan diperoleh makin besar kemungkinan sesuatu tingkahlaku akan diulang (reinforcement). Melalui stimulan harga yang menguntungkan, maka tanpa digerakkan dari pemerintah petani sendiri dapat melakukan proses produksi secara berkelanjutan. Dalam kaitannya dengan proposisi Homan dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi keuntungan yang diperoleh petani, maka semakin besar pula tindakannya untuk diulangi dalam kegiatan usahatani. Sebaliknya jika subsidi harga tidak menguntungkan petani, maka yang dilakukan adalah menerapkan etika moral subsidi dengan mendahulukan keselamatan (safety first) dan termasuk juga upaya meminimalkan resiko (minimizing risk) (Nain, 2017).

3. Kebijakan Pemerintah dibidang kesehatan yang cenderung bias perkotaan adalah kebijakan alokasi anggaran pembangunan kesehatan yang diprioritaskan pada pelayanan kesehatan kuratif termasuk pelayanan rumah sakit

Kebijakan alokasi anggaran yang diprioritaskan pada pelayanan kuratif bukannya tanpa masalah, karena anggaran tersebut lebih banyak dinikmati oleh penduduk yang tidak miskin. Sebagian besar pelayanan rumah sakit ternyata hanya dinikmati oleh kelompok penduduk tidak miskin, terutama di perkotaan, ketimpangan akses antara penduduk miskin dan tidak miskin dalam pelayanan kesehatan. Sanitasi dan air bersih cukup memprihatinkan. Penduduk yang terlayani air minum perpipaan baru mencapai 9%, selebihnya masih mengambil langsung dari sumber yang tidak terlindungi. Dalam kenyataannya bahwa sekitar 85% dari anggaran pembangunan kesehatan justru dialokasikan untuk pelayanan kuratif. Sementara pelayanan kesehatan preventif seperti pendidikan, penyuluhan kesehatan, imunisasi, sanitasi, air bersih dan perbaikan gizi yang banyak dinikmati oleh penduduk miskin hanya memperoleh anggaran sekitar 15% (Nain, 2017, p. 245).

Sebagaimana dirilis Kompas.Com pada tanggal 6 Juli 2015, bahwa anggaran kesehatan untuk tahun 2016 mengalami peningkatan. Kalau tahun 2015 mencapai 3,45 persen dari APBN maka untuk tahun 2016 mencapai 5,05 persen, kenaikannya 43 persen. Kenaikan anggaran difokuskan pada penguatan fasilitas kesehatan primer dan pemberdayaan masyarakat. Titik beratnya pada program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Namun hal ini sedikit berbeda dengan pernyataan Ketua umum Ikatan Dokter Indonesia Zaenul Abidin; yang menyatakan peningkatan anggaran kesehatan harus dipakai untuk menjalankan program kesehatan yang bagus. Penambahan anggaran untuk sarana-prasarana puskesmas dinilai masih bersifat kuratif. Kenyataan ini menjadi salah satu bukti dari adanya bias birokrasi yang cenderung memihak kelas menengah ke atas dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, sehingga yang diuntungkan adalah penduduk perkotaan (Nain, 2017, p. 245).

Oleh karena itu tidak mengherankan kalau sebagian besar subsidi pemerintah untuk pelayanan sosial khususnya dibidang kesehatan justru dinikmati oleh penduduk yang tidak miskin di perkotaan. Untuk itu agar subsidi pembangunan kesehatan dapat lebih merata ke pedesaan diperlukan adanya alokasi anggaran yang seimbang antara pelayanan kuratif dan pelayanan preventif. Apabila perlu justru pelayanan preventif lebih ditingkatkan, karena sampai sekarang derajat kesehatan masyarakat desa jauh lebih buruk dari pada masyarakat kota seperti masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi dan balita serta rendahnya pemenuhan air bersih, sanitasi, kondisi gizi yang buruk dan sebagainya.

Dari berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang dilaksanakan selama ini sebetulnya cukup banyak yang cenderung bias perkotaan. Namun dari ketiga bentuk kebijakan yang dikemukakan di atas dianggap sudah representatif untuk menjelaskan adanya kebijakan pembangunan bias perkotaan yang berdampak pada ketidakberdayaan masyarakat desa. Akibatnya mereka tidak dapat meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu pembangunan masyarakat desa yang dilakukan belum mencapai hasil yang optimal karena masalah kemiskinan dan ketimpangan antara desa dan kota masih tetap berlangsung, sehingga kesejahteraan masyarakat desa belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Dengan demikian kedepan pembangunan masyarakat desa perlu lebih ditingkatkan agar sejajar dan seimbang dengan pembangunan perkotaan, sehingga

interaksi antara desa dan kota saling mendukung untuk tercapainya keberhasilan pembangunan di Indonesia.

4. Dampak Bias Pedesaan dan Perkotaan

Bahwa pembangunan bias perkotaan yang berlangsung selama ini telah memberikan dampak kepada ketidakseimbangan antara sektor pedesaan dan sektor perkotaan, yang membawa implikasi terhadap terhambatnya proses pembangunan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Misra dan Bhooson (dalam Nain, 2017, pp. 246–247) bahwa kemelaratan yang dialami oleh masyarakat pedesaan disebabkan karena adanya hubungan eksploitatif antara kota dan desa. Sistem perkotaan disalah gunakan menjadi alat pengisap yang menguras kekayaan daerah pedesaan untuk kepentingan kota. Akibatnya hubungan fungsional antara kota dan desa terabaikan sehingga kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan semakin besar.

Pembanguna bias perkotaan pada dasarnya berkaitan dengan pendekatan pusat-pusat pertumbuhan (*growth center*) dengan meletakkan sektor industri sebagai sektor unggul. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan di negara sedang berkembang termasuk Indonesia dalam melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa ada keyakinan bahwa meletakkan dan memusatkan industri dipusat-pusat pertumbuhan akan dapat memecahkan masalah keterbelakangan, keterbatasan peluang kerja dan kemiskinan di daerah pinggiran (pedesaan) Secara terinci diyakini bahwa daerah belakang dapat berkembang melalui efek menyebar (*spread effect*) atau efek tetesan kebawah (*trickle down effects*) dari pusat-pusat pertumbuhan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa para pekerja dikota yang bekerja disektor modern akan memperoleh kelebihan penghasilan dan diharapkan mampu menabung yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan. Demikian juga para pengusaha dan pemilik modal yang beralokasi di pusat pertumbuhan di perkotaan diharapkan dapat menabung lebih banyak untuk proses akumulasi modal. Bila akumulasi modal sudah terjadi maka dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek sosial yang dapat menghapuskan keterbelakangan dan kemiskinan di pedesaan. Dengan demikian sangat wajar jika pada tahap awal pembangunan sektor pertanian dipandang perlu untuk dikorbankan sementara agar modal dan pekerja murah yang dibutuhkan untuk industrialisasi dapat tersedia. Strategi pertumbuhan ini dipandang sebagai jalan pintas untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat; sehingga suatu masyarakat dapat mengakulasi modal untuk kesinambungan pembangunan bila sektor modern (industri) dikembangkan (Nain, 2017, pp. 247–248).

Dalam perkembangannya menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan telah gagal dan tidak mempunyai efek menyebar atau tetesan kebawah dari pusat-pusat pertumbuhan seperti yang direncanakan. Target pertumbuhan yang dicapai tidak pernah dipikirkan mengenai cara meneteskan kue pembangunan dari pusat kepedesaan agar lebih merata keseluruh lapisan masyarakat. Langkah yang telah ditempuh selama ini melalui berbagai program Inpres seperti Inpres bantuan desa, kesehatan, pendidikan dan berbagai penyaluran kredit ke pedesaan namun distribusi untuk pedesaan masih terbatas, sehingga hasil yang dicapai belum memenuhi sasaran untuk meningkatkan kehidupan masyarakat desa. Disamping itu karena penekanan pada pertumbuhan ekonomi maka program pembangunan yang dilaksanakan dengan pola top down yang proses perencanaan dan pendanaannya dilakukan dari perkotaan yang kurang

memahami masalah yang dihadapi masyarakat desa sehingga seringkali program pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Robert Chambers (dalam Nain, 2017) karena program pembangunan desa di desain oleh orang luar (outsider) dari kalangan birokrat pemerintah yang berasal dari perkotaan maka seringkali dalam pelaksanaan dapat menimbulkan urban bias. Bias perkotaan ini nampak dari perhatian mereka pada daerah-daerah yang dekat pinggiran kota yang dapat dijangkau dengan kendaraan secara lancar, sehingga masyarakat desa yang miskin di daerah terpencil luput dari perhatian mereka. Pembangunan yang dilaksanakan juga pada daerah-daerah yang mudah terlihat yang mengikuti jalan raya sehingga dapat pula menimbulkan bias road side. Proyek-proyek yang mengikuti jalan raya seperti pabrik, kantor, toko, dan prasarana pasar semuanya cenderung bertebaran di sepanjang jalan raya. Selanjutnya dikatakan Chambers bahwa pelayanan pemerintah yang dekat jalan raya pada umumnya lebih baik mutunya baik petugas maupun peralatannya lebih lengkap.

Edward Henevald (Nain, 2017, pp. 248–249) menemukan dua buah sekolah dekat jalan raya trans Sumatera yang kelebihan guru sedangkan sekolah lainnya sejauh satu kilometer dari jalan raya kekurangan guru. Setiap membangun ruas jalan, harga lahan mendadak naik dan hanya orang-orang kaya atau yang berkuasa yang dapat mengambil keuntungan dari perkembangan itu. Dari gambaran pembangunan bias perkotaan seperti diuraikan diatas yang difokuskan pada pembangunan daerah perkotaan dan cenderung mengabaikan masyarakat miskin yang terpencil, termasuk pembangunan fasilitas pelayanan pemerintah yang tidak merata karena hanya mengutamakan pembangunan disepanjang jalan raya. Oleh karena itu masalah keterbelakangan, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia di pedesaan belum mengalami perubahan yang berarti, justru kesenjangan sosial ekonomi dan perbedaan kualitas sumber daya manusia antara pedesaan dan perkotaan semakin menajam. Hubungan antara masyarakat kota dan desa bersifat satu arah (top down) dan ekstraktif bukan hubungan kerjasama dan saling mendukung, karena sumber daya pembangunan lebih dikuasi oleh masyarakat di perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. dkk. (2011). *Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal*. UPP STIM YKPN.
- Asy'ari, S. I. (1993). *Sosiologi Kota dan Desa*. Usaha Nasional.
- Bintarto. (1984). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia.
- Daldjoeni. (1997). *Seluk Beluk Masyarakat Kota*. Alumni.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian di Indonesia*. Erlangga.
- Fauzi, N. (2017). *Petani dan Penguasa Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Hariyono, P. (2007). *Sosiologi Kota untuk Arsitek*. Bumi Aksara.
- Horton, Paul B., D. (1984). *Sociology* (A. Ram (ed.)). Gelora Aksara Pratama.
- Ismawan, I. (2000). *Tragedi Petani*. Harian Bernas.
- Jamaludin, A. N. (2015a). Sosiologi Perdesaan. In *CV. Pustaka Setia* (I, Vol. 53, Issue 9). CV. Pustaka Setia.
- Jamaludin, A. N. (2015b). Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya. In *Sosiologi Perkotaan* (Vol. 2, Issue 2).
- Jayadinata, J. T. (1999). *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Institut Teknologi Bandung.
- Kartono, D. T. (2010). Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Perkotaan. *Jakarta: Universitas Terbuka*, 1–48.
- Kartono, K. (2003). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Grafindo Persada.
- Kuswartojo, T. (2005). *Perumahan dan Pemukiman di Indonesia*. Penerbit ITB.
- Leibo SU, J. (1995). *Sosiologi Pedesaan: Strategi Pembangunan Berparadigma Ganda*. Andi Offset.
- Mankiw, N. G. (2003). *Makroekonomi*. Erlangga.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama.
- Meno, S., Alwi, Mustamin. (1992). *Antropologi Perkotaan*. Rajawali Press.
- Muana, N. (2005). *Makro Ekonomi Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Rajawali Press.
- Murdiyanto, E. (2008). *Sosiologi Pedesaan*. Wimaya Press UPN "Veteran."
- Nain, U. (2017). *Sosiologi Pembangunan Desa*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/236>
- Nain, U. (2019). *Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris* (M. Faisal (ed.)). Garis Khatulistiwa.
- Narwoko, D. J., & Suyanto, B. (2007). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Kencana.
- Pradadimara, D. (2005). *Penduduk Kota, Warga Kota, dan Sejarah Kota: Kisah Makasar. dalam Freek Colombio dkk (Editor), Kota Lama Kota Baru*. Ombak.

- Ritzer, G. (2003). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Raja Grafindo Persada.
- Santrock, J. W. (2003). *Adolescence Perkembangan Remaja*. Erlangga.
- Setiadi, E. M. (2011). *Pengantar Sosiologi*. Kencana.
- Simanjuntak, B. (1984). *Latar Belakang Kenakalan Remaja*. Alumni.
- Soekanto, S. (1984). *Antropologi Hukum: Pengembangan Ilmu Hukum Adat*. Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2004). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press.
- Sukirno, S. (2011). *Ekonomi Pembangunan*. Kencana Prenada Group.
- Sunarno, S. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika Offset.
- Susilawati, N. (2012). *Sosiologi Pedesaan*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/67an9>
- Sutoyo, A. (2009). *Bimbingan dan Konseling Islami Teori dan Praktik*. Widya Karya Semarang.
- Syukir, A. (1983). *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*. Al-Ikhlâs.
- Tamin, O. Z. (1997). *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*. Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung.
- Yuwono, T. ed. (2001). *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Berdasar Paradigma Baru*. Universitas Diponegoro.